



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Tahun 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon

Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41);

15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RIK Tahun 2018-2023 adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RIK Tahun 2018-2023 berpedoman pada perencanaan tahap ke-4 (empat) dari RPJPD Kota Cirebon Periode Tahun 2005-2025, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan RIK melibatkan berbagai unsur meliputi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian/ lembaga di daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan lainnya, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan fungsi Kelitbangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen

RPJMD, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

- (2) Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis Kelitbangan.

BAB III

ISI DAN URAIAN RIK

Pasal 4

- (1) Dokumen RIK Kota Cirebon Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Sasaran
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Umum Kelitbangan

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah
- 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan
 - 2.2.1. Kelembagaan
 - 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan
 - 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan
 - 2.2.4. Peluang dan Tantangan
- 2.3. Potensi dan Permasalahan
- 2.4. Peluang dan Tantangan

Bab III : Arah Kebijakan Kelitbangan

- 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah
 - 3.1.2. Visi dan Misi

- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah
 - 3.2.1. Arah Kebijakan
 - 3.2.2. Strategi
- 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah
 - 3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - 3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah
 - 3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Bab IV : Strategi Pelaksanaan

- 4.1. Kelembagaan
 - 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan
 - 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan
 - 4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan
- 4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Bab V : Penutup.

- (2) Isi dan Uraian RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV EVALUASI

Pasal 5

- (1) Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.
- (2) Evaluasi paruh waktu untuk mereviu kesesuaian indikasi program Kelitbangan yang terakomodir

dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana Induk Kelitbangan.

- (3) Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.
- (4) Evaluasi Akhir tahun pelaksanaan, dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.

BAB V

PERUBAHAN RIK

Pasal 6

- (1) RIK dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Maret 2019
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 10

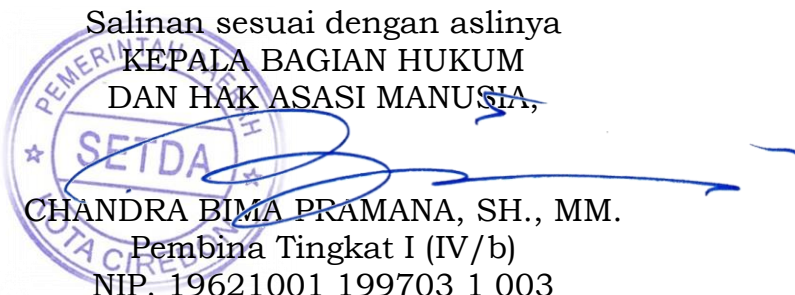
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2018 – 2023

ISI DAN URAIAN RIK

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran serta sistematika penulisan Rencana Induk Kelitbangan.

Bab II Gambaran Umum Kelitbangan :

Berisi tentang gambaran umum wilayah Kota Cirebon yang digambarkan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Kondisi sumber daya Kelitbangan yang menggambarkan kondisi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Kelitbangan, Pendanaan Kelitbangan dan Kerjasama Kelitbangan. Dalam bab ini juga berisi potensi dan permasalahan, peluang dan tantangan.

Bab III Arah Kebijakan Kelitbangan

Berisi tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang meliputi arah kebijakan dan strategi jangka panjang pembangunan daerah serta visi dan misi. Arah kebijakan Kelitbangan daerah yang meliputi arah kebijakan strategi. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah yang meliputi program prioritas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, program prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, serta program prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK.

Bab IV Strategi Pelaksanaan

Berisi tentang Kelembagaan yang meliputi kordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi Kelitbangan, kerjasama dan sinergitas pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.


Bab V Penutup

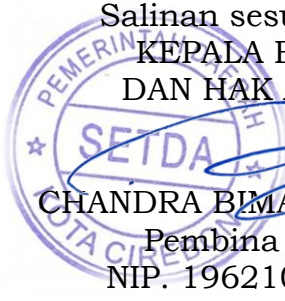
Demikian Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon ditetapkan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003





RENCANA INDUK KELITBANGAN TAHUN 2018-2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005-2025, maka periode Tahun 2019-2024 dimulai pada tahapan keempat yang diarahkan pada penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan berakhir pada tahapan keempat yang diarahkan untuk mewujudkan “ Sehati Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah “. Berdasarkan visi jangka panjang daerah 2005-2025 dan dengan memperhatikan kondisi umum daerah serta tantangan pembangunan 2019-2024, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon merumuskan visi pembangunan daerah 2005-2025 yaitu **“DENGAN NUANSA RELIGIUS KOTA CIREBON MENJADI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menetapkan 6 misi, yaitu :

- (1) Mewujudkan masyarakat yang religius;
- (2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- (3) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
- (4) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan berkelanjutan;
- (5) Meningkatkan Kelestarian Lingkungan.
- (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum di ikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

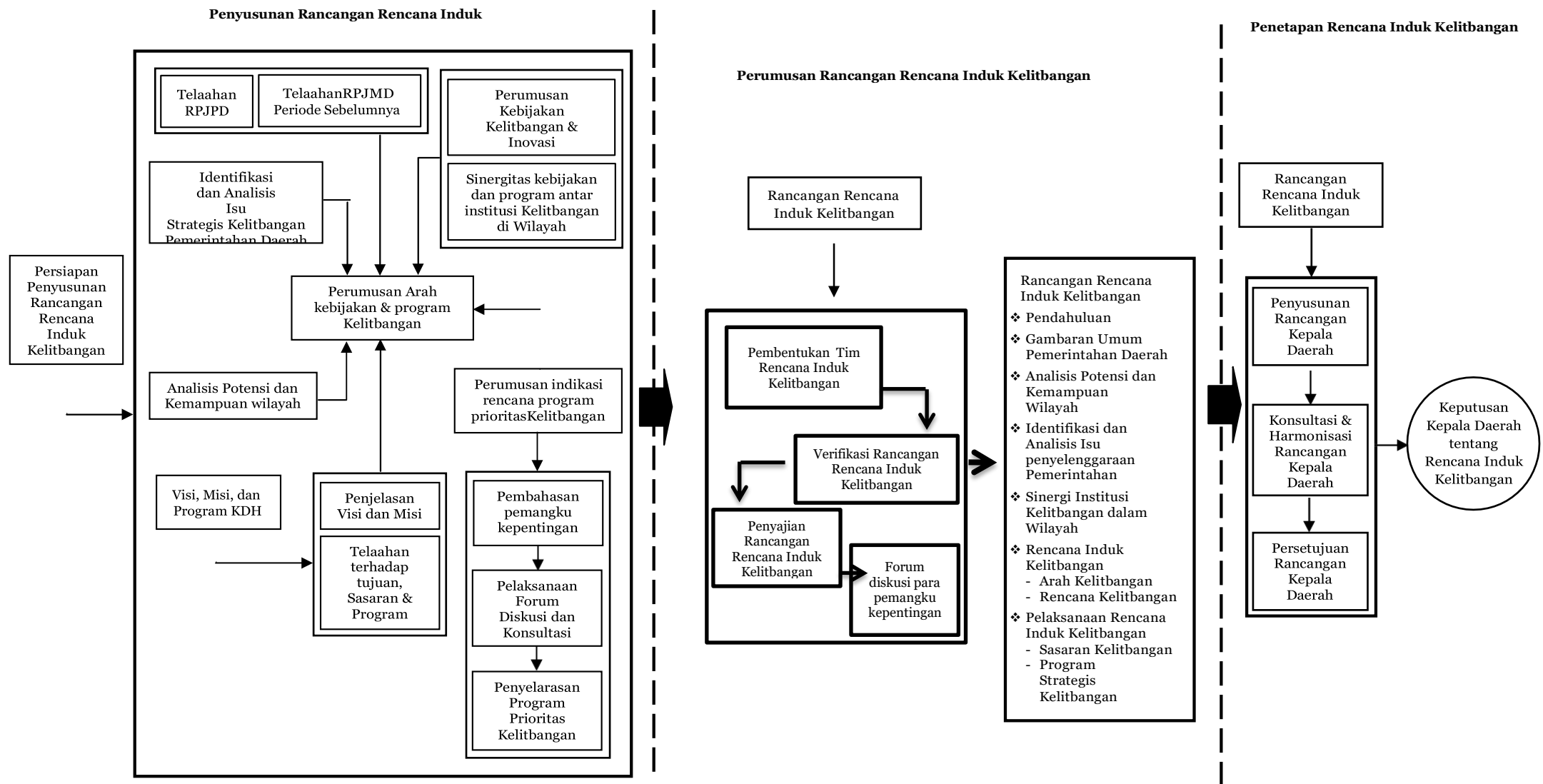
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat litbang daerah, BPPPPD mengemban amanat untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut di atas. Pelaksanaan Kelitbangan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan dan kualitas kebijakan di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sehingga diharapkan pelaksanaan Kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdaya guna. Lebih jauh, dalam Pasal 20 Undang-Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan strategis, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi dan Misi tersebut erat kaitannya dengan peran BPPPPD sebagai perangkat litbang daerah selaku pelaksana teknis yang membantu Wali Kota dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi. Perangkat litbang daerah diharapkan mampu berperan strategis dalam rangka merumuskan dan memperkuat kebijakan inovasi daerah agar tercipta peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386 dan Pasal 390.

Untuk menyelaraskan kebutuhan Kelitbangan dan inovasi jangka menengah dengan arah pembangunan daerah di Kota Cirebon maka perlu disusun Rencana Induk Kelitbangan yang wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Induk Kelitbangan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan dokumen arah kebijakan Kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang Kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Cirebon, masukan dari semua pemangku kepentingan, potensi dan kemampuan wilayah serta isu-isu strategis Pemerintah Daerah daerah yang akan menjadi prioritas Kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan disusun dengan melakukan penelaahan terhadap rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJPD & RPJMD) sehingga fungsi Kelitbangan selaras dan dapat memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Diagram alir penyusunan Rencana Induk Kelitbangan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
Sumber : Permendagri No 17 Tahun 2016

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Cirebon Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Tahun 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 10);

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Cirebon Tahun 2018-2023, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan Program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Kota Cirebon.

1.3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan lingkup Pemerintahan Kota Cirebon guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis Kelitbangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 mengacu pada Penetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian pada beberapa bagian agar selaras dengan karakteristik daerah serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Cirebon 2018-2023 dilanjutkan dengan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dari penyusunan RIK kemudian sasaran dan tujuan serta diakhiri dengan menampilkan sistematika laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Bab ini memaparkan kondisi di Kota Cirebon khususnya yang terkait dengan Kelitbangan. Diawali dengan pemaparan gambaran umum wilayah agar diperoleh gambaran kondisi dan potensi yang dimiliki Kota Cirebon. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi sumber daya Kelitbangan meliputi kelembagaan, sumber daya manusia Kelitbangan, pendanaan dan kerjasama Kelitbangan. Pada Bab ini juga dipaparkan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan Kelitbangan di Kota Cirebon.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bagian ini menjelaskan mengenai arah kebijakan Kelitbangan Kota Cirebon dengan memaparkan tiga komponen utama yaitu arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi Kelitbangan daerah dan indikasi program prioritas Kelitbangan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah berupa telaahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta visi dan misi pembangunan daerah. Indikasi program prioritas diklasifikasikan menjadi 4 bidang yaitu Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Bidang sosial dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Bagian ini menguraikan strategi pelaksanaan Kelitbangan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan berfokus pada strategi kelembagaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi Kelitbangan serta kerjasama dan sinergisitas pelaksanaan. Bagian ini diakhiri dengan konsep evaluasi pelaksanaan Kelitbangan daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dari Laporan Rencana Induk Kelitbangan berisi penekanan kembali pada hal-hal penting dalam laporan dan harapan bahwa rencana induk Kelitbangan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kelitbangan daerah di Kota Cirebon untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1 GAMBARAN UMUM KOTA CIREBON

Kondisi daerah Kota Cirebon digambarkan berdasarkan: (I) aspek geografi dan demografi, (II) aspek kesejahteraan masyarakat, (III) aspek pelayanan umum, dan (IV) aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Cirebon

2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Cirebon terletak di pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian timur, yang berada pada jalur utama transportasi strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui daerah utara atau lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon, terletak di pulau Jawa bagian Barat dengan bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter (termasuk dataran rendah), yang merupakan bagian wilayah pantai utara pada koordinat 108,33° Bujur Timur dan 6,42° Lintang Selatan.

2.1.1.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif, Kota Cirebon memiliki luas wilayah ± 37,35 km² atau ± 3.735,8 hektar yang terbagi menjadi 5 kecamatan, 22 kelurahan, 247 Rukun Warga (RW), dan 1.366 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah administrasi yaitu:

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

Secara rinci jumlah kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga di Kota Cirebon dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1
Wilayah Administrasi Kota Cirebon

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Harjamukti	361	5	1. Argasunya 2. Kalijaga 3. Harjamukti 4. Kecapi 5. Larangan	76	457
2	Lemahwungkuk	157	4	1. Pegambiran 2. Kesepuhan 3. Lemahwungkuk	42	232

				4. Panjunan		
3	Pekalipan	652	4	1. Pekalipan 2. Pulasaren 3. Jagasatru 4. Pekalangan	39	186
4	Kesambi	805	5	1. Karyamulya 2. Sunyaragi 3. Drajat 4. Kesambi 5. Pekiringan	55	308
5	Kejaksan	1.761	4	1. Kejaksan 2. Sukapura 3. Kebonbaru 4. Kesenden	35	183
JUMLAH		3.736	22		247	1.366

Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2017, Kerjasama DKIS dan BPS Kota Cirebon.

2.1.1.1.3 Kondisi Topografis

Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbangun ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut. Daerah genangan air di wilayah Kota Cirebon sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Lokasi Potensi Genangan Air di Kota Cirebon

No	Lokasi	Tinggi Genangan (meter)	Lama Genangan (jam)
1	Perumahan Taman Majasem	0,3	2
2	Perumahan Griya Sunyaragi Permai	1,0	2
3	Jalan Terusan Pemuda	0,4	3
4	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	0,5	2
5	Jalan Gunung Sari	0,3	3
6	Perumahan Sukasari RW.3	0,5	2
7	Perumahan Cangkring	0,5	4
8	Jalan Merdeka	0,3	4
9	Kesunean Kriyan	0,5	3
10	Buyut	0,3	1
11	Pertigaan Tiga Berlian	0,3	5
12	Kerta Semboja	0,3	2
13	Perumnas Burung	0,3	3
14	Perumnas Gunung	1,0	3
15	Perumahan Permata Harjamukti	0,5	4
16	Perumahan Griya Ciremai Giri (Kalijaga)	1,0	3
17	Jalan Katiasa Penggung	0,3	1
18	Jalan Kalitanjung	0,3	0,5

Sumber : Kantor Penanggulangan Bencana Daerah & Pemadam Kebakaran (2017)

2.1.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi Kota Cirebon termasuk daerah beriklim tropis. Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi berkisar antara 24,28°C – 29,83°C dengan curah hujan per Tahun sebanyak 2.574 mm per Tahun dengan hari hujan 161 hari.

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara dua meter sampai enam meter. Ada beberapa daerah/wilayah kondisi air tanah relatif sangat rendah dan rasanya asin karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum. Di kota cirebon terdapat empat sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu:

1. Sungai Kedung Pane,
2. Sungai Sukalila,
3. Sungai Kesunean (Kriyan) dan
4. Sungai Kalijaga.

Sungai tersebut berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, saluran pembuangan air dan masih dipergunakan oleh sebagian kecil penduduk sebagai MCK. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Cirebon telah mengalami perubahan dengan indikasi adanya pencemaran air. Regulasi yang kurang tegas terhadap pengelolaan limbah sebagai salah satu penyebab adanya indikasi pencemaran air tersebut, selain itu masih adanya ketidakpedulian warga yang masih membuang limbah rumah tangganya di sungai. Beberapa aliran sungai yang diindikasikan adanya pencemaran (*Amoniak*, *Deterjen*, dan *Pecal Coli*) diantaranya di sungai Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong.

2.1.1.1.6 Kondisi Geologi

Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol yang berasal dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi. Namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungan tanahnya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan bekas galian C Argasunya.

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan aktivitas menyebabkan perubahan penggunaan lahan sulit dikontrol khususnya di daerah perkotaan, untuk Kota Cirebon perubahan penggunaan lahan banyak terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Dari beberapa kejadian perubahan penggunaan lahan, terdapat 3 Kelurahan di Kecamatan Harjamukti dan 2 Kelurahan di Kecamatan Kesambi yang mengalami perubahan lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian.

Sebagian besar lahan di Kota Cirebon merupakan lahan non pertanian yaitu mencapai 95 persen dari lahan keseluruhan. Penggunaan lahan untuk pertanian hanya mencapai 5 persen, yang digunakan sebagai lahan pertanian sawah 3 persen dan lahan pertanian non sawah 2 persen.

Tabel 2.3

Persentase Penggunaan Lahan di Kota Cirebon Tahun 2015 (%)

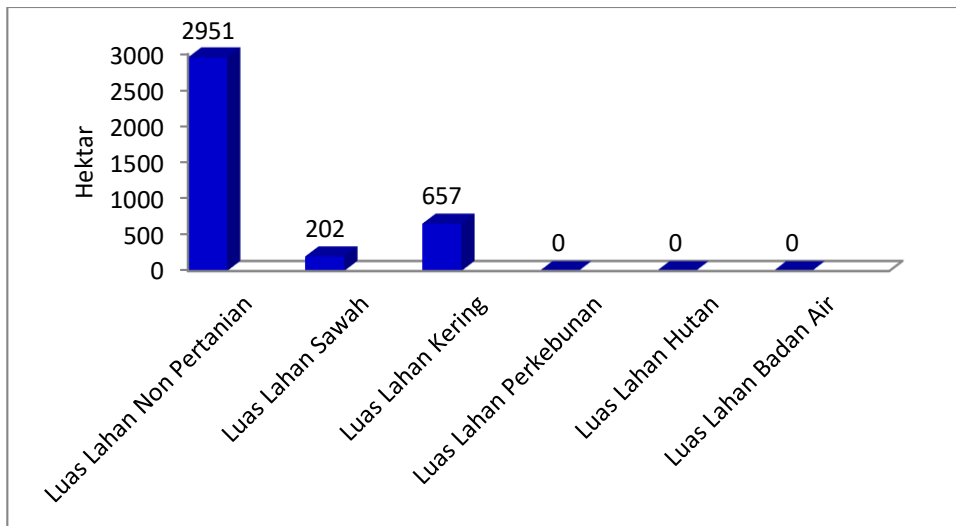
No.	Uraian	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian (%)	Jumlah
		Lahan Sawah (%)	Lahan Bukan Sawah (%)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penggunaan Lahan	3%	2%	95%	100%

Sumber : Statistik Daerah Kota Cirebon Tahun 2016, BPS.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, daerah terbangun di Kota Cirebon didominasi oleh penggunaan lahan permukiman, perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, pelabuhan, keraton, rumah sakit, mall, kawasan militer, bandara, dan lain-lain. Selain lahan terbangun, di Kota Cirebon juga lahannya termanfaatkan untuk lahan tidak terbangun yang terbagi menjadi pemanfaatan kebun, kolam, mangrove, sawah, semak, TPU, dan tanah kosong. Berdasarkan data penggunaan lahan Tahun 2017, luas Kota Cirebon sekitar \pm 3.810 Ha yang terdiri dari penggunaan lahan terbangun seluas 2.712 Ha atau sekitar 77 persen dan lahan tidak terbangun sekitar 1.098 Ha atau sekitar 23 persen.

Gambar : 2.1

Penggunaan Lahan Utama Kota Cirebon Tahun 2017



Perkembangan suatu wilayah akan terus terjadi dari waktu ke waktu secara dinamis bersamaan dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk didalamnya, akan mengakibatkan meningkatnya permintaan lahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, sehingga saat ini lahan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Terdapat hubungan yang erat antara pergerakan masyarakat kota, infrastruktur dan trend ekonomi kota terhadap perubahan struktur morfologi ruang kota terkait aspek tata guna lahan maupun fisik perkotaan (Chapin, 1985).

Mengutip data dari buku “Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017” yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018, menyebutkan adanya perubahan penggunaan lahan produktif, yaitu lahan sawah yang semakin berkurang dari luas lahan lama sebesar 260 Ha berkurang menjadi 202 Ha. Di sisi lain menunjukkan adanya penambahan luasan lahan permukiman sebesar 58 Ha. Kondisi demikian berakibat negatif terhadap usaha masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, peruntukan lahan di Kota Cirebon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Peruntukan Lahan Di Kota Cirebon Berdasarkan RTRW Kota Cirebon
Tahun 2011 – 2031

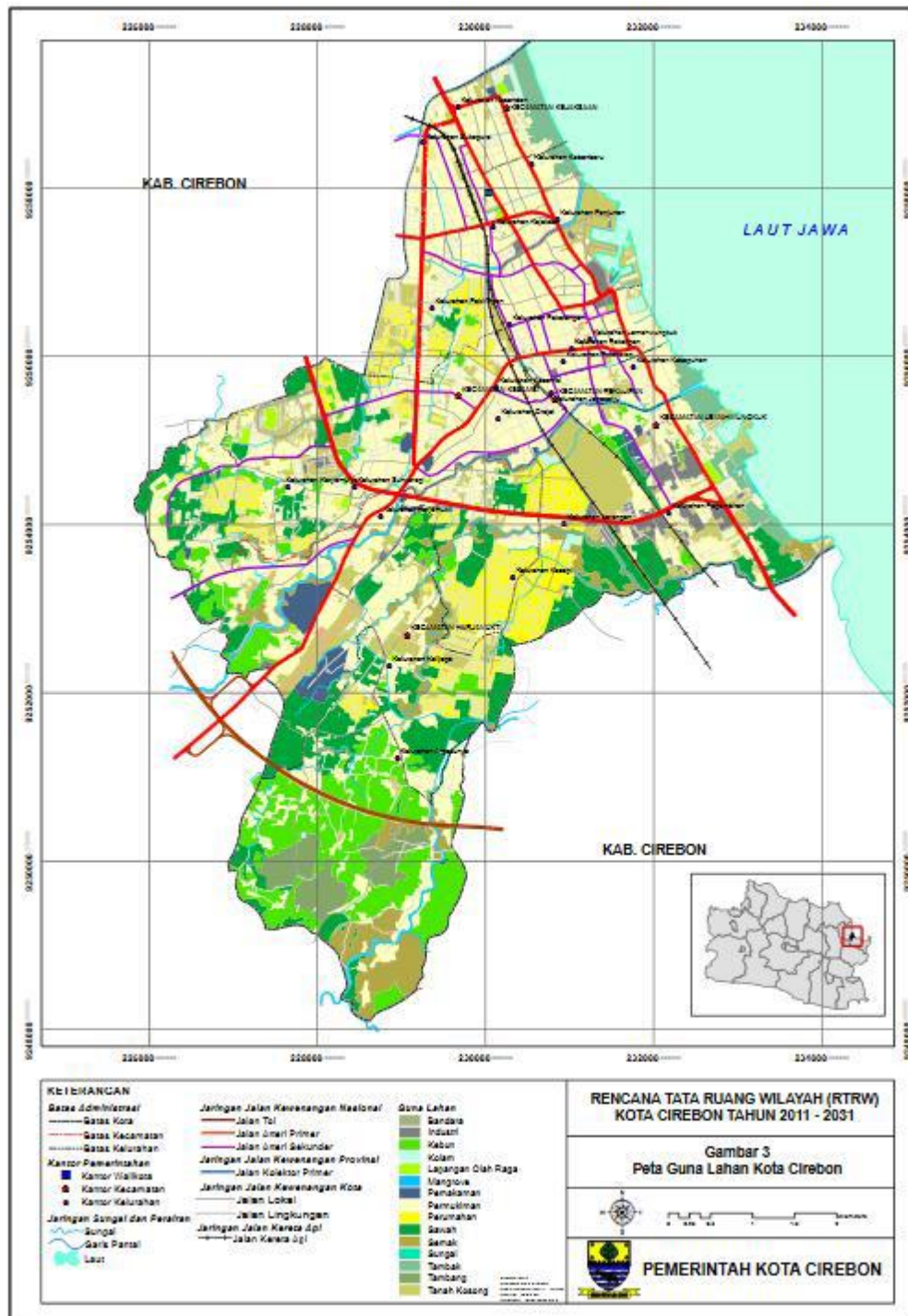
No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Lain-lain	7,68	0,20
2.	Bandara	4,64	0,12
3.	Industri	70,38	1,80
4.	Kebun	379,90	9,74
5.	Keraton	3,03	0,08
6.	Kesehatan	7,05	0,18
7.	Kolam	17,40	0,45
8.	Lapangan Olahraga	22,56	0,58
9.	Mall	4,20	0,11
10.	Mangrove	3,17	0,08
11.	Militer	9,09	0,23
12.	PLTG	5,62	0,14
13.	Pasar	7,07	0,18
14.	Pendidikan	81,68	2,09
15.	Pengolahan ikan	1,40	0,04
16.	Penjara	2,35	0,06
17.	Perdagangan dan Jasa	123,66	3,17
18.	Peribadatan	1,15	0,03
19.	Perkantoran	49,06	1,26
20.	Permukiman	1.195,71	31,38
21.	Perumahan	419,23	10,75
22.	Rumah Sakit	6,62	0,17
23.	SPBU	1,23	0,03
24.	Sawah	438,97	11,52
25.	Semak	178,35	4,68
26.	Stasiun Kereta Api	1,16	0,03
27.	Sungai	33,78	0,89
28.	T P U	62,93	1,65
29.	Tambak	71,74	1,88
30.	Tambang	79,68	2,28
31.	Tanah Kosong	397,79	10,44
32.	Terminal	4,85	0,12

33.	T P A	9,12	0,23
34.	Pelabuhan	77,52	1,98
TOTAL		3.810,0	100,00

Sumber : Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031

Gambar : 2.2

Peta Guna Lahan Kota Cirebon



Sumber : Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031

Arahan penggunaan lahan berdasarkan RTRW Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031 diuraikan sebagai berikut :

1. Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Cirebon terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan perumahan;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan peruntukan pertanian;
- g. Kawasan peruntukan perikanan;
- h. Kawasan peruntukan evakuasi bencana;
- i. Ruang bagi kegiatan sektor informal;
- j. Ruang terbuka non hijau;
- k. Kawasan peruntukan pendidikan tinggi;
- l. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
- m. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan; dan
- n. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

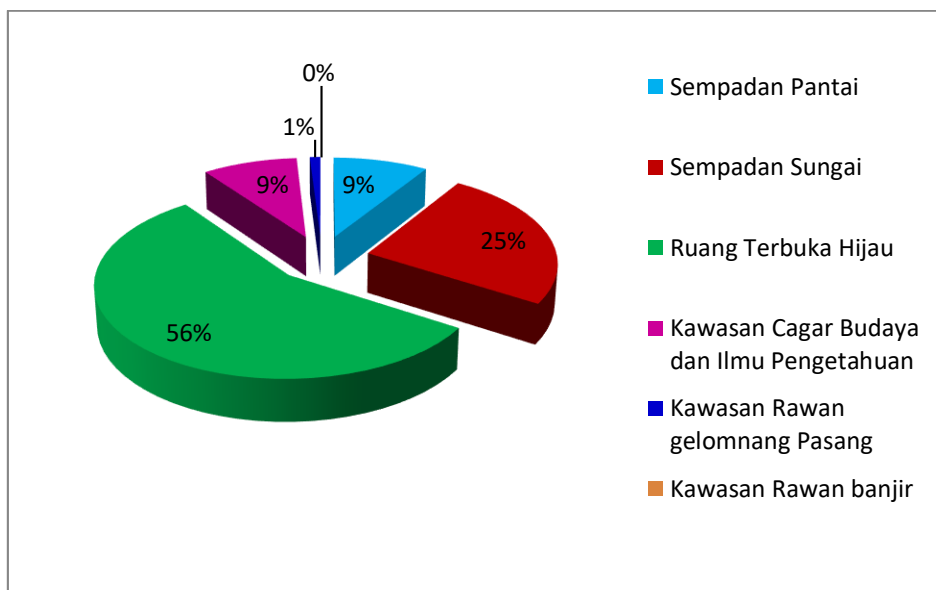
2. Kawasan Lindung.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Cirebon terdiri dari:

- a. Kawasan perlindungan setempat
- b. Kawasan rawan bencana
- c. Kawasan suaka dan cagar budaya
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Gambar : 2.3

Luas Kawasan Lindung Menurut RTRW Kota Cirebon
Tahun 2011 – 2031



3. Kawasan Strategis Kota.

- Kawasan Strategis Kota dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi : Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Sekitaran Gunung Sari, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ciremai Raya;
- Kawasan Strategis Kota dengan sudut kepentingan sosial budaya meliputi: Keraton Cirebon, Gua Sunyaragi, Majasem dan Argasunya-Kalijaga.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.

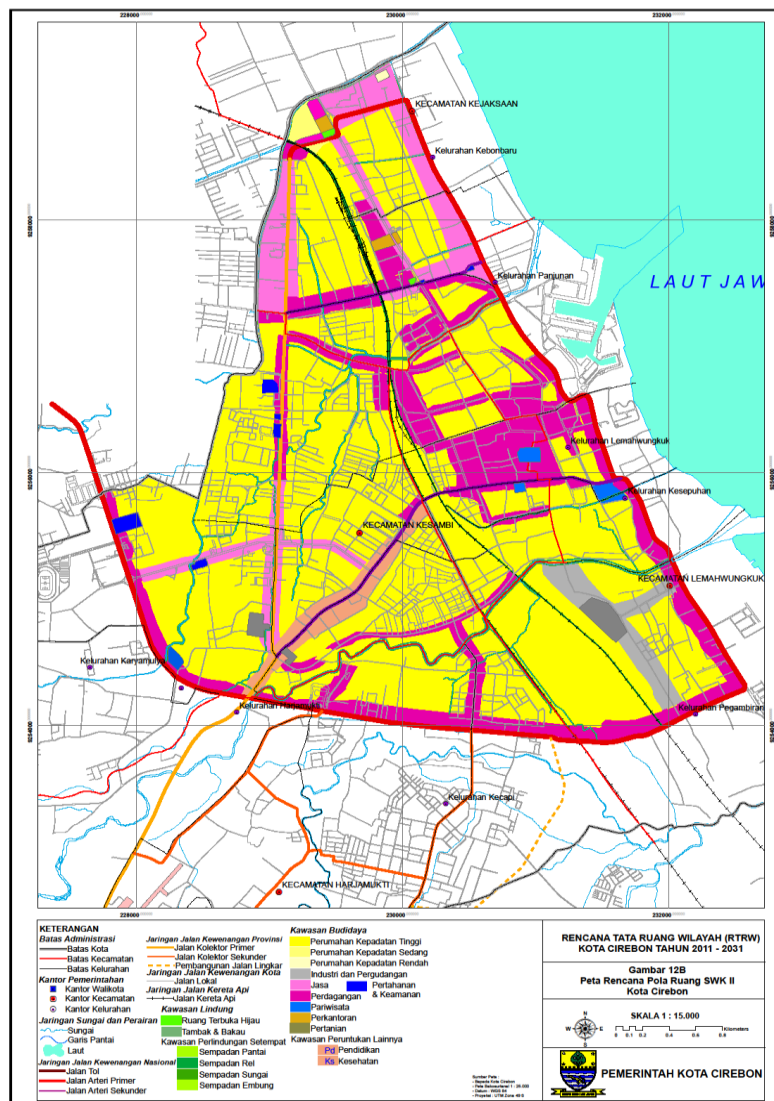
Kota Cirebon dalam Penataan Ruang Nasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu: Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Kota, yaitu :

- Sub Wilayah Kota (SWK) I merupakan kawasan dengan fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dengan struktur ruang yang ditetapkan :
 - Sub Pusat Pelayanan Kota (S-PPK) yaitu Kawasan Pelabuhan Cirebon yang berada di kelurahan Panjunan;

- (b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melayani skala lingkungan wilayah kota sebagai fungsi perdagangan dan jasa meliputi kelurahan Pegambiran, Panjunan, Kebon Baru, Kesenden, dan Lemahwungkuk, sedangkan sebagai fungsi pariwisata dan budaya meliputi kelurahan Lemahwungkuk dan Kesepuhan.
- (2) Sub Wilayah Kota (SWK) II dengan prioritas penanganan meliputi :
- Kawasan Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yaitu Gunung Sari – Cipto kelurahan Pekiringan kecamatan Kesambi, Kawasan Graze Mall 2 kelurahan Pegambiran kecamatan Lemahwungkuk.
 - Kawasan Prioritas Sosial Budaya adalah kawasan keraton Cirebon yang terletak di kelurahan Kesepuhan, Lemahwungkuk, Panjunan, kecamatan Lemahwungkuk.
 - Kawasan Prioritas Sarana Umum adalah kawasan sekitar goa sunyaragi dengan fungsi pusat pendidikan, olahraga, dan wisata, kawasan sekitar rumah sakit Ciremai sebagai fungsi kesehatan dan mitigasi bencana.

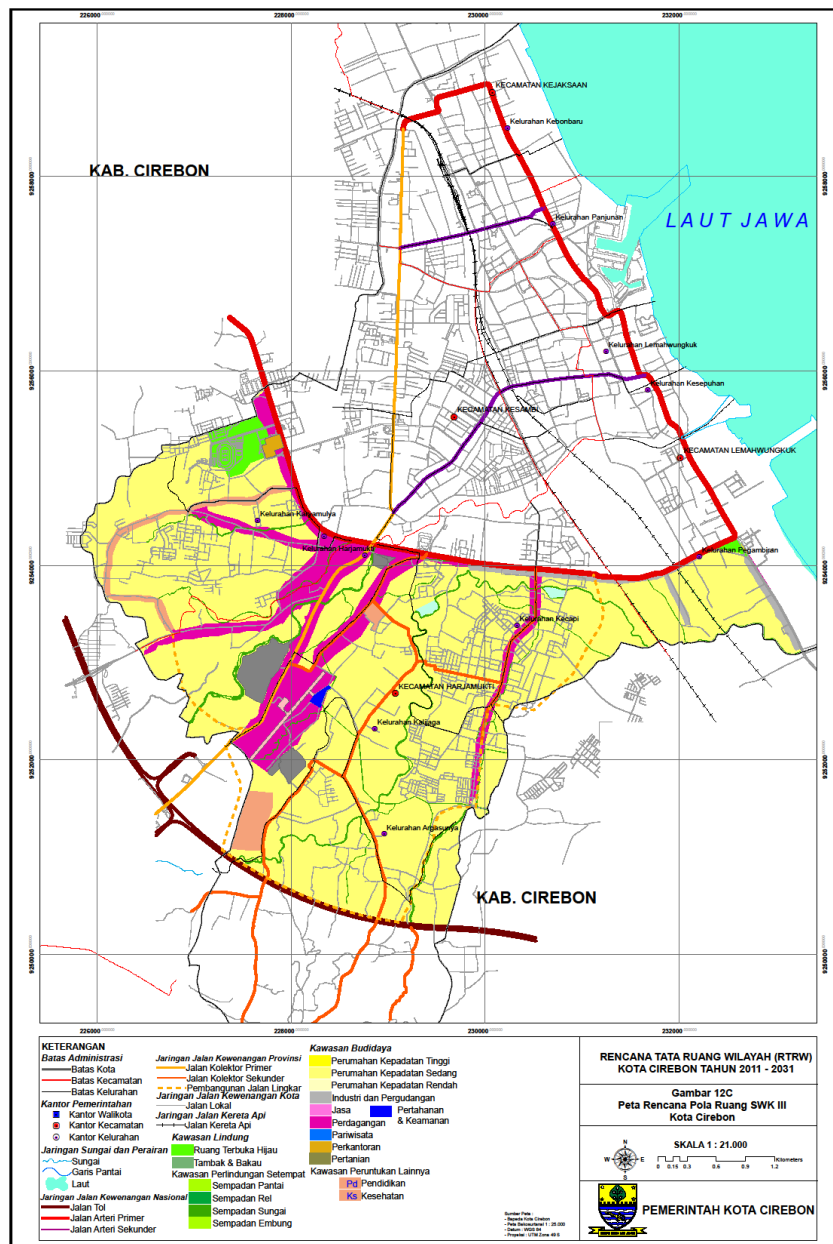
Gambar 2.4
Peta Rencana Pola Ruang SWK II Kota Cirebon



- (3) Sub Wilayah Kota (SWK) III merupakan kawasan yang diprioritaskan penganannya meliputi kawasan strategis Ciremai Raya sebagai fungsi perumahan, kawasan strategis Majasem, Kalijaga dan Argasunya sebagai fungsi pendidikan.

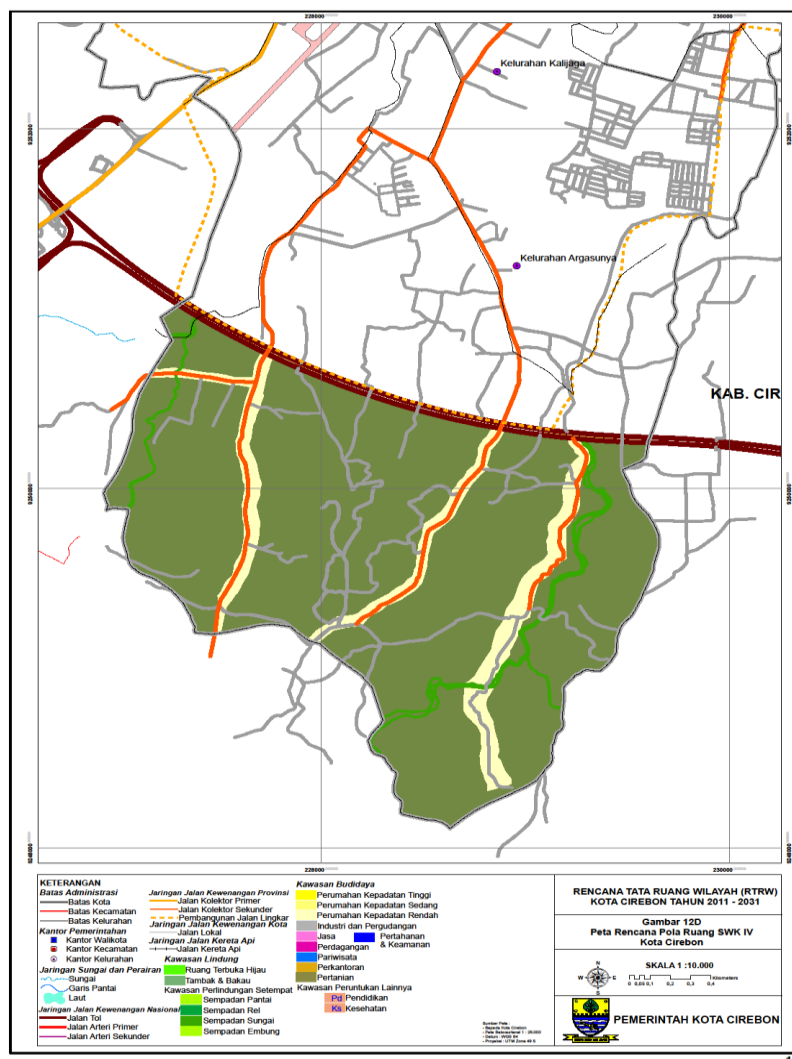
Gambar 2.5

Peta Rencana Pola Ruang SWK III Kota Cirebon



- (4) Sub Wilayah Kota (SWK) IV sebagai pelayanan pertanian campuran, pendukung wisata, area pemakaman, agrobisnis, wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan hankam.

Gambar 2.6
Peta Rencana Pola Ruang SWK IV Kota Cirebon



2.1.1.2.1 Pengembangan Kawasan Perumahan.

Pengembangan kawasan perumahan meliputi kawasan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Kawasan perumahan kepadatan tinggi seluas kurang lebih 869 hektar dengan KDB 60-75%, KLB maksimum 1,2 diarahkan di SWK I meliputi Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekalangan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Drajat, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi.

Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang seluas kurang lebih 848 hektar dengan KDB 45-60%, KLB maksimum 1 diarahkan di Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Larangan, Kelurahan Kecapi.

Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah seluas kurang lebih 217 hektar dengan KDB 30-45%, KLB maksimum 0,6 diarahkan di Kelurahan Argasunya.

2.1.1.2.2 Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa.

Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan seluas ± 568 hektar meliputi : Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko modern.

Pengembangan pasar terdiri atas: pengembangan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya terdapat di Pasar Kanoman Kelurahan Lemahwungkuk, Pasar Pagi Kelurahan Kejaksan, dan Pasar Jagastru Kelurahan Jagasatru. Pengembangan kegiatan perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah terdapat di Pasar Kramat di Kelurahan Kesenden, Pasar Drajat di Kelurahan Drajat, Pasar Perumnas di Kelurahan Kecapi, Pasar Kalitanjung di Kelurahan Harjamukti, Pasar Balong di Kelurahan Pekalipan, dan Pasar Gunung Sari di Kelurahan Pekiringan.

Pengembangan pusat perbelanjaan terdiri atas : Pengembangan pasar swalayan atau plaza diarahkan pada kawasan yang baru berkembang khususnya pada Sub Pusat Pelayanan Kota di kawasan Ciremai Raya terletak di Kelurahan Kecapi dan kawasan Majasem, terletak di Kelurahan Karyamulya; dan pengembangan kegiatan perdagangan skala besar (grosir) di sekitar pusat kota yaitu di sekitar Jl. Karanggetas, Jl. Pasuketan dan Jl. Pekiringan.

Pengembangan toko modern terdiri atas: Pengembangan toko modern (mini market) di Jalan Kesunean, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Rajawali Raya, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Kapten Samadikun, Jalan DR Wahidin, Jalan Pemuda, Jalan Nyi Mas Gandasari, Jalan Sunyaragi, Jalan Gunung Galunggung, Pelabuhan, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pekalipan, Jalan Kalitanjung, Jalan Kalijaga, Jalan Perjuangan, Jalan Evakuasi, Pegambiran Residence, Jalan Kartini, Jalan Kesambi, Jalan Ciremai Raya; dan perdagangan modern (supermarket) lokasinya tersebar di Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan Cipto, Jalan Rajawali, Jalan Ciremai Raya, Jl. By Pass Brigjen Dharsono, Jl. By Pass Ahmad Yani.

2.1.1.2.3 Pengembangan Kawasan Perkantoran.

Rencana kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan seluas ± 11 hektar meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta. Pengembangan perkantoran pemerintahan meliputi penataan perkantoran pemerintah terutama yang terletak di Jl. Siliwangi, diperuntukan mempertahankan fungsi dan bentuk penampilan bangunan dan pengembangan perkantoran pemerintah dengan skala pelayanan kota di kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan kawasan Kebon Pelok di Kelurahan Kalijaga.

Sedangkan pengembangan perkantoran swasta meliputi Jalan Siliwangi di Kelurahan Kejaksan, Jalan Kartini, Jalan Pemuda dan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo di Kelurahan Pekiringan, Jalan Wahidin di Kelurahan Sukapura, dan Jalan Yos Sudarso di Kelurahan Lemahwungkuk.

2.1.1.2.4 Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan.

Rencana kawasan peruntukan industri dikembangkan seluas ± 68 hektar meliputi industri kecil dan mikro; serta industri menengah. Pengembangan industri kecil dan mikro meliputi: industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Drajat, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, dan Kelurahan Pekalangan; sedangkan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki diarahkan di kelurahan Harjamukti dan untuk industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk mebeller), barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya diarahkan di Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Kalijaga.

Pengembangan industri menengah meliputi: industri pengolahan tembakau diarahkan di Kelurahan Panjunan; industri tekstil diarahkan di Kelurahan Pegambiran; industri pakaian jadi diarahkan di Kelurahan Pekalangan; dan industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman diarahkan di Kelurahan Harjamukti.

Sedangkan Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi pembatasan pengembangan peruntukan industri dan pergudangan di kawasan Pegambiran dan pemindahan kawasan pergudangan di Jalan Pekalipan dan Parujakan diarahkan ke kawasan Harjamukti.

2.1.1.2.5 Pengembangan Kawasan Wisata.

Rencana kawasan peruntukan pariwisata dikembangkan seluas ± 23 hektar meliputi: pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan. Pariwisata alam yang dikembangkan meliputi obyek wisata Pantai Kejawan di Kelurahan Pegambiran dan Taman Kera di Kelurahan Kalijaga. Sedangkan pengembangan wisata budaya meliputi obyek wisata Keraton Kesepuhan di Kelurahan Kasepuhan, Keraton Kanoman di Kelurahan Lemahwungkuk, Keraton Kacirebonan di Kelurahan Pulasaren, dan Taman Gua Sunyaragi di Kelurahan Sunyaragi. Wisata buatan dikembangkan di Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Kesenden, dan Taman Ade Irma Suryani di Kelurahan Lemahwungkuk.

2.1.1.2.6 Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Rencana pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau seluas kurang lebih 3 hektar terdiri atas kawasan perkantoran pemerintah di kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan kawasan Kebon Pelok di Kelurahan Kalijaga dan perkantoran swasta di Kelurahan Kejaksan.

2.1.1.2.7 Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal.

Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal meliputi: penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan di pusat kota yaitu di Jalan Siliwangi, Jalan

Kartini dan Jalan Karanggetas. Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran yaitu di Jalan Kartini, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Siliwangi, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, Jalan Brigjen Dharsono, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Ciremai Raya, Jalan Kalijaga Permai, Jalan Rajawali. Penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal di Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Pekiringan.

Arahan pengelolaan sektor informal meliputi:

1. pengaturan sektor informal pada malam hari pada ruas Jalan Pasuketan, Jalan Pekiringan dan Jalan Karanggetas,
2. pengembangan sektor informal pada tempat yang telah ditentukan,
3. mengembangkan ciri khas di setiap ruang yang diperuntukkan bagi sektor informal; dan
4. memberikan bantuan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan sektor informal.

2.1.1.2.8 Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana.

Penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi: ruang evakuasi bencana skala kota, ruang evakuasi bencana banjir, ruang evakuasi bencana gelombang pasang dan ruang evakuasi bencana kebakaran. Ruang evakuasi bencana skala kota terletak di Stadion Bima Kelurahan Sunyaragi dan Lapangan Kebon Pelok Kelurahan Kalijaga. Ruang evakuasi bencana banjir terdapat di Stadion Bima Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi. Sedangkan Ruang evakuasi bencana gelombang pasang terletak di Alun-Alun Kejaksan di Kelurahan Kebonbaru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Pegambiran. Untuk ruang evakuasi bencana kebakaran terdapat di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan dan Kelurahan Kecapi, diarahkan di Kantor Pemerintahan dengan memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana serta memanfaatkan ruang terbuka dalam bentuk lapangan olahraga.

2.1.1.2.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Cirebon terdiri dari kawasan pertanian, peternakan dan perikanan, kawasan pendidikan tinggi, pusat kesehatan, fasilitas peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

1. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi seluas kurang lebih 34 hektar di sekitar Majasem Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Kesambi dan pengembangan perguruan tinggi seluas kurang lebih 30 hektar di Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga di Kecamatan Harjamukti.

2. Kawasan peruntukan pusat kesehatan berupa pengembangan pusat kawasan kesehatan seluas kurang lebih 31 hektar di Kawasan Kesambi, Kelurahan Kesambi dan Kecamatan Kesambi.
3. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan meliputi pengembangan *Islamic Center* seluas ± 3 (tiga) hektar di Kelurahan Kejaksan.
4. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi: Korem-063/Gunung Jati, Kodim 06141 Kota Cirebon dan Lanal Cirebon.

2.1.1.2.10 Wilayah Rawan Bencana.

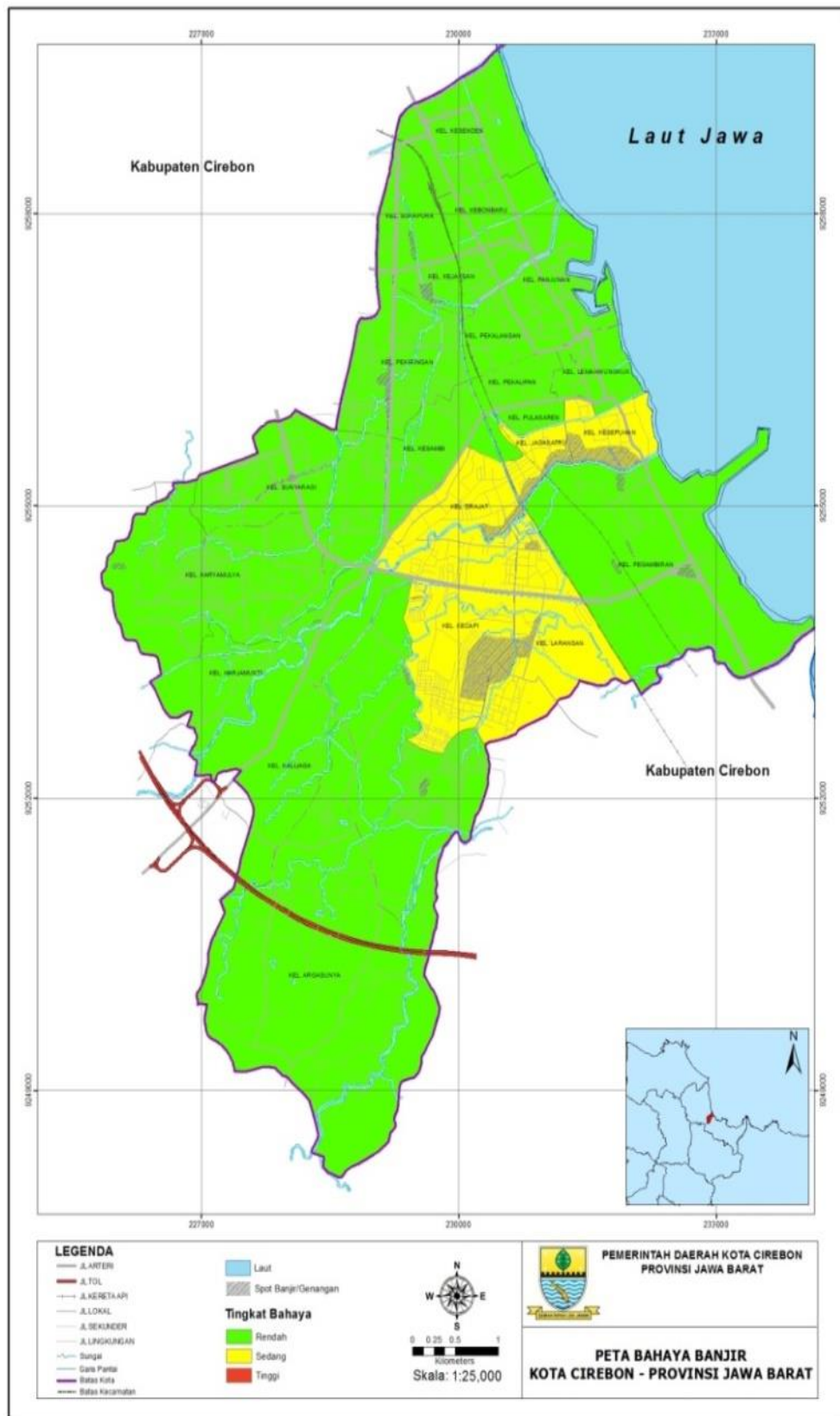
Wilayah rawan bencana (*hazard region*) adalah suatu kawasan permukaan bumi yang rawan bencana alam akibat prose alam maupun non alami. Sementara kerawanan bencana (*hazard vulnerability*) diartikan sebagai tingkat kemungkinan suatu obyek bencana untuk mengalami gangguan akibat bencana alam. Salah satu upaya untuk menanggulangi bencana alam adalah dengan mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara memetakan wilayah rawan bencana dan resiko bencana.

Berdasarkan RTRW Kota Cirebon, kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi rawan gelombang pasang, genangan banjir dan rawan kebakaran.

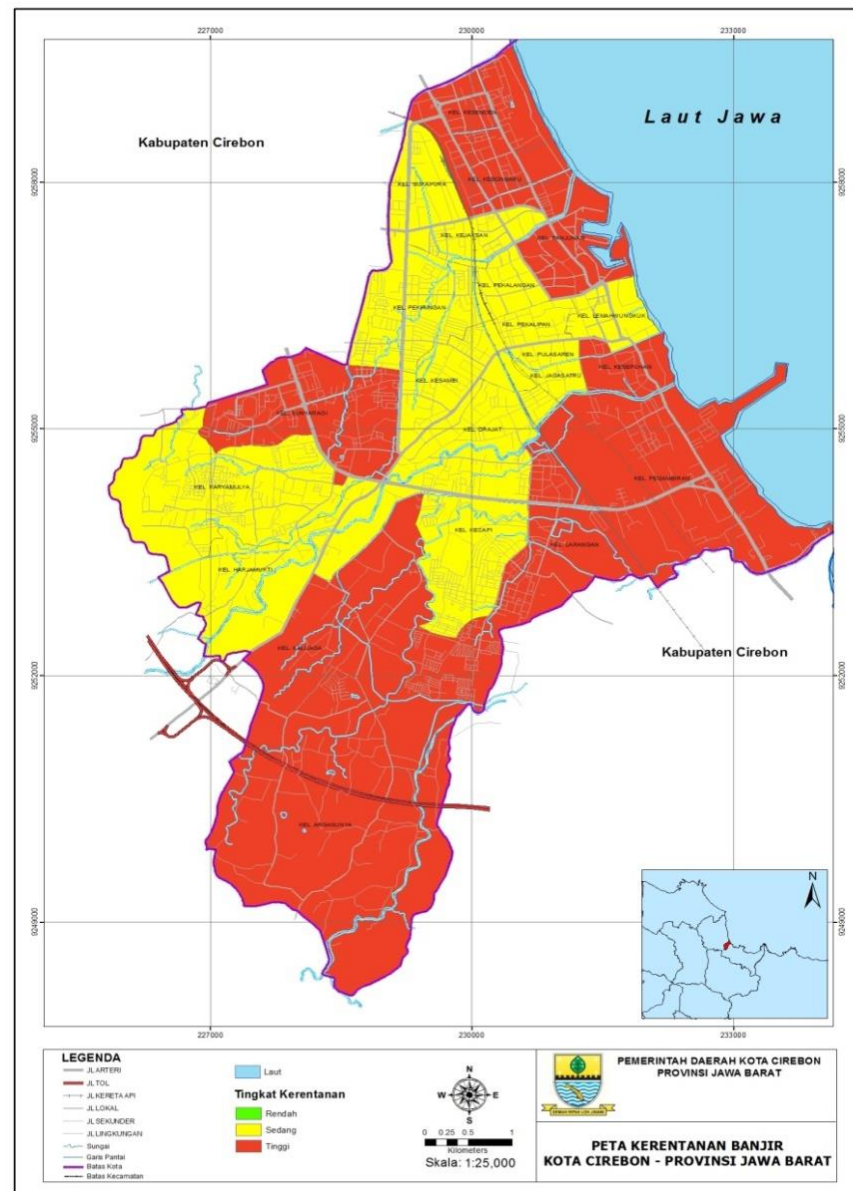
1. Genangan Banjir

Kawasan rawan genangan banjir berada di kawasan Jln. Pemuda dan Jln, Terusan Pemuda, kawasan Kampung Sukasari, Kawasan Jln. Dr. Ciptomagunkusumo, kawasan Gunungsari – Jln. Ampera, kawasan Perumnas Burung, kawasan Perumnas Gunung, kawasan Kali Tanjung dan kawasan Majasem.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Cirebon

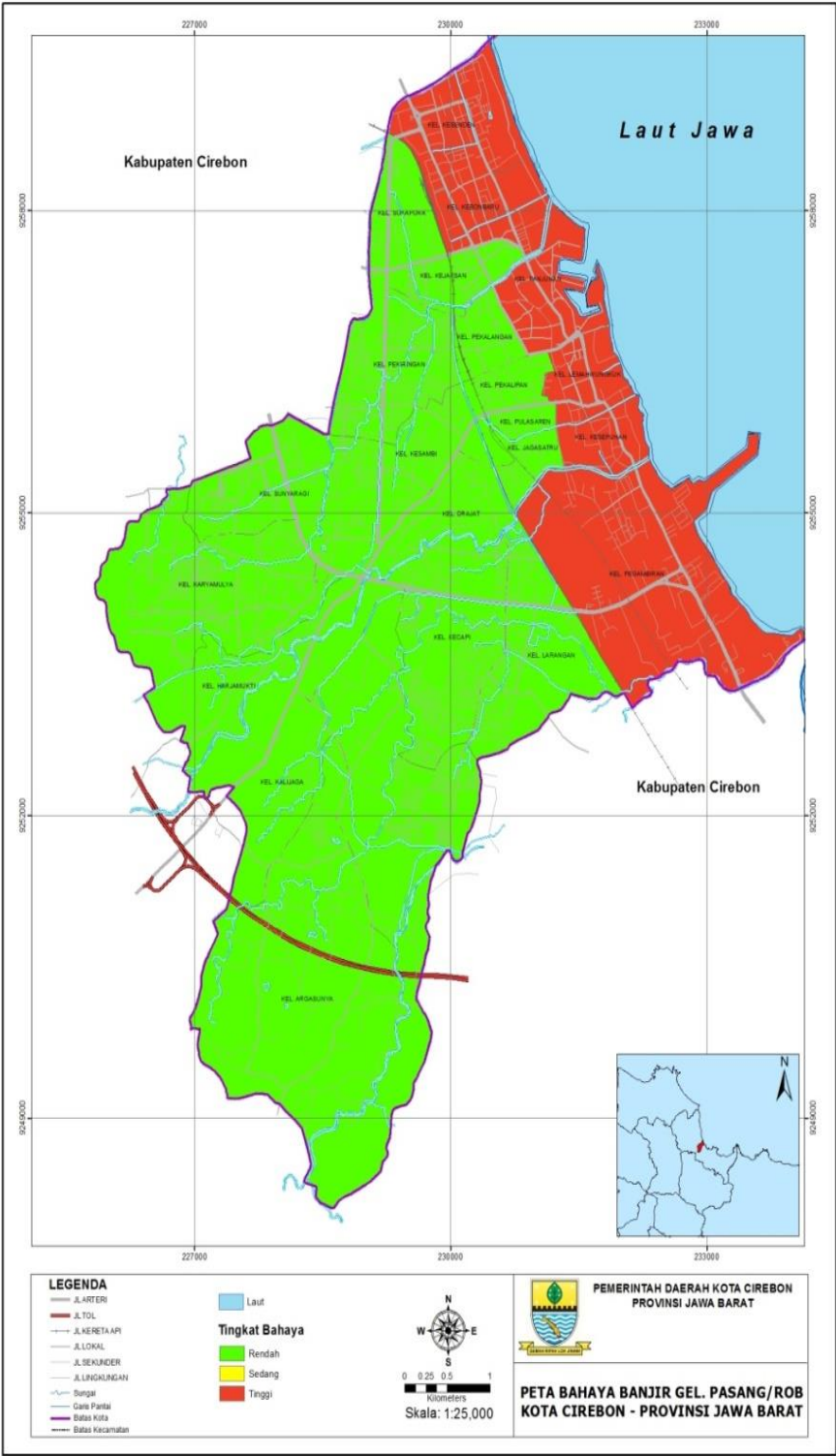


Gambar 2.8
Peta Kerentanan Banjir

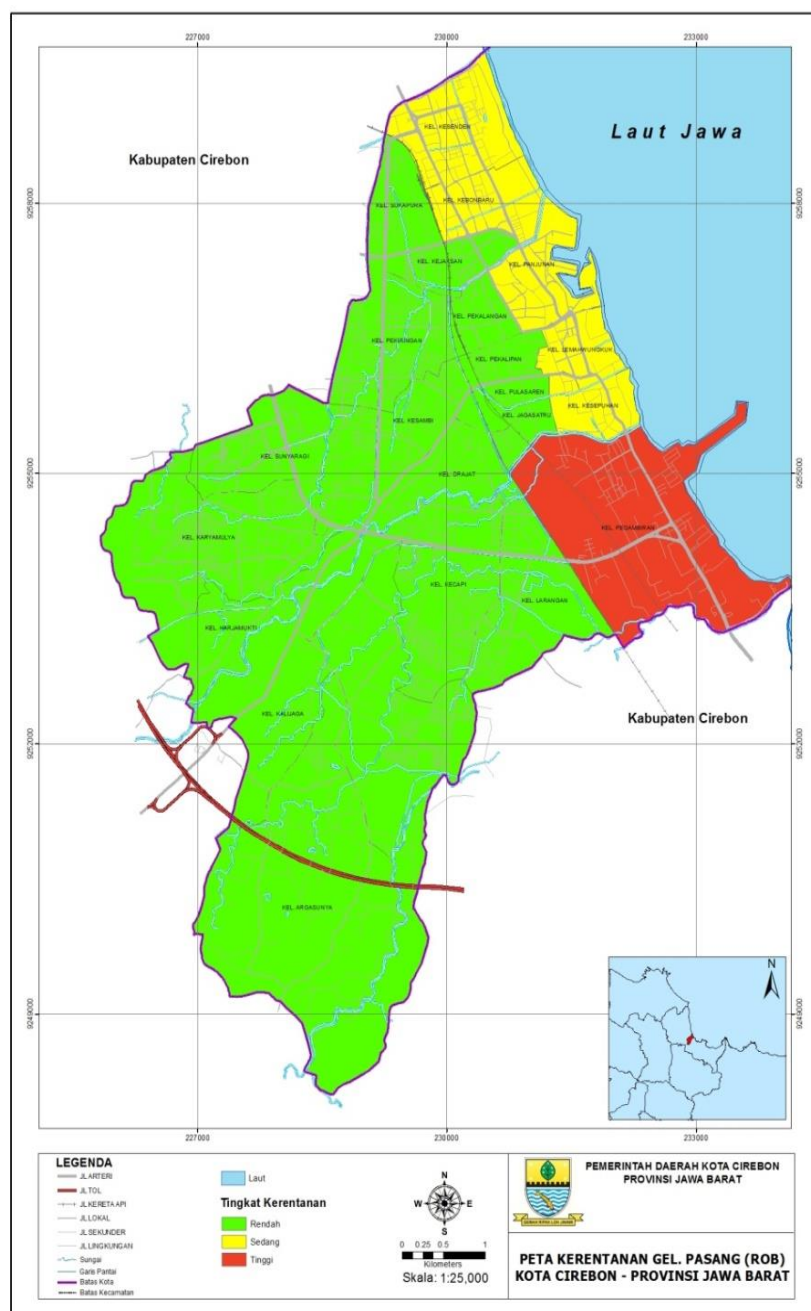


2. Selain kawasan rawan genangan banjir, Kota Cirebon juga berada pada lokasi kawasan rawan gelombang pasang yang berlokasi di Kelurahan Kesenden, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Panjunan, sebagaimana terlihat pada peta berikut.

Gambar 2.9
Peta Bahaya Rob

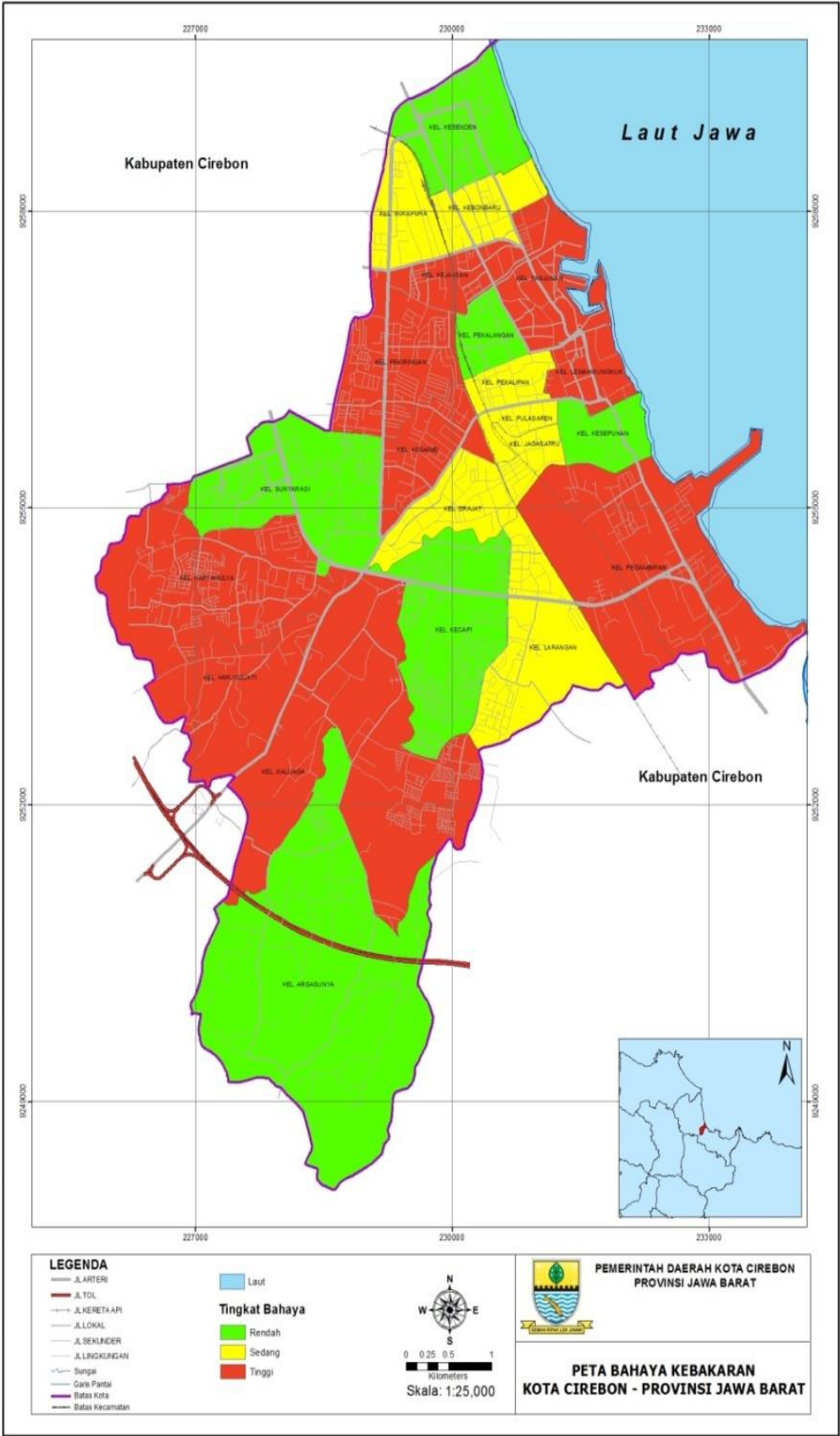


Gambar 2.10
Peta Kerentanan Rob

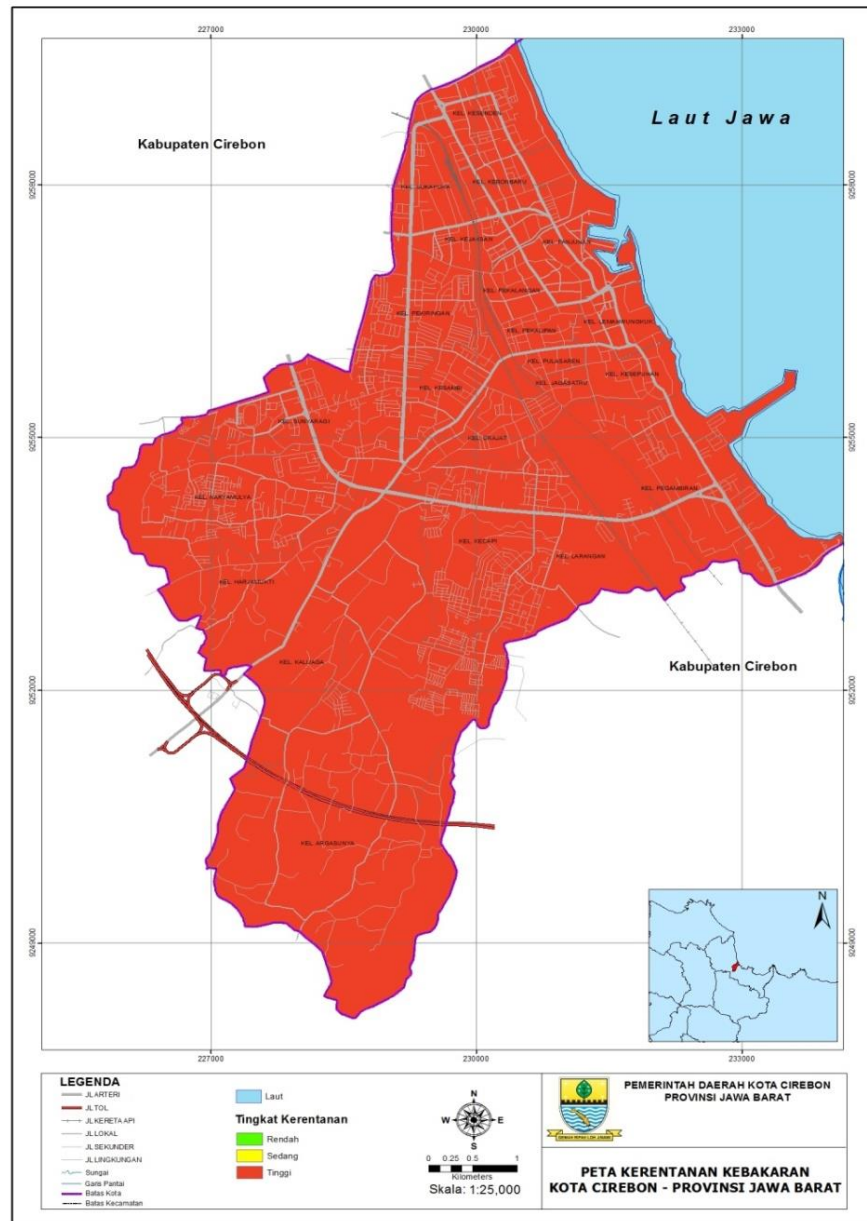


Kawasan rawan kebakaran meliputi kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan dan Kelurahan Kecapi, sebagaimana terlihat pada peta bahaya kebakaran dan peta kerentanan kebakaran.

Gambar 2.11
Peta Bahaya Kebakaran



Gambar 2.12
Peta Kerentanan Kebakaran



2.1.1.3 Demografi

Salah satu aspek yang menjadi prioritas pembangunan saat ini, yakni pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan atau demografi, baik dalam menata laju pertumbuhan maupun peningkatan kualitas penduduk, serta upaya penyediaan sarana dan prasarannya. Kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu daerah untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi kependudukan memiliki posisi strategis dalam penetapan kebijakan. Itu berarti pembangunan harus memperhatikan dinamika kependudukan yang sedang terjadi. Pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penduduk.

Sesuai Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 470/Kep.107.DISDUKCAPIL/2018 tentang Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2017. Berdasarkan Database Kependudukan Per Kelurahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai Data Dasar Kependudukan Kota Cirebon, jumlah penduduk Kota Cirebon per tanggal 1 Januari 2018 adalah 328.239 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 164.861 laki-laki dan 163.378 perempuan yang menempati wilayah Kota Cirebon seluas 37,358 km², sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kota Cirebon adalah sebanyak 8.744 jiwa/km².

2.1.1.3.1 Distribusi Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 Kecamatan. Pada Tahun 2017 sebaran jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Harjamukti yakni sebanyak 11.647 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Pekalipan yaitu 31.224 jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Tahun 2017, tercatat kecamatan Pekalipan yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi yakni sebesar 20.002 jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang paling kecil ada di kecamatan Harjamukti yakni sebesar 6.612 jiwa/km².

Tabel 2.5
Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2017

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK (Km ²)
Harjamukti	17,615	5	11647	6.612
Lemahwungkuk	6,507	4	57387	8.819
Pekalipan	1,561	4	31.224	20.002
Kesambi	8,059	5	76109	9.443
Kejaksan	3,616	4	47042	13.009
Kota Cirebon	37,358	22	328.239	8.786

Sumber Data: Keputusan Walikota Cirebon No.470/Kep.107 DISDUKCAPIL/2018.

2.1.1.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

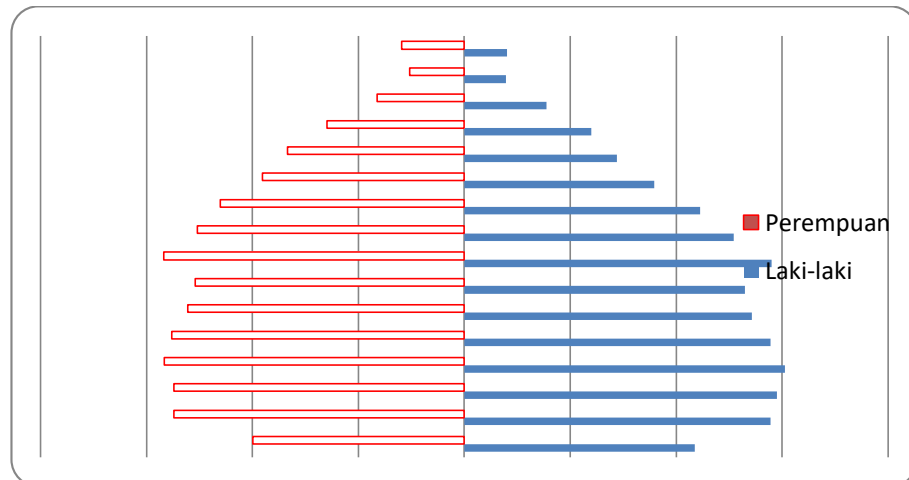
Jumlah penduduk Kota Cirebon pada Tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin terlihat proporsional antara laki-laki dan perempuan dengan rasio 100,57 persen. Berdasarkan kategori usia, sebagian besar penduduk kota Cirebon didominasi oleh masyarakat usia muda, dengan jumlah usia produktif (15-64 Tahun) sebanyak 233.282 jiwa atau sekitar 70,37 persen. sedangkan jumlah usia tua lebih sedikit sekitar 84.194 jiwa atau sekitar 5,59 persen. Berdasarkan bentuk piramida penduduk, terlihat angka kelahiran di Kota Cirebon masih cukup tinggi dan tingkat pertumbuhan penduduk juga tinggi.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
Kota Cirebon Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		JUMLAH	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
0 – 4	10,868	9,967	20,835	109.04%
5 – 9	14,450	13,701	28,151	105.47%
10 – 14	14,755	13,710	28,465	107.62%
15 – 19	15,141	14,170	29,311	106.85%
20 – 24	14,459	13,806	28,265	104.73%
25 – 29	13,576	13,042	26,618	104.09%
30 – 34	13,237	12,691	25,928	104.30%
35 – 39	14,513	14,181	28,694	102.34%
40 – 44	12,710	12,595	25,305	100.91%
45 – 49	11,136	11,510	22,646	96.75%
50 – 54	8,963	9,533	18,496	94.02%
55 – 59	7,206	8,344	15,550	86.36%
60 – 64	5,995	6,474	12,469	92.60%
65 – 69	3,870	4,110	7,980	94.16%
70 – 74	1,976	2,581	4,557	76.56%
> 75	2,006	2,963	4,969	67.70%
Jumlah	164,861	163,378	328,239	100.91%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Gambar 2.13
Piramida Penduduk Kota Cirebon Tahun 2017



Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon 2017, Disdukcapil Kota Cirebon.

2.1.1.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Berdasarkan data Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon Tahun 2017, jumlah angkatan kerja kota Cirebon Tahun 2017 sebanyak 145.152 jiwa dengan komposisi penduduk bekerja sebanyak 128.269 jiwa dan penduduk pencari kerja sebanyak 16.883 jiwa.

Tabel 2.7
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	% Pencari Kerja
15 – 19	29.368	4.229	3.405	7.634	2,41
20 – 24	26.596	13.857	4.879	18.736	3,45
25 – 29	25.942	16.665	2.444	19.109	1,73
30 – 34	26.333	18.531	1.352	19.883	0,96
35 – 39	23.759	16.605	1.178	17.783	0,83
40 – 44	23.098	16.679	964	17.643	0,68
45 – 49	20.050	13.578	1.114	14.692	0,79
50 – 54	17.747	11.525	595	12.120	0,42
55 – 59	14.801	8.515	468	8.983	0,33
60 – 64	9.480	4.407	309	4.716	0,22
Jumlah	217.174	124.591	16.707	141.298	11,82

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, data diolah.

2.1.1.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Salah satu cermin penduduk yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduknya. Tingkat pendidikan yang tinggi merupakan aset dan potensi kekuatan pembangun daerah. Sebaliknya, daerah yang sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan menjadi beban pembangunan yang harus mendapat perhatian lebih. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk usia kerja di Kota Cirebon pada Tahun 2017 didominasi oleh penduduk yang tamat SLTA/ sederajat dengan persentase sebesar 39,34 persen berikutnya kelompok penduduk yang tamat SMP/ sederajat sebesar 18,89 persen dan penduduk yang tamat SD/ sederajat sebesar 18,26 persen. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi hanya sebesar 12,60 persen. Jumlah penduduk usia kerja Kota Cirebon berdasarkan tingkat pendidikan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Usia Kerja Di Kota Cirebon Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total	%
Tidak tamat SD	10.434	14.853	25.287	10,91
SD/ sederajat	18.844	23.490	42.334	18,26
SMP/ sederajat	23.018	20.762	43.780	18,89
SMA/ sederajat	47.550	43.628	91.178	39,34
Perguruan Tinggi	15.129	14.069	29.198	12,60
Jumlah	114.975	116.802	231.777	100,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi, PDRB per Kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas.

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. LPE Kota Cirebon pada Tahun 2016 sebesar 5,95 persen sedangkan pada Tahun 2015 sebesar 5,81 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon mengalami peningkatan.

Inflasi merupakan indikator penting pertumbuhan ekonomi yang berisi dinamika perkembangan harga barang dan jasa. Pada bulan Desember 2015, Kota Cirebon terjadi inflasi sebesar 0,27 persen atau terjadi kenaikan IHK menjadi 118,94 dari 118,62 pada bulan Nopember 2015. Berdasarkan inflasi *year on year (yoy)* kenaikan harga secara umum dari barang/jasa dibandingkan Tahun sebelumnya terjadi kenaikan tertinggi pada bulan Desember 2015. Angka inflasi *yoy* Artinya terjadi kenaikan harga 1,56 persen pada bulan Desember 2015 jika dibanding dengan harga pada bulan Desember 2014.

2.1.2.1.2 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun tertentu terhadap Tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada Tahun tertentu terhadap Tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam memproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (*output*). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan.

PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. PDRB menurut lapangan usaha adalah perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi dimana setiap sektor/lapangan usaha dihitung nilai tambahnya selama kurun waktu satu Tahun. Jumlah nilai tambahan seluruh sektor merupakan nilai PDRB daerah tersebut pada Tahun yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas 17 sektor ekonomi.

Kondisi ekonomi daerah yang diukur berdasarkan nilai PDRB menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 PDRB kota Cirebon yang dihitung berdasarkan Atas dasar Harga Berlaku mencapai 16,702 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 11,07 persen dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang sebesar 15,04 trilyun rupiah. Berikut nilai sektor lapangan usaha pada PDRB Kota Cirebon Tahun 2013-2015.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2016 (Juta Rp)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53.250,1	57.419,4	62.778,1
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,00	0,0
3	Industri Pengolahan	1.607.993,1	1.762.892,0	1.901.131,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	154.548,2	159.840,0	163.542,7
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	37.731,4	41.407,0	47.455,0
6	Konstruksi	1.588.957,2	1.764.717,4	1.881.969,7
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	4.907.718,4	5.325.091,9	5.742.655,8
8	Transportasi dan Pergudangan	1.680.533,6	1.969.733,9	2.122.771,1
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	769.183,0	858.892,2	948.709,2
10	Informasi dan komunikasi	666.553,1	750.511,8	853.508,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.598.702,7	1.763.073,4	1.936.123,3
12	Real Estate	137.165,0	149.045,4	159.994,9
13	Jasa Perusahaan	128.653,0	142.574,7	153.955,0
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	617.009,0	670.852,6	728.537,1
15	Jasa pendidikan	496.433,6	576.333,4	634.340,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296.640,1	353.891,6	397.156,4
17	Jasa Lainnya	314.548,4	355.888,6	403.812,0

Total PDRB	15.055.620,0	16.702.165,7	18.138.440,0
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2011-2015, BPS.

*) Angka sementara; **) Angka Sangat Sementara.

Sedangkan nilai PDRB secara riil yang dilihat dari PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan pada Tahun 2016 mencapai 14.059 trilyun rupiah mengalami peningkatan sebesar 5,95 persen bila dibandingkan dengan nilai PDRB pada Tahun 2015 yang sebesar 13,268 trilyun rupiah. PDRB Kota Cirebon atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2016 (Juta Rp)

	Lapangan Usaha	2014	2015*	2016**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.878,7	42.132,9	43.817,6
2	Pertambangan dan Penggalan	0,0	0,0	0,0
3	Industri Pengolahan	1.326.872,8	1.381.191,2	1.441.860,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	139.796,9	128.303, 2	128.434,9
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	34.866,0	36.246,8	38.189,3
6	Konstruksi	1.315.045,0	1.385.934,8	1.448.557,2
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	4.145.948,2	4.345.967,4	4.590.626,3
8	Transportasi dan Pergudangan	1.301.798,7	1.374.938,0	1.435.694,8
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	605.760,5	647.941,7	699.309,3
10	Informasi dan komunikasi	657.988,8	762.120,1	865.765,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.327.021,1	1.397.706,6	1.481.143,9
12	Real Estate	118.370,6	124.545,4	131.975,1
13	Jasa Perusahaan	105.629,3	112.689,1	120.427,4
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	480.416,2	493.759,0	516.120,6
15	Jasa pendidikan	407.652,1	445.971,1	479.679,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	261.906,8	292.709,1	315.916,0
17	Jasa Lainnya	270.060,0	296.099,2	321.768,6
	Total PDRB	12.541.011,8	13.268.255,7	14.059.286,4

Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2011-2015, BPS.

*) Angka sementara; **) Angka Sangat Sementara.

Berdasarkan nilai PDRB Kota Cirebon atas dasar harga konstan, sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur PDRB Kota Cirebon yaitu sebesar 31,66 persen, berikutnya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,70 persen, sedangkan PDRB atas harga konstan Tahun 2010, sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 32,65 persen selanjutnya sector jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,53 persen terhadap perekonomian di Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier telah menjadi penopang utama perekonomian Kota Cirebon.

Kontribusi kelompok tersier atas harga belaku pada Tahun 2016 sebesar 77,64 persen, kelompok sekunder sebesar 22,02 persen dan kontribusi kelompok primer sebesar 0,35 persen. Peranan kelompok tersier meningkat dari 77,11 persen di Tahun 2014 menjadi 77,64 persen di Tahun 2016. Di Kota Cirebon sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada Tahun 2016 distribusi sektor pertanian atas dasar harga berlaku sebesar 0,35 persen mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya yang sebesar 0,34 persen.

Tabel 2.11

Perkembangan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB Kota Cirebon Atas Dasar Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010-2014 (Juta Rp)

No.	Lapangan Usaha	T a h u n									
		2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,33	0,34	0,32	0,35	0,31
2.	Pertambangan dan penggalian	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3.	Industri pengolahan	10,40	10,53	10,30	10,51	10,69	10,58	10,55	10,41	10,48	10,26
4.	Pengadaan listrik dan gas	1,10	1,17	1,13	1,22	1,03	1,12	0,97	0,97	0,90	0,91
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,27	0,29	0,27	0,28	0,25	0,28	0,25	0,27	0,26	0,27
6.	Konstruksi	10,62	10,54	10,42	10,64	10,57	10,49	10,56	10,44	10,38	10,30
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	33,97	33,73	33,87	33,32	32,64	33,06	31,87	32,75	31,66	32,65
8.	Transportasi dan pergudangan	10,65	10,77	10,92	10,53	11,18	10,38	11,81	10,36	11,70	10,21
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,87	4,76	5,01	4,81	5,11	4,83	5,14	4,88	5,23	4,97
10.	Informasi dan komunikasi	4,57	4,91	4,21	4,76	4,31	5,25	4,49	5,74	4,71	6,16
11.	Jasa keuangan dan asuransi	10,33	10,26	10,96	10,99	10,63	10,58	10,56	10,54	10,67	10,53



12.	Real estate	0,94	0,96	0,93	0,96	0,91	0,94	0,89	0,94	0,88	0,94
13.	Jasa perusahaan	0,84	0,84	0,84	0,84	0,86	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,28	4,00	3,95	3,76	4,10	3,83	4,01	3,72	4,02	3,67
15.	Jasa pendidikan	2,95	2,97	3,03	3,07	3,30	3,25	3,45	3,36	3,50	3,41
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,78	1,84	1,76	1,87	1,97	2,09	2,12	2,21	2,19	2,25
17.	Jasa lainnya	2,05	2,08	2,04	2,09	2,09	2,15	2,13	2,23	2,23	2,29
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Pertumbuhan dan Potensi Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2017.

Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon Tahun 2013-2015 :

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2016 (Persen)

Lapangan Usaha		2014	2015*	2016**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,13	0,61	4,00
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	6,37	4,09	4,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(3,37)	(8,22)	(0,26)
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,85	3,96	5,36
6	Konstruksi	4,20	5,39	4,52
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	4,89	4,82	5,63
8	Transportasi dan Pergudangan	4,24	5,62	4,42
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	6,19	6,96	7,93
10	Informasi dan komunikasi	16,55	15,83	13,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	5,33	5,93
12	Real Estate	4,18	5,22	5,22
13	Jasa Perusahaan	5,82	5,68	6,87
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	7,65	2,78	4,53
15	Jasa pendidikan	11,89	9,40	7,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,86	11,76	7,93
17	Jasa Lainnya	9,15	9,64	8,67
PDRB		5,71	5,80	5,95

Sumber : PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2010-2015, BPS.*) Angka sementara; **) Angka Sangat Sementara.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon pada Tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen, Tahun 2015 mencapai 5,80 persen dan Tahun 2014 sebesar 5,71 persen. Pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2016 dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi yang pertumbuhannya mencapai 13,60 persen, kemudian diikuti oleh jasa lainnya sebesar 8,67 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial masing-masing 7,93 persen. Pada Tahun 2014, 2015 dan 2016 terdapat pertumbuhan ekonomi yang negatif pada sektor pengadaan listrik dan gas masing-masing sebesar (3,37 persen), (8,22 persen) dan (0,26 persen).

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Salah satu indikator perkembangan perekonomian Kota Cirebon dapat dilihat dari perkembangan inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat Kota Cirebon.

Perkembangan inflasi kota Cirebon Tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. pada Tahun 2013 dan 2014 inflasi di Kota Cirebon berada pada titik tinggi dengan nilai inflasi pada kisaran 7,08 persen dan 7,86 persen. Sementara pada Tahun 2015 inflasi di Kota Cirebon mengalami penurunan menjadi 1,56 persen, sedangkan pada Tahun 2016 mengalami kenaikan kembali tetapi relatif kecil yaitu sebesar 0,31 persen. Namun demikian angka ini masih berada di bawah nilai inflasi Jawa Barat dan Nasional.

Tingginya inflasi Kota Cirebon Tahun 2013 dan 2014 terutama disebabkan oleh pengaruh kenaikan harga BBM Bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestik sampai dengan akhir Tahun 2014. Kenaikan harga BBM Bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga, baik berdampak langsung maupun tidak langsung. Selain BBM, penyesuaian harga barang lainnya juga terjadi pada Tarif Dasar Listrik (TDL) dan LPG. Pada Tahun 2016 terjadi kenaikan namun relative rendah kenaikan ini dipicu dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik.

Tabel 2.13
Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Periode 2013-2016

Tingkat Inflasi (%)		2013	2014	2015	2016
1	Kota Cirebon	7,86	7,08	1,56	1,87
2	Provinsi Jawa Barat	9,15	7,41	2,73	2,75
3	Nasional	8,38	8,36	3,36	3,02

Sumber : Profil Kota Cirebon 2016, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat dan Bank Indonesia.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Nilai Pendapatan per kapita diperoleh dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun. Selengkapnya, pendapatan per kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
PDRB Per Kapita Kota Cirebon dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2014-2016

Uraian		2014	2015*	2016*
1	PDRB per Kapita (Juta Rp)	49,37	54,32	58,42
2	Pertumbuhan PDRB per Kapita	9,44	10,06	7,05

Sumber : PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, BPS

*) Angka sementara; **) Angka Sangat Sementara.

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa PDRB per Kapita Kota Cirebon terus mengalami kenaikan selama kurun waktu Tahun 2014-2016. Pada Tahun 2014 mencapai 49,37 juta rupiah dan angka ini terus meningkat menjadi 54,32 juta rupiah Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 tumbuh menjadi 58,42 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita di atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Cirebon. Hal tersebut disebabkan pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Pembangunan daerah ditujukan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bila peningkat tidak diiringi dengan pemerataan, maka akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah *Gini Ratio*, *Indeks Williamson* dan Kriteria Bank Dunia.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan variabel distribusi tertentu dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk. Indikator-Indikator Makro Ekonomi. LPEM-FEUI. 1995) :

- $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.
-

Tabel 2.15
Gini Rasio Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat
Periode 2013-2016

Tingkat Inflasi		2013	2014	2015	2016
1	Kota Cirebon	0,38	0,40	0,41	0,39
2	Provinsi Jawa Barat	0,41	0,41	0,41	0,41

Sumber : Bappeda propinsi Jawa Barat 2016, Jawa Barat Dalam Angka 2016

Gini rasio Kota Cirebon Tahun 2013-2016 terlihat mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013-2015 gini rasio Kota Cirebon mengalami peningkatan dari 0,38 menjadi 0,41 dan pada Tahun 2016 kembali turun menjadi 0,39. Dari angka gini rasio tersebut dapat digambarkan bahwa Kota Cirebon pada Tahun 2016 termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan kategori sedang ($0,4 < \text{Gini Ratio} < 0,5$) pada Tahun 2016 lebih rendah dari gini ratio Jawa Barat.

2.1.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan indeks untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Williamson mengemukakan model VW (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan VUW (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktu tertentu. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < \text{VW} < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil tingkat ketimpangan wilayah dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan wilayah.

Nilai indeks Williamson Kota Cirebon Tahun 2016 belum dilakukan perhitungan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah di Kota Cirebon belum dapat diketahui.

2.1.2.1.7 Proporsi Penduduk Miskin.

Konsep kemiskinan yang selama ini dipakai untuk memenuhi kepentingan data nasional maupun daerah, mengacu kepada konsep yang ditetapkan oleh BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan nasional adalah menghitung GK, yang terdiri dari dua komponen yaitu GKM dan GKNM. Data yang digunakan adalah data Susenas Panel Modul Konsumsi dan KOR. Pengukuran kemiskinan dengan metode GK, berbeda dengan ukuran kemiskinan hasil Pendataan Sosial Ekonomi

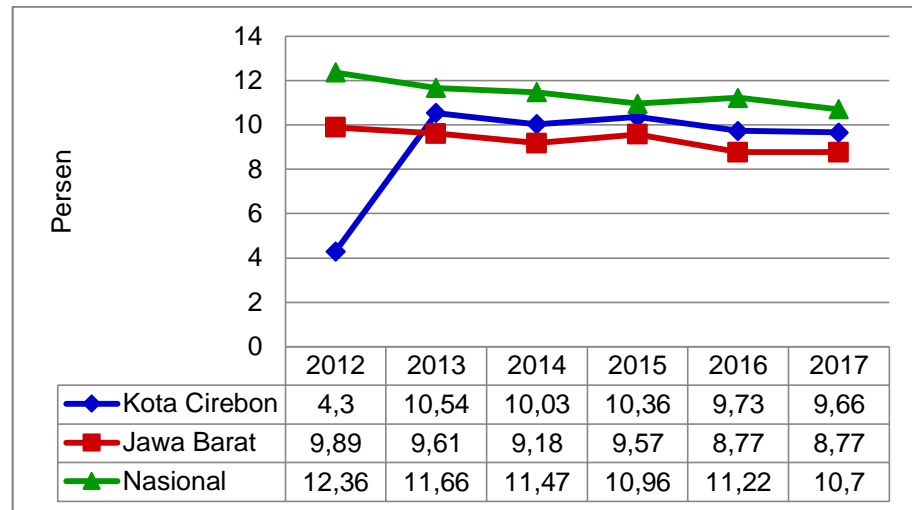
2005 (PSE05) dan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08) maupun Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS2011), di mana PSE05, PPLS08, dan PPLS2011 tidak menghitung kemiskinan secara langsung tetapi untuk mendapatkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan dijadikan sebagai Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Proporsi penduduk miskin Kota Cirebon pada Tahun 2014 mencapai 10,03 persen. Artinya terdapat sekitar 10,03 persen penduduk Kota Cirebon yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dari segi ekonomi. Kondisi ini mengalami kenaikan pada Tahun 2015 hingga sebesar 0,33 persen, atau proporsi penduduk miskin Kota Cirebon pada Tahun 2015 mencapai 10,36 persen. Pada Tahun 2011 berdasarkan hasil PPLS2011 dan proyeksi hasil SP2010 persentase kemiskinan di Kota Cirebon sebesar 11,56 persen. Sedangkan pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, dengan berdasarkan perhitungan hasil Susenas proporsi penduduk miskin di Kota Cirebon adalah sebesar 11,10 persen dan 10,54 persen; 10,03 persen dan 10,64 persen. Secara teoritis, angka ini tidak bisa dibandingkan dengan angka Tahun-Tahun sebelumnya karena berbedanya pendekatan indikator kemiskinan yang digunakan serta metodologi pendataan yang berbeda pula.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk Miskin di Kota Cirebon
Tahun 2012 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Penduduk Miskin	31,9	30,6	31,74	30,15	30,19
2.	Persentase Penduduk Miskin	10,54	10,03	10,36	9,73	9,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat.

Gambar : 2.14
Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012 – 2017



Grafik di atas memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin Kota Cirebon dalam lima Tahun terakhir berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2013 persentase penduduk miskin Kota Cirebon sebesar 10,54 persen, turun pada Tahun 2014 menjadi 10,03 persen. Namun pada Tahun 2015 kembali naik menjadi 10,36 persen, Tahun 2016 turun menjadi 9,73 persen, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 9,66 persen.

2.1.2.1.7.1 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan.

Dalam periode 2013-2017, garis kemiskinan Kota Cirebon menunjukkan peningkatan. Tahun 2013 sebesar Rp. 334.439; Tahun 2014 Rp. 349.599; Tahun

2015 Rp. 358.654; Tahun 2016 Rp. 373.866, dan Tahun 2017 sebesar Rp. 392.725 di atas rata-rata Jawa Barat sebesar Rp. 344.427.

Tabel 2.17
Garis Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Uraian	T a h u n				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Garis Kemiskinan Kota Cirebon	334.439	349.599	358.654	373.866	392.725
Garis Kemiskinan Jawa Barat	276.825	291.474	306.876	324.992	344.427

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2013-2017 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai Tahun 2013 sebesar 1,32; kemudian Tahun 2014-2015 meningkat menjadi 1,52 dan 1,63; Tahun 2016 kembali turun menjadi 1,49; dan Maret Tahun 2017 turun lagi menjadi 1,45. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, P1 di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan masih banyak penduduk miskin di pedesaan yang rata-rata pengeluarannya lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di perkotaan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih diprioritaskan di daerah pedesaan untuk membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam”.

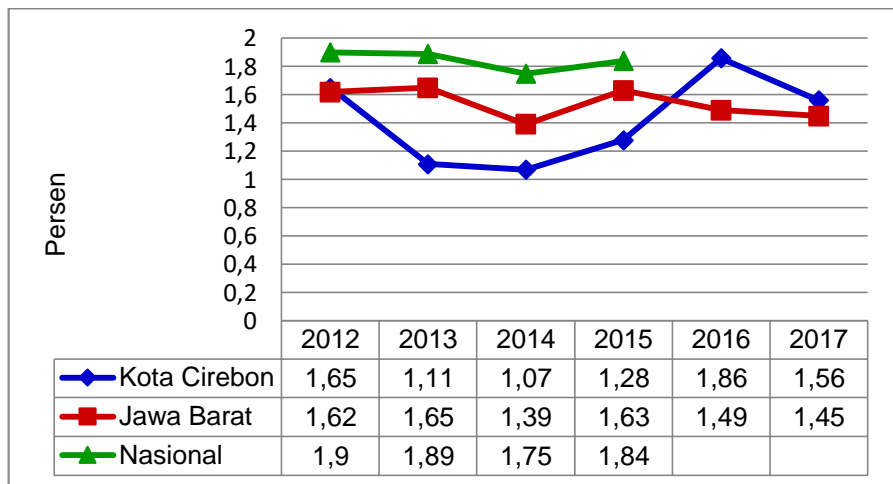
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cirebon dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013-2014 menunjukkan penurunan dari 1,65 Tahun 2013 turun menjadi 1,1 pada Tahun 2014, namun pada Tahun 2015 nilai P1 naik menjadi 1,28 dan pada Tahun 2016 naik menjadi 1,86 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 1,56. P1 Kota Cirebon Tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan P1 Jawa Barat sebesar 1,45.

Tabel 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017

Uraian	T a h u n				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Cirebon	1,11	1,07	1,28	1,86	1,56
Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat	1,65	1,39	1,63	1,49	1,45

Sumber : Tabel Dinamis Indeks Kedalaman Kemiskinan, BPS

Gambar : 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2012 – 2017



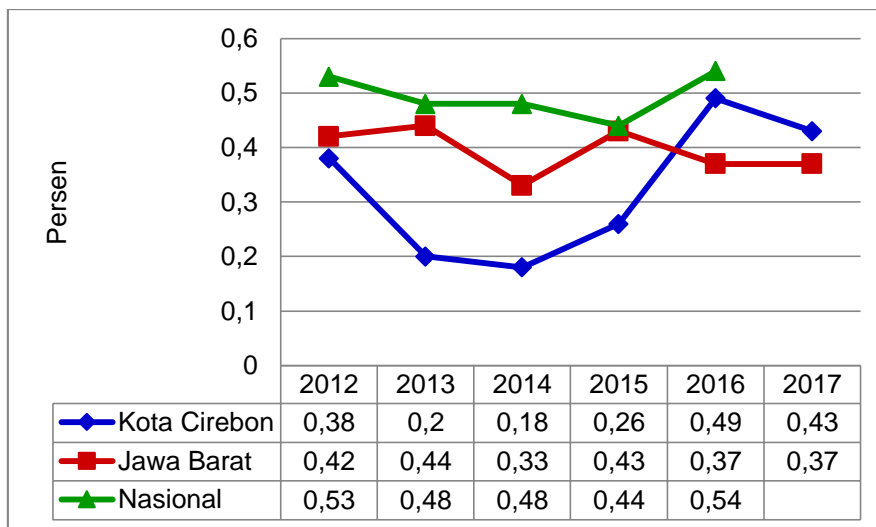
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon Tahun 2013-2016 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,20 pada Tahun 2013 naik menjadi 0,49 pada Tahun 2016, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,43 Peningkatan P2 dalam empat Tahun terakhir mencerminkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Cirebon cenderung melebar.

Tabel 2.19
Indeks Keparahane Kemiskinan (P2) Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017

Uraian	T a h u n				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Indeks Keparahane Kemiskinan Kota Cirebon	0,20	0,18	0,26	0,49	0,43
Indeks Keparahane Kemiskinan Jawa Barat	0,44	0,33	0,43	0,37	0,37

Sumber : Tabel Dinamis Indeks Kedalaman Kemiskinan, BPS

Gambar 2.16
Indeks Keparahane Kemiskinan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2012 – 2017



2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek kemiskinan dan aspek kesempatan kerja.

2.1.2.2.1 Aspek Pendidikan

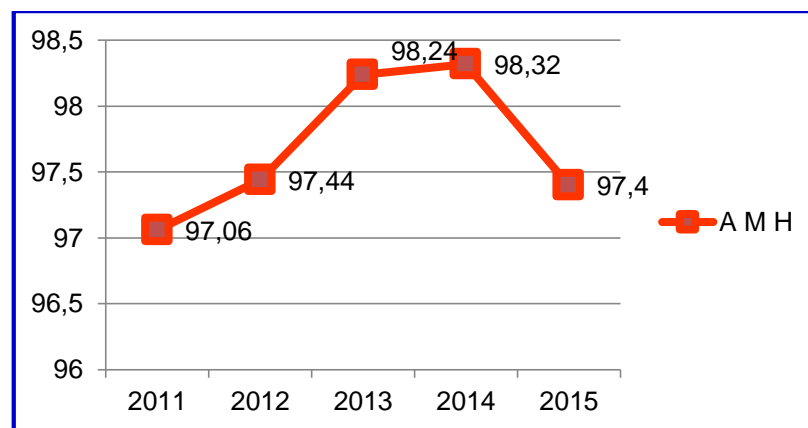
Analisis kinerja terhadap aspek pendidikan dapat dilihat dari kinerja indikator angka melek huruf, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka pendidikan yang ditamatkan.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. UNDP mengeluarkan standar untuk indikator ini minimal 0 persen dan maksimal 100 persen. Pada periode Tahun 2011-2015 capaian angka melek huruf Kota Cirebon

trend yang positif. Angka melek huruf di Kota Cirebon pada Tahun 2013 sebesar 98,24 persen meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2011 yang sebesar 97,06 persen. Pada Tahun 2014 angka melek huruf sebesar 98,32 persen, dan Tahun 2015 sebesar 97,04 persen atau mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar 0,92 persen. Pada Tahun 2016 indikator Angka Melek Huruf tidak lagi disajikan sebagai salah satu indikator untuk menghitung IPM. Indikator Angka Melek Huruf diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah sebagaimana Metode baru perhitungan IPM yang dikeluarkan oleh UNDP.

Gambar 2.17
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2011 – 2015



2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. Tujuan dari harapan lama sekolah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah di Kota Cirebon pada Tahun 2017 mencapai 13,15 Tahun meningkat 0,57 poin dari Tahun 2013 yang mencapai 12,58 Tahun. Ini berarti Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Cirebon masih sampai ke jenjang perguruan tinggi Tahun pertama. Dalam perhitungan indeks HLS kota Cirebon mencapai angka 73,06 persen. Indikator ini sudah cukup tinggi dan Tahun 2015 merupakan Tahun awal perhitungan indeks HLS.

Tabel 2.20
Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017

Uraian	T a h u n				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
HLS Kota Cirebon	12,58	12,93	12,94	13,07	13,15
HLS Jawa Barat	11,81	12,08	12,15	12,30	na

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon, 2017

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyelesaikan pendidikan yang timatkan sampai jenjang pendidikan tertentu. Rata-rata lama sekolah di Kota Cirebon pada Tahun 2017 sebesar 9,96 Tahun yang berarti pada Tahun 2017 penduduk kota Cirebon mampu menamatkan pendidikannya mendekati 10 Tahun atau sampai jenjang pendidikan SLTA kelas 1. Bila dilihat perkembangan dari Tahun 2013-2017 indikator Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cirebon menunjukkan tren yang meningkat.

Tabel 2.21
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017

Uraian	T a h u n				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
RLS Kota Cirebon	9,33	9,53	9,76	9,87	9,96
RLS Jawa Barat	7,58	7,71	7,86	7,95	na

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Cirebon pada Tahun 2016 untuk tingkat SD/MI sebesar 110,54 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 119,15 persen dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 120,88 persen.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar Kota Cirebon Tahun 2014 – 2016

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	2	4	5	6
1.	SD/MI	94,97	106,04	110,54
2.	SMP/MTs	94,95	115,28	119,15
3.	SMA/SMK/ MA	103,65	111,08	120,88

Sumber : Profil Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2016.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM Kota Cirebon pada Tahun 2016 untuk jenjang SD/MI sebesar 97,12 persen mengalami peningkatan dari Tahun 2012 sebesar 89,89 persen, sehingga terjadi peningkatan

7,23 persen. Pada Tahun 2016 capaian APM SMP/MTs sebesar 83,67 persen meningkat sebesar 15,66 persen dari capaian Tahun 2012 sebesar 68,02 persen.

Sedangkan capaian untuk APM tingkat SMA/SMK/MA sebesar 62,27 persen mengalami peningkatan dari capaian Tahun 2012 sebesar 58,34 persen. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan program dan kegiatan yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang SMA.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kota Cirebon Tahun 2012 – 2016

No.	Angka Partisipasi Murni (APM)	T a h u n				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	SD/MI	89,89	94,30	94,11	96,70	97,12
2.	SMP/MTs	68,01	78,17	79,13	82,42	83,67
3.	SMA/SMK/MA	58,34	54,34	64,02	60,72	62,27

Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon, BPS.

6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Secara umum tingkat kelulusan sebagian besar penduduk kota Cirebon pada Tahun 2015 adalah lulus SMA/SMK/MA yakni sebesar 29,78 persen, berikutnya lulus SD/Mi sebanyak 16,94 persen. Dan sekitar 10,65 persen penduduk lulusan perguruan tinggi.

Tabel 2.24
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Cirebon
Tahun 2010-2015

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) %	2010	2011	2013	2014	2015
SD/MI	-	-	-	-	16,94
SMP/MTs	-	-	-	-	13,37
SMA/SMK/MA	-	-	-	-	29,78
Perguruan Tinggi	-	-	-	-	10,65

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon 2015, Disdukcapil.

2.1.2.2.2. Aspek Kesehatan

Kinerja atas aspek kesehatan dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi, kematian anak balita, angka usia harapan hidup, dan kasus gizi buruk.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan angka yang menunjukkan kematian bayi umur 1 (satu) Tahun per 1000 kelahiran bayi yang berhasil hidup. Berikut digambarkan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon periode 2013-2016.

Tabel 2.25
Angka Kematian Bayi Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kematian bayi	39	38	25	19	17
Jumlah lahir hidup	5.416	5.483	5.378	5.536	5.395
Rasio Angka Kematian Bayi	7,2%	6,93%	4,65%	3,43%	3,20%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2016.

Kematian bayi di Kota Cirebon pada Tahun 2017 sebanyak 17 orang mengalami penurunan sebanyak 2 bayi dari Tahun 2016 yang mencapai 19,53 persen dengan penyebab kematian bayi dikarenakan asfiksia, infeksi dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Adapun jumlah bayi yang lahir hidup pada Tahun 2017 sebanyak 5.395 jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 2,61 persen atau sebanyak 141 bayi dari Tahun 2016.

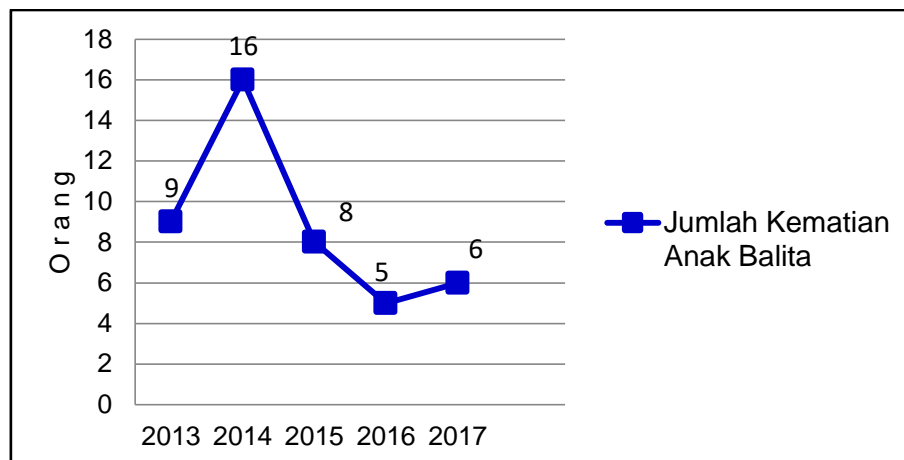
Penurunan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon dalam lima Tahun terakhir menunjukkan intervensi program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan berhasil dengan baik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu program unggulan dalam upaya menurunkan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon adalah *Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM)* sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas serta mendekatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, dalam upaya akselerasi penurunan angka kematian bayi di Kota Cirebon telah dilakukan penguatan Kampung Siaga sebagai penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Kematian Anak Balita.

Kematian anak balita di Kota Cirebon Tahun 2017 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya, yaitu dari 5 orang pada tahun 2016 menjadi 6 orang pada Tahun 2017. Kematian tertinggi anak balita terjadi pada Tahun 2014 sebanyak 16 orang dan terendah pada Tahun 2016 sebanyak 5 orang.

Kematian anak balita di Kota Cirebon dalam periode 2013-2017 mengalami fluktuatif sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.18
Jumlah Kematian Anak Balita di Kota Cirebon
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2018

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 Tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Angka harapan hidup pada Tahun 2013 di Kota Cirebon cenderung meningkat sejak Tahun 2013 sebesar 71,75 Tahun, Tahun 2014 sebesar 71,77 Tahun, Tahun 2015 sebesar 71,81 Tahun, Tahun 2016 sebesar 71,80 Tahun dan Tahun 2017 sebesar 71,89 Tahun.

Tabel 2.26
Angka Harapan Hidup Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	71,75	71,77	71,79	71,80	71,89

Sumber: IPM Kota Cirebon 2017, BPS.

4. Kasus Balita Gizi Buruk

Balita merupakan masa *golden age* yang kondisi kesehatannya perlu diperhatikan dengan baik, melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang dalam membantu proses tumbuh kembangnya. Data Dinas Kesehatan Kota Cirebon menunjukkan bahwa jumlah balita di Kota Cirebon pada Tahun 2017 sebanyak 22.479 orang. Balita dengan jumlah tersebut tersebar di 5 (lima) kecamatan dan pada Tahun 2017 ditemukan sekitar 40 balita yang memiliki gizi buruk dan merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima Tahun terakhir.

Pada Tahun 2013 terdapat 235 balita gizi buruk dari jumlah balita sebanyak 21.580 orang. Kondisi ini terus menurun dan pada Tahun 2014 terdapat 48 balita gizi buruk dari 21.796 balita yang ada, Tahun 2015 terdapat 45 balita gizi buruk dari 26.939 balita, Tahun 2016 menurun lagi menjadi 43 balita gizi buruk dari 23.699 balita dan pada Tahun 2017 kembali turun menjadi 40 balita gizi buruk dari 22.479 balita.

Tabel 2.27
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017

Kecamat an	2013		2014		2015		2016		2017	
	Balit a	Gizi Buru k	Balita	Gizi Buru k	Balita	Gizi Buru k	Balita	Gizi Buru k	Balita	Gizi Buru k
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Harjamu kti	7.971	102	8.231	15	10.12 4	14	10.24 9	14	8.737	10
Lemahwk k	4.151	42	4.086	4	5.114	8	4.958	5	4.464	8
Pekalipan	1.785	22	1.833	6	2.352	3	2.309	4	1.818	3
Kesambi	4.549	42	4.562	11	5.612	10	5.488	11	4.449	10
Kejaksan	3.124	27	3.084	12	3.735	10	3.700	9	3.011	9
Jumlah	21.58 0	235	21.79 6	48	26.93 9	45	23.69 9	43	22.47 9	40

Sumber : Profil Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2013 s/d 2017.

2.1.2.2.3. Aspek Kesempatan Kerja

Kinerja atas aspek kesempatan kerja dapat dilakukan melalui pengukuran indikator rasio penduduk yang bekerja. Salah satu prioritas dalam pembangunan adalah menciptakan lapangan usaha atau dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia kerja yang sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan membuat perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka menurut indikator makro 2012-2016 menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 sebesar 11,63 persen yang berarti dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja secara rata-rata 11,63 persen diantaranya adalah pencari kerja.

Tabel 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cirebon Tahun 2013-2017

U r a i a n	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	*2017
1	2	3	4	5	6
Tingkat Penganggran Terbuka (Persen)	9,02	11,02	11,28	na	11,63

Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2012-2016

*Perencanaan Tenaga Kerja Daerah, BPS-Disaker

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap Tahunnya terjadi fluktuatif. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cirebon sebesar 11,63 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa 88,37 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (sedang bekerja) sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.29
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Cirebon
Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	T a h u n				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
A.	Angkatan kerja					
1.	Bekerja	116.150	129.208	130.392	126.821	na
2.	Mencari pekerjaan	16.914	12.811	16.221	16.125	na
	Jumlah	133.064	142.019	147.148	142.946	na
B.	Bukan Angkatan Kerja					
1.	Sekolah	25.515	24.436	22.263	23.598	na
2.	Mengurus Rumah Tangga	50.684	44.492	47.457	49.894	na
3.	Lainnya	12.098	12.564	9.724	13.400	na
	Jumlah	88.892	81.492	79.444	86.892	na
	Total A + B	221.361	223.511	226.592	229.838	na
	Rasio Penduduk yang Bekerja	87,29	90,98	88,61	88,72	na

Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2017.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga Kota Cirebon dapat dilihat dari dua aspek yaitu: aspek kebudayaan dan aspek olahraga.

2.1.2.3.1. Aspek Kebudayaan

Seiring dengan dinamika interaksi masyarakat dunia yang semakin meningkat dalam era globalisasi, maka aspek-aspek kebudayaan yang dimiliki daerah perlu dilestarikan agar tidak kehilangan karakter dan jati diri. Analisis aspek kebudayaan di Kota Cirebon dapat dilihat dari salah satu indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian.

Tabel 2.30
Jumlah Kesenian Di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah grup kesenian	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	18	37	31	20
Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1

Sumber : Disbudpora Kota Cirebon Tahun 2016

Jumlah kesenian tersebut meliputi jenis seni music, seni tari, seni drama, seni rupa, seni lukis, dengan jumlah kelompok/organisasi kesenian sejumlah 135 kelompok. Kesenian yang menjadi tradisi dan ciri khas di Kota Cirebon antara lain tari topeng, sintren, kesenian gembyung, lukisan kaca dan batik mega mendung.

2.1.2.3.2. Aspek Olahraga

Kedudukan olahraga sangat berperan penting dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Olahraga merupakan kegiatan di bidang kesehatan, rekreasi dan prestasi yang penuh interaksi antar individu. Olahraga dalam aktivitasnya mempengaruhi dan membentuk karakter individu dan kelompok sehingga menciptakan suatu norma kebudayaan.

Tabel 2.31
Jumlah Organisasi dan Gedung Olah Raga di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah klub olah raga	4	5	4	23	23
Jumlah gedung olah raga	14	14	14	16	16

Sumber : Disporbudpar Kota Cirebon Tahun 2016

Berdasarkan data FORMI, jumlah kelompok olahraga yang berkembang di masyarakat ada 206 kelompok yang tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan, dengan jumlah anggota sebanyak 5.077 orang. Secara rinci kelompok olahraga yang berkembang di masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Jumlah Kelompok Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
Kota Cirebon, Tahun 2015 – 2016

Kecamatan/ Kelurahan	Tahun 2015		Tahun 2016	
	Kelompok	Anggota	Kelompok	Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kec Kejaksan	30	1.455	31	1.445
Kel Kejaksan	6	536	8	536
Kel Kesenden	7	210	7	220
Kel Sukapura	7	194	6	194
Kel Kebonbaru	10	515	10	495

Kec Kesambi	28	821	35	943
Kel Pekiringan	5	133	5	96
Kel Kesambi	7	182	8	193
Kel Sunyaragi	4	171	4	154
Kel Karyamulya	7	200	7	200
Kel Drajat	5	135	11	300
Kec Pekalipan	11	151	44	795
Kel Jagasatru	5	38	16	315
Kel Pulasaren	1	17	1	30
Kel Pekalipan	1	30	4	115
Kel Pekalangan	4	66	23	335
Kec Lemahwungkuk	32	859	34	924
Kel Kesepuhan	11	354	11	330
Kel Lemahwungkuk	1	20	3	80
Kel Pegambiran	14	255	14	271
Kel Panjunan	6	230	6	245
Kec Harjamukti	40	855	62	968
Kel Harjamukti	16	279	29	278
Kel Larangan	2	64	11	193
Kel Kecapi	11	220	11	220
Kel Argasunya	3	112	3	90
Kel Kalijaga	8	180	8	187
J u m l a h	141	4.141	206	5.077

Sumber : FORMI dan Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2017

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib non pelayanan dasar, fokus layanan urusan pilihan, dan fokus layanan urusan fungsi penunjang.

2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui pengukuran kinerja atas indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat yang terdiri dari 6 (enam) urusan, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai Angka Partisipasi Sekolah di Kota Cirebon menurut kelompok usia Tahun 2012-2016.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia
Di Kota Cirebon Tahun 2012 – 2016

No.	Kelompok Umur	T a h u n				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	7 – 12	98,30	99,72	98,76	99,10	na
2.	13 – 15	94,76	91,34	96,09	97,88	na
3.	16 – 18	61,71	61,02	75,71	69,81	na
4.	19 – 24	21,93	27,20	27,66	22,57	na

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2015 angka partisipasi sekolah di Kota Cirebon kelompok usia 7-12 Tahun sebesar 99,10 persen, kelompok usia 13-15 Tahun mencapai 97,88 persen, kelompok usia 16-18 Tahun sebesar 69,81 persen, dan untuk kelompok usia 19-24 Tahun baru mencapai 22,57 persen. Dari data tersebut menggambarkan bahwa untuk kelompok usia 16-18 Tahun (usia SLTA) dan usia 19-24 Tahun capaiannya relatif masih rendah, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius guna mencapai angka harapan lama sekoah yang direncanakan.

2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel berikut menggambarkan rasio ketersediaan gedung/ bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon.

Tabel 2.34
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dan Menengah
Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pendidikan Dasar					
1.	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	39.095	33.583	33.583	35.025	na
	Jumlah bangunan SD/ MI (unit)	183	182	183	183	183
	Rasio	213,6	184,52	183,51	191,39	na
2.	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	15.046	18.692	18.692	15.750	na
	Jumlah bangunan SMP/MI (unit)	53	53	54	54	54
	Rasio	283,89	352,68	346,15	291,67	na
B.	Pendidikan Menengah (SMA/ SMK/MA)					
1.	Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun	15.102	15.504	15.504	16.333	na
2.	Jumlah bangunan sekolah (unit)	58	60	59	58	60
3.	Rasio	260,38	258,4	262,78	281,60	na

Sumber : 1) Indikator Makro Kota Cirebon, BPS
2) Profil Kota Cirebon, BPS

3. Rasio guru/murid.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kota Cirebon per jenjang pendidikan selama kurun waktu Tahun 20013-2017.

Tabel 2.35
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pendidikan Dasar					
1.	Jumlah Guru SD/MI	2.159	2.124	2.104	2.087	2.148
	Jumlah murid SD/MI	42.452	42.001	41.670	41.165	41.262
	Rasio	19,66	19,77	19,81	19,72	19,21
2.	Jumlah Guru SMP/ MTs	1.354	1.340	1.314	1.392	1.386
	Jumlah murid SMP/ MTs	21.232	22.401	23.199	23.504	23.314
	Rasio	15,68	16,72	17,66	16,89	16,82
B.	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)					
3.	Jumlah Guru SMA/ SMK/MA	1.905	1.909	1.833	1.910	1.926
	Jumlah murid SMA/ SMK/MA	23.382	23.206	22.942	24.517	26.273
	Rasio	12,27	12,16	12,52	12,84	13,64

Sumber : Profil Kota Cirebon Tahun 2017, BPS – DKIS.

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio guru terhadap siswa yang mengajar di Sekolah Dasar dalam lima Tahun terakhir sebesar 19 yang artinya satu guru SD/MI rata-rata mengajar 19 - 20 orang siswa. Pada jenjang SMP/MTs, rata-rata 1 orang guru mengajar siswa SMP berkisar antara 16-17 orang, dan untuk guru SMA/SMK/MA rata-rata satu orang guru mengajar 13-14 orang siswa.

4. Jumlah Ruang Kelas Kondisi Baik, Rusak Berat, Rusak Sedang, dan Rusak Ringan Jenjang SD dan SMP.

Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses untuk memperoleh pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah, diperlukan ketersediaan dan kecukupan ruang kelas untuk proses pembelajaran. Pada Tahun 2017, untuk jenjang SD terdapat 1.206 ruang kelas yang terdiri dari ruang kelas kondisi baik sebanyak 252 ruang kelas, kondisi rusak ringan 541 ruang, rusak sedang 67 ruang, rusak berat 46 ruang dan rusak total sebanyak 50 ruang. Sementara untuk jenjang SMP, jumlah keseluruhan ruang kelas sebanyak 630 ruang kelas yang terdiri dari ruang kelas kondisi baik 129 ruang, rusak ringan 466 ruang, rusak sedang 20

ruang, rusak berat 10 ruang dan rusak total 5 ruang kelas. Secara rinci kondisi ruang kelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD dan SMP Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2017

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas					Jumlah
		Baik	R. Ringan	R Sedang	R Berat	R Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sekolah Dasar (SD)							
1	Lemahwungkuk	48	114	14	10	6	192
2	Pekalipan	53	160	7	3	0	223
3	Kesambi	48	205	28	26	31	338
4	Kejaksan	94	250	17	5	4	370
5	Harjamukti	9	62	1	2	9	83
Kota Cirebon		252	541	67	46	50	1.256
Sekolah Menengah Pertama (SMP)							
1.	Lemahwungkuk	18	159	12	7	0	196
2.	Pekalipan	0	3	0	0	3	6
3.	Kesambi	44	90	2	3	0	139
4.	Kejaksan	22	95	5	0	0	122
5.	Harjamukti	45	119	1	0	2	167
Kota Cirebon		129	466	20	10	5	630

Sumber : DAPODIK, Dinas Pendidikan Kota Cirebon, 2018.

5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Tabel 2.37
Kondisi PAUD/TK di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016
Sekolah	84	86	85	84
Rombel	287	316	341	288
Murid TK	3.955	4.077	4.166	4.223
Guru TK	440	454	428	432
Rasio Murid terhadap Guru	1:9	1:9	1:10	1:10

Sumber : Profil Kota Cirebon 2017, BPS Kota Cirebon.

6. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan bidang pendidikan di suatu daerah.

Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah siswa putus sekolah di Kota Cirebon mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013-2015 angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, yaitu dari 0,07 persen Tahun 2013 turun menjadi 0,04 persen pada Tahun 2014 dan turun lagi menjadi 0,02 persen di Tahun 2015, namun pada Tahun 2016 kembali naik menjadi 0,06 persen dan Tahun 2017 turun lagi menjadi 0,02 persen. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2013 sebesar 6,22 persen mengalami penurunan sampai Tahun 2017 hingga menjadi 0,02 persen. Begitu pula untuk jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/MA dalam periode Tahun 2013-2016 terus mengalami penurunan dari 39,16 persen Tahun 2013 turun menjadi 0,11 persen pada Tahun 2016.

Tabel 2.38
Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah
Di Kota Cirebon Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	SD/MI	0,07	0,04	0,02	0,06	0,02
2.	SMP/MTS	6,22	0,07	0,25	0,05	0,02
3.	SMA/SMK/MA	39,16	0,49	0,31	0,11	na

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita.

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu dapat dilakukan di Posyandu. Jumlah Posyandu di Kota Cirebon pada Tahun 2017 sebanyak 330 buah dengan sasaran Balita berjumlah 26.459 jiwa. Adapun perbandingan jumlah Posyandu terhadap Balita mencapai 1:80,18. Hal ini berarti bahwa setiap 1 (satu) Posyandu di Kota Cirebon rata-rata melayani 80 balita. Tabel

berikut menggambarkan rasio Posyandu terhadap balita di Kota Cirebon periode Tahun 2013-2017.

Tabel 2.39
Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Posyandu	329	330	330	330	330
Jumlah Balita	21.580	22.253	22.222	26.704	26.459
Rasio (%)	1,49%	1,48%	1,49%	1,24%	1,28%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2016.

Sementara itu apabila dilihat dari strata Posyandu, pada Tahun 2017 dari 330 Posyandu yang termasuk Posyandu Aktif sebanyak 267 unit atau 80,91 persen, dan terbagi kedalam Strata Posyandu Pratama sebanyak 12 buah, Madya 51 buah, Purnama 168 buah dan Posyandu Mandiri 99 buah.

Tabel 2.40
Jumlah Posyandu Menurut Strata di Kota Cirebon
Tahun 2014 – 2017

Strata Posyandu	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pratama	12	4	12	12
Madya	51	53	62	51
Purnama	168	143	147	168
Mandiri	99	130	109	99
Posyandu Aktif	267	273	256	267

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2018

Salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan mengembangkan Kelurahan Siaga Aktif yang merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong.

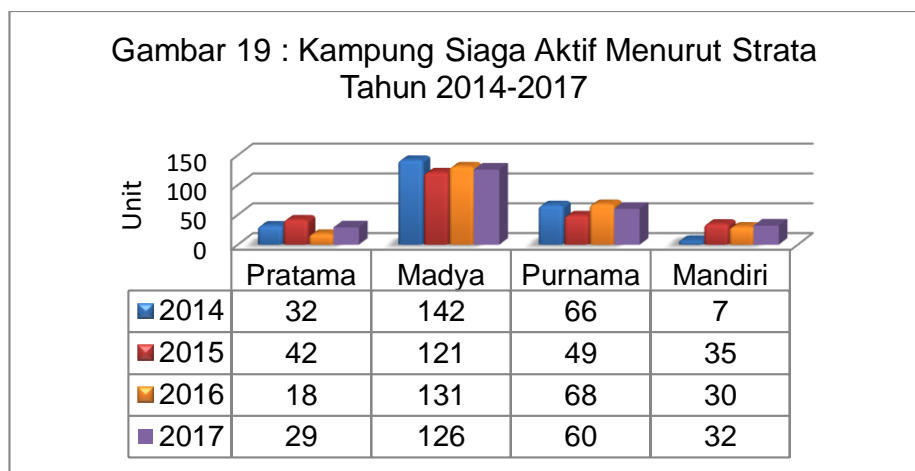
Kelurahan Siaga Aktif merupakan upaya strategis dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGS*). Selain mengembangkan Kelurahan Siaga Aktif, untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengembangkan Kampung Siaga Aktif di setiap Rukun Warga (RW) yaitu di 247 RW. Gambaran perkembangan Kampung/RW Siaga Aktif di Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Kampung/RW Siaga Menurut Strata
Di Kota Cirebon Tahun 2014-2017

Strata Kelurahan Siaga	T a h u n			
	2014	2015	2016	2017
Pratama	32	42	18	29
Madya	142	121	131	126
Purnama	66	49	68	60
Mandiri	7	35	30	32
Jumlah	247	247	247	247

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2018.

Kota Cirebon telah mengembangkan Kampung/RW Siaga sejak Tahun 2007 di 247 Kampung/RW se Kota Cirebon. Strata Kampung Siaga pada Tahun 2017 adalah strata Pratama sebanyak 29 RW, strata Madya 126 RW, strata Purnama 60 RW dan strata Mandiri 32 RW. Apabila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan strata yang dipengaruhi oleh berbagai indikator. Kondisi demikian perlu dievaluasi lebih lanjut, sehingga dapat dicarikan solusi dalam upaya mengembangkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan.



1. Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk.

Salah satu penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan dan puskesmas pembantu. Semakin banyak jumlah sarana dan prasarana kesehatan akan mempermudah dan mendekatkan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan. Berikut gambaran rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan

Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2016.

Tabel 2.42
Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu Kota Cirebon Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Puskesmas	22	22	22	22
2.	Jumlah Balai Pengobatan	13	15	15	15
3.	Jumlah Pustkesmas Pembantu (Pustu)	15	16	16	16
	Jumlah 1 s/d 3	50	53	53	53
4.	Jumlah penduduk	304.313	315.875	388.854	324.794
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,0072	0,0069	0,0056	0,0067
6.	Rasio Balai Pengobatan per satuan penduduk	0,0042	0,0047	0,0038	0,0046
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,0049	0,0050	0,0041	0,0049
8.	Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Pustu per satuan penduduk	0,0164	0,0167	0,0136	0,0163
9.	Jumlah kecamatan	5	5	5	5
10.	Jumlah kelurahan	22	22	22	22
11.	Rasio Puskesmas per kecamatan.	4,40	4,40	4,40	4,40

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016

2. Rasio Dokter per Satuan Penduduk.

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan terpadu, idealnya 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk.

Jumlah dokter di Kota Cirebon pada Tahun 2016 sebanyak 465 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 324.794 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 69,84. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kota Cirebon Tahun 2016 adalah 1 : 698,48 artinya rata-rata 1 orang dokter di Kota Cirebon memberikan layanan kesehatan kepada 698 sampai 699 orang. Tabel berikut menggambarkan rasio dokter per satuan penduduk Kota Cirebon Tahun 2013 – 2016.

Tabel 2.43
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah dokter	263	224	402	465
Jumlah penduduk	304.313	315.875	388.854	324.794
Rasio dokter per 1.000 penduduk	86,4	71,11	96,72	69,84
Rasio dokter terhadap penduduk	1.157,1	1.410,2	967,3	698,4

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016

3. Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Kineja pelayanan kesehatan suatu daerah dapat juga dilihat dari indikator status gizi balita daerah tersebut. Cakupan status gizi balita di Kota Cirebon pada Tahun 2016 berdasarkan indeks BB/U diketahui Status Gizi sangat kurang/buruk sebanyak 43 kasus atau 0,19 persen. Jumlah ini menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dimana status balita gizi buruk sebanyak 24 kasus atau 0,10 persen. Berikut digambarkan kondisi balita status gizi sangat kurang/gizi buruk berdasarkan indeks BB/Udi Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.44
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah Balita seluruhnya	21.580	22.253	22.222	22.438
Jumlah Balita gizi buruk	225	236	24	43
Persentase balita gizi buruk	1,02	1,06	0,10	0,19

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2016.

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah kematian ibu pada saat melahirkan di Kota Cirebon pada Tahun 2016 sebanyak 1 orang disebabkan oleh faktor penyebab langsung, yaitu *eklamsia*, jumlah ini menurun dari Tahun 2015.

Tabel 2.45
Persentase Kematian Ibu di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah kematian ibu	3	4	4	1

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung salah satunya adalah jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan yang baik salah satu pendukung percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang baik menjadi modal sosial masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak sedang, dan rusak berat. Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu 2013-2015.

Tabel 2.46
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kota Cirebon Tahun 2013-2015 (Km)

Uraian	2013	2014	2015
Kondisi Jalan Baik	136.675	141.410	78.507
Kondisi Jalan Sedang	17.106	15.876	36.173
Kondisi Jalan Rusak Ringan	3.822	3.987	41.072
Kondisi Jalan Rusak Berat	6.620	2.590	38.159
Total Panjang Jalan	163.863	163.863	193.911
Proporsi Jalan Baik	83,41%	86,30%	40,48%

Sumber :Profil Kota Cirebon 2016, BPS.

Pada Tahun 2014 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai 141.410 km atau sekitar 86,30 persen mengalami peningkatan bila dibandingkan kondisi jalan pada Tahun sebelumnya dengan proporsi jalan kondisi baik sebesar 83,41 persen sedamgkam pada Tahun 2015 mengalami penurunan dratis yang menunjukkan proporsi jalan baik hanya 40,48 persen.

2. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya tanaman dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Kebijakan penetapan RTH di Kota Cirebon sebagaimana yang tertuang pada dokumen RTRW adalah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30 persen dari luas wilayah kota.

Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam penataan ruang wilayah/kawasan, yaitu sebagai penyeimbang kawasan perkotaan. RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Tabel 2.47
Luas Tutupan Lahan RTH Kota Cirebon Tahun 2017

No.	Tipologi Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kota Cirebon (%)
1.	Taman RT	4,28	0,11
2.	Taman RW	8,72	0,23
3.	Taman Kelurahan	20,52	0,54
4.	Taman Kecamatan	6,24	0,16
5.	Taman Kota	11,79	0,31
6.	Taman Permakaman	71,25	1,87
7.	Jalur Hijau Jalan	3,43	0,09
8.	Sempadan Rel KA	48,15	1,26
9.	Sempadan Pantai	84,58	2,22
10.	Sempadan Sungai	134,50	3,53
11.	Hutan Kota	10,07	0,26
12.	Hutan Mangrove	2,11	0,06
13.	Lapangan Olahraga	18,65	0,49
Jumlah Total Tutupan Lahan		424,29	11,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2018.

Keberadaan RTH selain dipandang sebagai salah satu komponen pemanfaatan ruang, RTH juga harus terintegrasi dengan penataan ruang, sehingga perlu mengacu kepada azas-azas yang terkandung dalam Undang-undang Penataan Ruang dan Lingkungan. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2017 luas tutupan lahan RTH sebanyak 424,29 hektar atau 11,14 persen.

3. Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Berikut data bangunan ber-IMB di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2012-2014.

Tabel 2.48

Jumlah Surat IMB yang Dikeluarkan di Kota Cirebon

Tahun 2012-2014

Uraian	Tahun		
	2012	2013	2014
Tempat Tinggal	621	1.070	525
Bukan Tempat Tinggal	245	122	235
Jumlah	866	1.192	760

Sumber : Profil Kota Cirebon 2016, BPS.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1. Rumah tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa: fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Sebagai bagian dari lingkup sanitasi, fasilitas air bersih cukup dibutuhkan dalam rumah tinggal. Berikut data rumah tinggal berakses sanitasi dengan fokus rumah tangga pengguna air bersih pada Tahun 2016.

Tabel 2.49

Rumah tangga Pengguna Air Bersih di Kota Cirebon

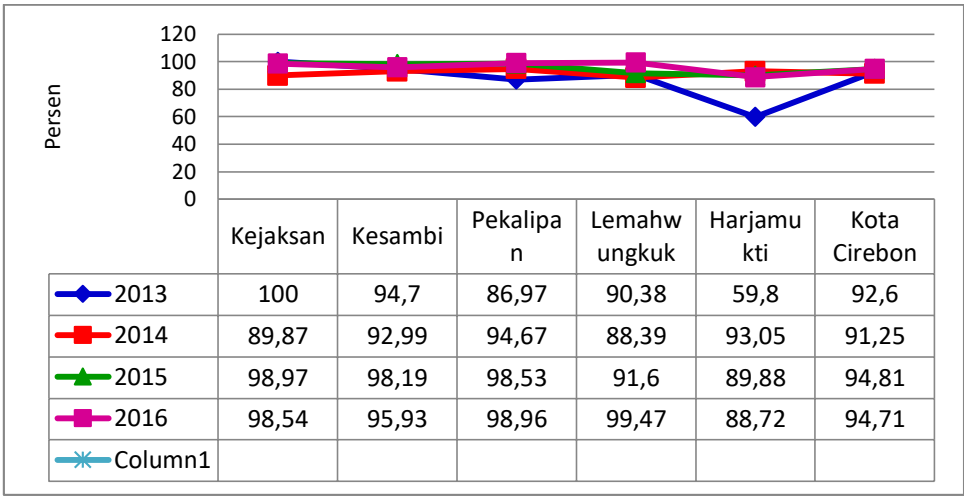
Tahun 2016

Uraian	Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna
Sumur Gali Terlindung	8.301	38.645
Sumur Gali Dengan Pompa	2.798	13.370
Sumur Bor Dengan Pompa	5.072	22.383
Mata Air Terlindung	5	440
Perpipaan (PDAM,BPSPAM)	50.164	240.861
KK yang memiliki akses air minum		294.075 (94,71%)

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Cirebon dari Tahun 2013 – 2016 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar : 2.20
Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Di Kota Cirebon Tahun 2013-2017



2.1.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

1. Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Terkait dengan hal tersebut, berikut gambaran mengenai indikator kinerja kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.50
Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon, 2018

2. Rasio Jumlah LINMAS Per Satuan Penduduk.

Jumlah Linmas di Kota Cirebon pada Tahun 2013 sebanyak 1.329 orang dengan jumlah penduduk 304.313, sehingga rasio jumlah Linmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 240,63 artinya bahwa setiap 1 orang anggota Linmas di Kota Cirebon memiliki tugas dan tanggungjawab memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 240 sampai 241 orang. Sementara pada Tahun 2016, rasio jumlah Linmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 233 orang.

Apabila dibandingkan dengan kelurahan yang ada, maka diketahui bahwa pada Tahun 2015 di Kota Cirebon rata-rata per kelurahan memiliki 1.330 anggota

satuan Linmas., sedangkan pada Tahun 2016 linmas di Kota Cirebon berjumlah 1.330 orang atau rata-rata setiap kelurahan memiliki linmas sebanyak 60 orang

Tabel 2.51
Jumlah Anggota Linmas di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Linmas	1329	1464	1.330	1.330
Jumlah penduduk	304.313	305.889	307.494	310.313
Jumlah Kelurahan	22	22	22	22
Rasio anggota Linmas terhadap jumlah penduduk	1 : 240,63	1 : 208,94	1 : 231,19	1 : 233,32
Rasio anggota Linmas per kelurahan	1 : 57,45	1: 66,54	1 : 60,45	1 : 60,45

Sumber: Satuan Pol-PP Kota Cirebon 2016

2.1.3.1.6 Sosial.

1. Sarana Sosial Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Salah satu bentuk kinerja urusan sosial adalah tersedianya sarana sosial panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Sarana Sosial di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah panti sosial skala kota dalam 1 Tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Unit)	26	26	27	27
Jumlah panti sosial skala kota dalam 1 Tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Unit)	21	21	21	21
Presentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80,77	80,77	77,78	77,78

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, 2018

2. PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Berikut data PMKS yang mendapatkan bantuan sosial di Kota Cirebon Tahun 2013-2016.

Tabel 2.53
PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	-	32.346	102.702	109.250
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	-	25.286	11.344	11.749
Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	-	78,17	11,05	10,80

Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2017, Kerjasama DKIS-BPS.

2.1.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Ketenagakerjaan.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja pada suatu periode. TPAK Kota Cirebon pada Tahun 2013 sebesar 63,54 persen dan pada Tahun 2017 turun menjadi 62,63 persen. Penurunan TPAK tersebut membawa pengaruh yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017

Uraian	T a h u n				
	2013	2014	2015	2016	*)2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	63,54	64,94	62,19	na	62,63

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon.
*) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon, 2017.

Menurut kelompok umur, TPAK usia 15-19 Tahun merupakan TPAK paling kecil yaitu sebesar 25,99 persen. Hal ini karena pada kelompok usia tersebut lebih banyak penduduk yang masih bersekolah. Kesadaran penduduk pada kelompok usia tersebut untuk bersekolah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk lebih mementingkan pendidikan merupakan hal yang sangat baik, karena akan lebih meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kota Cirebon, sehingga memiliki daya saing tinggi.

TPAK Kota Cirebon Tahun 2017 tertinggi terdapat pada kelompok usia 40-44 Tahun sebesar 76,38 persen, kemudian diikuti oleh kelompok usia 30-34 Tahun yaitu sebesar 75,51 persen dan kelompok usia 35-39 Tahun sebesar 74,85 persen.

Tabel 2.55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Usia
Di Kota Cirebon Tahun 2017 (Persen)

No.	Kelompok Umur	T P A K		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	15 – 19	28,90	23,07	25,99
2.	20 – 24	78,92	61,50	70,45
3.	25 – 29	93,75	52,51	73,66
4.	30 – 34	96,57	53,52	75,51
5.	35 – 39	96,51	52,74	74,85
6.	40 – 44	98,55	54,73	76,38
7.	45 – 49	97,29	50,94	73,28
8.	50 – 54	87,96	50,24	68,29
9.	55 – 59	78,04	43,50	60,69
10.	60 – 64	62,34	37,08	49,75
11.	65 +	38,08	17,84	26,39
Jumlah		79,36	46,15	62,63

Sumber : Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk Kota Cirebon yang menjadi pengangguran terbuka pada Tahun 2017 untuk laki-laki sebanyak 11.280 orang atau 12,36 persen dan perempuan sebanyak 5.604 orang atau 10,40 persen, sehingga jumlah pengangguran terbuka pada Tahun 2017 sebanyak 16.885 orang atau 11,63 persen.

Tabel 2.56
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	*)2017
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	9,02	11,02	11,28	na	11,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.

*) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah, Dinas Tenaga Kerja.

Pengangguran terbuka terbesar terdapat pada kelompok usia muda, yaitu 15-19 dan 20-24 Tahun. Hal ini dimungkinkan karena pada kelompok umur tersebut walaupun sudah masuk dalam angkatan kerja tetapi belum memiliki kemampuan/ketrampilan kerja.

Kelompok yang tidak memiliki ketrampilan tersebut cenderung tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada. Penduduk pada kelompok umur 15-24 Tahun juga merupakan penduduk usia sekolah yang seharusnya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai perguruan tinggi, sehingga belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Berdasarkan kelompok umur, kecenderungannya adalah semakin tinggi umur angkatan kerja, maka semakin rendah tingkat pengkat penganggurannya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur
Di Kota Cirebon Tahun 2017

No.	Kelompok Umur	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		L	P	L + P
1.	15 – 19	45,97	42,86	44,59
2.	20 – 24	27,75	23,75	26,05
3.	25 – 29	11,11	15,96	12,80
4.	30 – 34	7,62	5,26	6,80
5.	35 – 39	8,03	4,00	6,62
6.	40 – 44	6,86	3,00	5,46

7.	45 – 49	9,77	3,70	7,58
8.	50 – 54	6,17	2,88	4,91
9.	55 – 59	7,41	1,30	5,21
10.	60 – 64	9,38	1,77	6,55
11.	65 +	7,45	0,00	4,54
Jumlah		12,36	10,40	11,63

Sumber: Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon, 2017

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk dengan tingkat pendidikan SMA merupakan penduduk dengan potensi menjadi pengangguran yang sangat besar, yaitu sebanyak 8.511 orang atau 50,41 persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Penganggran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Cirebon Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Penganggur Terbuka					
	Jumlah (orang)			Persentase (%)		
	Jenis Kelamin		Total	Jenis Kelamin		Total
	L	P		L	P	
Tidak tamat SD	1.170	534	1.704	10,37	9,53	10,09
SD/ sederajat	2.173	252	2.425	19,26	4,50	14,36
SMP/ sederajat	1.832	853	2.685	16,24	15,22	15,90
SMA/ sederajat	5.193	3.318	8.511	46,04	59,20	50,41
Perguruan Tinggi	912	648	1.560	8,09	11,56	9,24
Jumlah	11.280	5.605	16.885	100,0	100,0	100,0

Sumber : Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon, 2017.

Penduduk dengan jenjang pendidikan SMA memiliki Tingkat Pengangguran tertinggi, sebesar 13,64 persen. Sementara penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi cukup rendah, yaitu sebesar 6,64 persen. Kondisi demikian perlu mendapat perhatian karena lulusan perguruan tinggi membawa dampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan SMA menjadi kurang terserap di bursa lapangan kerja, sehingga diperlukan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan SMA seperti lapangan kerja yang bersifat padat karya dan/atau diperlukan pendidikan kejuruan/ keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja.

3. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah pada Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59

Perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Kasus yang diselesaikan dengan PB	9	8	5	11
Kasus yang dicatatkan	11	9	7	13
Sumber data dan Rujukan	Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan	Data jumlah kasus yang diselesaikan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dan data jumlah kasus yang dicatatkan diperoleh dari dinas provinsi, kabupaten/ kota yang menangani bidang ketenagakerjaan	Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek ; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon	Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, 2018

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender perlu diberikan akses seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk lebih berperan aktif di segala bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif kaum perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah/eksekutif.

Tabel 2.60
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah perempuan PNS	3.575	3.051	3.226	2.443
Jumlah Total PNS	6.547	6.375	6.197	5.175
Persentase Partisipasi Perempuan	54,61	47,86	52,06	47,21

Sumber: BK Diklat Kota Cirebon, 2016

2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dapat terus ditingkatkan karena perempuan memiliki banyak potensi yang harus diberi akses sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Namun demikian, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Cirebon pada Tahun 2015 menunjukkan angka 44,16 persen penurunan dari Tahun 2014 yang sebesar 63,72 persen.

Tabel 2.61
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	63,72	63,72	44,16	na	46,15

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Cirebon, 2018.

Menurut kelompok umur, TPAK usia 15-19 Tahun merupakan TPAK paling kecil yaitu sebesar 25,99 persen. Hal ini karena pada kelompok usia tersebut lebih banyak penduduk yang masih bersekolah. Kesadaran penduduk pada kelompok usia tersebut untuk bersekolah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk lebih mementingkan pendidikan merupakan hal yang sangat baik, karena akan lebih meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kota Cirebon, sehingga memiliki daya saing tinggi.

TPAK Kota Cirebon Tahun 2017 tertinggi terdapat pada kelompok usia 40-44 Tahun sebesar 76,38 persen, kemudian diikuti oleh kelompok usia 30-34 Tahun yaitu sebesar 75,51 persen dan kelompok usia 35-39 Tahun sebesar 74,85 persen.

Tabel 2.62
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Usia
Di Kota Cirebon Tahun 2017 (Persen)

No.	Kelompok Umur	T P A K		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	15 – 19	28,90	23,07	25,99
2.	20 – 24	78,92	61,50	70,45
3.	25 – 29	93,75	52,51	73,66
4.	30 – 34	96,57	53,52	75,51
5.	35 – 39	96,51	52,74	74,85
6.	40 – 44	98,55	54,73	76,38
7.	45 – 49	97,29	50,94	73,28
8.	50 – 54	87,96	50,24	68,29
9.	55 – 59	78,04	43,50	60,69
10.	60 – 64	62,34	37,08	49,75
11.	65 +	38,08	17,84	26,39
Jumlah		79,36	46,15	62,63

Sumber : Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon.

3. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi di masyarakat Kota Cirebon. Berikut perkembangan pelaporan kasus KDRT di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016:

Tabel 2.63
Rasio KDRT di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah KDRT	24	28	30	10
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak	22	27	31	27

Sumber: BPMPPKB Kota Cirebon, 2016

Selama kurun waktu Tahun 2013-2016 jumlah kasus KDRT yang dilaporkan mengalami trend yang naik, dimana pada Tahun 2014 sebanyak 24 kasus menjadi 30 kasus pada Tahun 2015. Begitu pula dalam hal penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak, selama tiga Tahun terakhir mengalami tren yang naik dimana pada Tahun 2014 kasus yang ditangani sebanyak 22 kasus meningkat menjadi 31 kasus yang berhasil ditangani pada Tahun 2015, sedangkan pada Tahun 2016 jumlah kasus KDRT mengalami penurunan menjadi 10 kasus dan pengaduan yang telah diselesaikan dari Tahun 2015 sebanyak 27 kasus.

2.1.3.2.3 Ketahanan Pangan.

1. Regulasi ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Regulasi kebijakan terkait ketahanan pangan di Kota Cirebon terbagi menjadi tiga kebijakan yaitu: 1). terkait pelaksanaan program secara umum; 2). Terkait diversifikasi dan 3). Terkait penanganan daerah rawan pangan yang terangkum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang SPM Ketahanan Pangan Kota Cirebon.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah khususnya di Kota Cirebon. Ketersediaan pangan utama di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Ketersediaan Pangan Utama di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	135.486,2	147.231,95	153.086,46	241.687,20
Ketersediaan Pangan Utama per 1000 jiwa per Tahun (Ton)	450,97	487,8	393,686	630,00
Ketersediaan Pangan Utama per jiwa per Tahun (kg)	450,97	487,8	393,686	630,00
AKG Pangan Utama per Kapita per Tahun (kg)	109	109	109	109
Surplus ketersediaan pangan utama per jiwa per Tahun (kg)	341,97	378,8	284,686	521,00

Sumber: DPKPP Kota Cirebon 2017

2.1.3.2.4 Pertanahan.

Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah Negara dan penyelesaian ijin lokasi. Pada Tahun 2015 luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Cirebon mencapai 32.727.308 m² atau sekitar 87,60 persen dari jumlah luas yang seharusnya bersertifikat 37.358.000 m². Jadi masih ada sekitar 12,40 persen luas tanah milik pemerintah yang harus dituntaskan pengurusan sertifikatnya.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup.

1. Volume Sampah yang Dihasilkan Per Hari

Sampah (*refuse*) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Tabel 2.65
Volume Sampah Per Hari Per Kecamatan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Kecamatan	Volume Sampah (m ³)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Harjamukti	255	509	538	439	165
Lemahwungkuk	170	189	198	217	230
Pekalipan	124	277	284	118	125
Kesambi	167	221	230	285	303
Kejaksan	201	218	244	185	197
Kota Cirebon	917	1.414	1.494	1.244	1.319

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

Pada Tahun 2017 terdapat 30 bangunan TPS yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Cirebon. Rata-rata volume sampah yang dihasilkan per hari sebanyak 1.319 m³, dan yang paling banyak menghasilkan sampah adalah di Kecamatan Kesambi sebanyak 303 m³, kemudian Kecamatan Lemahwungkuk 230 m³.

2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna dan tidak mengandung

logam berat. Persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Penduduk Berakses Air Minum di Kota Cirebon Tahun 2016

Uraian	Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna
Perpipaan (PDAM,BPSPAM)	50.164	240.861
Penduduk yang memiliki akses air minum		294.075 (94,71%)

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016

3. Pencemaran Status Mutu Air

Berdasarkan hasil pantauan untuk pengujian kualitas air sungai, secara keseluruhan di 7 sub DAS (sungai kedung pane, banjir kanal, sukalila, kesunean, suba, kalijaga dan cikalong) dan tiga kualitas air laut di Kota Cirebon hampir semua parameter masih memenuhi baku mutu lingkungan kecuali parameter COD, BOD dan MBAS. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai seiring dengan laju pertumbuhan pemukiman dan industri yang melewati daerah aliran sungai di Kota Cirebon. Faktor terbesar terhadap penurunan kualitas air sungai adalah limbah domestik yang tidak terkendali dari pemukiman penduduk serta air limbah industri yang secara langsung atau tidak dialirkan ke aliran air sungai.

4. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Pengertian amdal adalah sebuah proses studi yang formal dimana diperuntukkan dalam mengukur dampak yang akan terjadi pada lingkungan ketika terjadi pembangunan proyek-proyek gedung atau pabrik yang bertujuan untuk memberikan kepastian agar tidak terjadi masalah lingkungan saat pembangunan telah selesai sehingga dibutuhkan analisis pada tahap awal dengan melakukan perencanaan dan perancangan proyek untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan.

Perusahaan atau usaha kegiatan yang wajib AMDAL di Kota Cirebon pada Tahun 2016 ada sebanyak 10 perusahaan/usaha yaitu: Pelabuhan Indonesia Cirebon, pembangunan *Grage Mall*, pembangunan Cirebon Super Blok, pembangunan kawasan *Grage City*, rencana pembangunan jalan lingkar luar kota Cirebon, RSUD Gunung Jati, pembangunan Toserba Yogya, pengembangan TPA Kopiluhur, pembangunan Pusat Perbelanjaan 328 (*Living Plaza*), dan pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada Tahun 2016 sebesar 100 atau 10 perusahaan yang sudah dilakukan pengawasan AMDAL.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Persentase Jumlah Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari perkembangan pencatatan administrasi kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Rasio kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran maupun Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cirebon mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan administrasi kependudukan di Kota Cirebon Kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.67
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Kepemilikan KTP	237.782	262.799	196.717	na
Kepemilikan akte kelahiran	873	895	376	na
Ketersediaan database kependudukan skala kota	Tersedia	Tersedia	tersedia	tersedia
Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	sudah	sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Tahun 2016

2. Rasio Penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber-KTP di Kota Cirebon dihitung dari jumlah penduduk ber-KTP dengan jumlah penduduk pada Tahun bersangkutan. Rasio penduduk berKTP pada Tahun 2015 sebesar 0,51 persen mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang sebesar 0,68 persen.

Tabel 2.68
Rasio Penduduk Ber-KTP di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	0,64	0,68	0,51	na

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Tahun 2016

3. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dihitung berdasarkan jumlah akte kelahiran yang diterbitkan dibagi dengan jumlah bayi yang lahir pada Tahun bersangkutan. Pada Tahun 2015 rasio bayi yang memiliki akte kelahiran mencapai 86,70 persen mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya yang sebesar 84,00 persen.

Tabel 2.69
Rasio Bayi Dengan Akte Kelahiran di Kota Cirebon
Tahun 2013-2015

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio bayi berakte kelahiran	83,00	84,00	86,70

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, 2016

4. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan nikah memiliki akte nikah dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki akte nikah dibagi dengan jumlah penduduk berstatus nikah pada Tahun bersangkutan. Pada Tahun 2015 rasio pasangan berakte nikah tercatat sebesar 37,80 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang sebesar 77,89 persen.

Tabel 2.70
Rasio Bayi Berkate Kelahiran di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio pasangan berakte nikah	72,91	77,89	37,80

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, 2016

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah LSM yang Aktif.

Besarnya jumlah LSM yang aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, banyaknya jumlah LSM juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.71
Jumlah LSM, OKP dan Ormas di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
LSM, OKP, Ormas	274	274	256	256
Parpol	14	14	14	14
Total	288	288	270	270

Sumber: Kantor Kesbangpol dan Poldagri Tahun 2018

Jumlah LSM yang terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon dari Tahun 2013-2016 mengalami penurunan dari 274 LSM/OKP/Ormas menjadi 256 lembaga. Penurunan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama menyangkut aspek kelembagaan, tujuan, visi dan misi organisasi pembentukan kelembagaan.

2.1.3.2.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah peserta KB baru dan peserta KB lama secara terus menerus memakai alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran dan mengakhiri kesuburan. Cakupan peserta KB Aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan pasangan usia subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara pasangan usia subur. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui cakupan peserta KB aktif di kota Cirebon kurun waktu 2013-2015 berada pada kisaran 79 persen - 81 persen, namun pada Tahun 2016-2017 cakupan peserta KB Aktif turun menjadi 61,05 persen dan 60,92 persen. .

Tabel 2.72
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan peserta KB Aktif	79,57	81,20	81,45	61,05	60,92

Sumber: DPMPPKB Kota Cirebon, 2018

Pada Tahun 2017 terjadi penurunan peserta KB aktif sebesar 0,13 persen dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 penurunannya cukup signifikan sebesar 20,53 persen. hal ini disebabkan adanya pemutakhiran data yang dilakukan pada Tahun 2016 dimana peserta KB aktif tidak termasuk perempuan yang menopause.

2. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dapat menunjukkan berhasil tidaknya program KB yang dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, rata-rata jumlah anak di Kota Cirebon dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.73

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah Anak	122.664	124.466	133.085
Jumlah KK	73.618	75.136	82.144
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,67	1,66	1,62

Sumber: Profil Kependudukan Kota Cirebon Disdukcapil, 2018

2.1.3.2.9 Perhubungan.

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Sarana transportasi berupa jumlah kendaraan angkutan umum dan jumlah penumpang diangkat kereta api dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum	1.263	1.192.915	1.273	na
Jumlah Penumpang Diangkut Kereta Api (orang)	958.739	1.471.367	1.192.915	1.152.402

Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2017, BPS.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika.

1. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan

statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kinerja lebih cepat dan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Cirebon selama kurun waktu 2013-2016 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75
Sarana/prasarana komunikasi dan informatika
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	T a h u n			
	2013	2014	2015	2016
Website Milik Pemerintah Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Informatika dan komunikasi Kota Cirebon Tahun 2018

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1. Persentase Peserta Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Semakin banyak koperasi yang aktif diharapkan ekonomi rakyat semakin meningkat, pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan dapat menurun. Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan koperasi aktif di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.76
Persentase Koperasi Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Koperasi Aktif	253	225	219	199
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	100	144	189	178
Jumlah Koperasi Yang Ada	353	369	408	377
Persentase Koperasi Aktif	71,67	60,97	53,67	52,78

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKN Kota Cirebon 2018

2. Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM tersebut adalah:

1. **Usaha Mikro** : adalah usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. **Usaha Kecil** : adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. **Usaha Menengah** : adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Cirebon selama kurun waktu 2013-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.77
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian				
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	851	1517	1517	1.718

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKN Kota Cirebon, 2018

2.1.3.2.12 Penanaman Modal.

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kota Cirebon disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.78
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
PMDN	1.112	1.112	6	6

PMA	10	10	13	13
Total	1.122	1.122	19	19

Sumber: BPMPP Kota Cirebon, 2018

Perkembangan investor melihat kepada perusahaan berskala nasional termasuk seluruh perusahaan yang ada perlu didata dan dihitung sebagai bagian penanaman modal dalam negeri. Jumlah investor sejak Tahun 2010 s/d 2014 menunjukkan perkembangan atau peningkatan jumlah dari 1.039 menjadi 1.122. Rata-rata kenaikan sebesar 3,5% setiap Tahun. Pada Tahun 2015 investor yang masuk di kota Cirebon bertambah sebanyak 19 investor yang terdiri dari PMDN sebanyak 6 investor dan PMA sebanyak 13 Investor sedangkan Tahun 2016 investor tidak mengalami peningkatan dan sama dengan Tahun 2015. Kondisi investor perlu disediakan ruang berusaha yang nyaman dan peningkatan fasilitas Kota yang memadai, antara lain melalui penataan tata ruang kota yang baik, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengusaha yang mau menginvestasikan modalnya di Kota Cirebon.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hasil investasi PMDN/PMA Kota Cirebon dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.79
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA di Kota Cirebon Tahun 2011-2016

Uraian	T a h u n			
	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
PMDN	543.198.000.000	791.000.000.000	1.387.287.386.015	1.357.154.214.039
PMA	775.380.480.000	504.446.000.000	640.248.000.000	504.946.000.000
Total	1.318.578.480.000	1.295.446.000.000	2.027.535.386.015	1.825.100.214.039

Sumber: BPMPP Kota Cirebon, 2018

Nilai investasi yang masuk di Kota Cirebon dari Tahun 2013 hingga Tahun 2016 mengalami perkembangan yang fluktuatif, Tahun 2014 mengalami penurunan tetapi Tahun 2015 mengalami kenaikan dan pada Tahun 2016 kembali mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Cirebon belum stabil.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.

1. Jumlah organisasi pemuda dan Olah Raga

Gambaran dari kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dapat dilihat dari indikator jumlah organisasi pemuda dan olah raga beserta kegiatan kepemudaan yang ada di Kota Cirebon seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olah Raga di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Organisasi Pemuda	49	49	49	52
Jumlah Organisasi Olah Raga	4	4	4	4
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	2	3	2
Jumlah Kegiatan Olah Raga	4	5	4	3
Jumlah gelanggang/balai remaja	251	251	251	251

Sumber: Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Profil Kota Cirebon 2018

2.1.3.2.14 Statistik.

Gambaran kondisi umum daerah terkait urusan statistik, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.81
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Buku Cirebon Dalam Angka/Profil Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Indikator Makro	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku IPM	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku IKK	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2015, DKIS 2018

2.1.3.2.15 Kebudayaan.

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kebudayaan yang ada di Kota Cirebon memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat diberdayakan menjadi nilai tinggi yang dapat dilestarikan dan dapat disajikan menjadi nilai komoditas pariwisata. Ciri khas budaya Cirebon cenderung religius berbaur dengan budaya Keraton yang bernuansa kerajaan. Kesenian, tradisi dan unsur nilai-nilai budaya

yang luhur dapat menjadi faktor penunjang dalam menyokong pembangunan di wilayah Kota Cirebon. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan festival mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya begitu pula Tahun 2016, hal ini menunjukkan perlu ditingkatkannya penyelenggaraan festival-festival kesenian dan budaya, sehingga dapat dijadikan sebagai ajang promosi Kota Cirebon ke masyarakat luas. Gambaran tentang urusan kebudayaan dalam penyelenggaraan seni dan budaya Tahun 2013-2016 dapat disajikan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.82

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	18 kali	37 kali	31 kali	20 kali

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon,
Profil Kota Cirebon 2018

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Situs-situs peninggalan sejarah dan purbakala di Cirebon, termasuk benda dan kawasan cagar budaya menjadi daya tarik wisata yang perlu dilestarikan. Berikut data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Cirebon kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.83

Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestariakan	72	72	72	72

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon,
2018

2.1.3.2.16 Perpustakaan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

1. Jumlah Perpustakaan.

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada

masyarakat pengguna perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Jumlah Perpustakaan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah perpustakaan umum	23	23	23	25
Jumlah perpustakaan khusus	2	2	2	2
Jumlah perpustakaan sekolah	248	248	248	289
Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	15	15	16	16
Total perpustakaan	288	288	289	332

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan yang juga menggambarkan tingginya budaya baca masyarakat. Berikut data pengunjung perpustakaan di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.85
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	T a h u n			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah pengunjung perpustakaan umum	33.313	42.522	43.389	46.343
Jumlah pengunjung perpustakaan khusus	2.876	2.876	2.876	2.970
Jumlah pengunjung perpustakaan sekolah	2.550	2.700	2.890	3.372
Jumlah pengunjung perpustakaan perguruan tinggi	130.200	140.220	130.350	135.326
Total Pengunjung	166.644	185.888	176.904	188.011

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

3. Jumlah Ketersediaan Buku Pada Perpustakaan

Ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada pengguna perpustakaan. Pada Tahun 2015 jumlah buku yang tersedia di perpustakaan milik Pemerintah Kota Cirebon sebanyak 37.537 buah dengan total judul buku sebanyak 18.576 judul dengan rata-rata jumlah

buku per judul sebanyak 2 buku. Pada Tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah buku menjadi 46.343 buku dengan judul sebanyak 20.209 judul buku, apabila dirata-ratakan maka jumlah buku per judul buku sebanyak 2 – 3 buku.

Tabel 2.86
Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan Daerah
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah judul buku	18.576	18.576	18.576	20.209
Jumlah total buku	34.837	35.537	37.537	46.343
Rata-rata jumlah judul buku	1,87	1,90	2,02	2,20

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

2.1.3.2.17. Kearsipan.

Gambaran kondisi umum daerah terkait urusan kearsipan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

1. Pengelolaan Arsip Secara Baku.

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa Tahun ke belakang yang keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu memerlukan pengelolaan secara baku. Pengelolaan arsip secara baku di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Pengelolaan Arsip Baku di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah SKPD yang mengelola administrasi kearsipan sesuai standar	52	52	52	52
Jumlah SKPD yang mengelola administrasi kearsipan secara baku	3	14	28	42
Peningkatan SDM pengelola Kearsipan (orang)	8	15	23	23

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

2.1.3.3 Urusan Pilihan.

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan.

1. Produksi Perikanan

Sektor perikanan di Kota Cirebon terbagi dalam dua jenis yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Berikut produktivitas kelautan dan perikanan di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.88
Produktivitas Kelautan dan Perikanan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	280,33	323,18	323,18	355,88
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.573,83	4.197,68	3.893	4.485,82
Konsumsi Ikan (kg/kap)	28,11	28,87	27,17	28,08
Jumlah kelompok nelayan binaan	18	20	18	18

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Cirebon 2016, BPS.

2.1.3.3.2 Pariwisata.

1. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara ke Kota Cirebon semakin menunjukkan peningkatannya. Berikut jumlah wisatawan yang datang ke Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.89
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	T a h u n			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	547.233	596.046	686.121	831.152

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, profil Kota Cirebon 2018

2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kota Cirebon yang mendapat julukan kota wali memiliki warisan budaya baik berupa benda, situs, seni, tradisi dan cagar budaya yang menarik dan dapat menambah destinasi wisata di Kota Cirebon. Maka kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Cirebon nilainya sedikit lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, yakni berada pada kisaran 4,9%.

Berikut Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2015.

Tabel 2.92
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	0,36	0,35	0,34	0,35

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 Kota Cirebon

2.1.3.3.3 Perdagangan.

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Struktur ekonomi Kota Cirebon termasuk dalam kelompok ekonomi tersier dimana sektor perdagangan baik barang maupun jasa mendominasi dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota. Berikut kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Cirebon kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.93
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	33,87	32,64	31,87	31,66

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 Kota Cirebon, BPS.

2.1.3.3.4 Perindustrian.

1. Pertumbuhan Industri

Kinerja urusan perindustrian dapat dilihat dari perkembangan indistri dan kontribusi industri terhadap PDRB. Pertumbuhan industri di kota Cirebon pada Tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dari 6,37 persen pada Tahun 2014 turun menjadi 4,09 persen Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 secara perlahan naik menjadi 4,39 persen. Berikut data perkembangan indistri yang ada di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.94
Pertumbuhan Industri di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Data Pertumbuhan Industri	4,77	6,37	4,09	4,39

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 Kota Cirebon, BPS

2. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Struktur ekonomi Kota Cirebon termasuk pada struktur ekonomi tersier dimana dominasi dari kelompok tersier khususnya perdagangan besar dan eceran lebih tinggi dari kelompok lainnya. Namun demikian sektor sekunder khususnya usaha industri pengolahan menduduki peringkat berikutnya. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di Kota Cirebon Tahun 2013-2016 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.95
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB (%)	10,30	10,69	10,55	10,48

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 Kota Cirebon, BPS.

2.1.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.96
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dokumen RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dokumen RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen LKPJ	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2018.

Perencanaan Jangka Panjang Kota Cirebon terangkum dalam dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2008 pada tanggal 31 Oktober 2008.

Perencanaan Jangka Menengah (lima Tahunan) dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 pada tanggal 4 Desember 2013, kemudian ada perubahan RPJMD dengan penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2015 pada tanggal 23 November 2015.

Perencanaan tata ruang kota dirumuskan dalam dokumen RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 pada tanggal 8 Juni 2012. Untuk perencanaan Tahunan daerah Kota Cirebon dirumuskan melalui Dokumen RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 pada tanggal 18 Mei 2016, kemudian ada perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 17 Oktober 2016.

2.1.3.4.2 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Sektor perikanan di Kota Cirebon terbagi dalam dua jenis yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Berikut produktivitas kelautan dan perikanan di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.97

Produktivitas Kelautan dan Perikanan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	280,33	323,18	323,18	355,88
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.573,83	4.197,68	3.893	4.485,82
Konsumsi Ikan (kg/kap)	28,11	28,87	27,17	28,08
Jumlah kelompok nelayan binaan	18	20	18	18

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Cirebon 2016, BPS.

2.1.3.4.3 Perindustrian

1. Pertumbuhan Industri

Kinerja urusan perindustrian dapat dilihat dari perkembangan indistri dan kontribusi industri terhadap PDRB. Pertumbuhan industri di kota Cirebon pada Tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dari 6,37 persen pada Tahun 2014 turun menjadi 4,09 persen Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 secara perlahan naik menjadi 4,39 persen. Berikut data perkembangan indistri yang ada di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016.

Tabel 2.98
Pertumbuhan Industri di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Data Pertumbuhan Industri	4,77	6,37	4,09	4,39

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 Kota Cirebon, BPS

2. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Struktur ekonomi Kota Cirebon termasuk pada struktur ekonomi tersier dimana dominasi dari kelompok tersier khususnya perdagangan besar dan eceran lebih tinggi dari kelompok lainnya. Namun demikian sektor sekunder khususnya usaha industri pengolahan menduduki peringkat berikutnya. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di Kota Cirebon Tahun 2013-2016 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.99
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB (%)	10,30	10,69	10,55	10,48

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 Kota Cirebon, BPS.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, Nasional atau Internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makan dan bukan makan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya.

1.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan Fasilitas wilayah atau infrastruktur yang memadai menjadi bagian dari daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan.

Tabel 2.100
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kota Cirebon Tahun 2013-2015

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Panjang Jalan (Km)	163.863	163.863	193.911
Jumlah Kendaraan	170.537	177.214	181.210
Rasio (kend/km)	1,040729	1,081477	1,070089

Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2016, BPS.

1.1.4.1. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Cirebon kurun waktu 2013-2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Angka Kriminalitas di Kota Cirebon Tahun 2013-2015

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah kasus narkoba	23	31	10
Jumlah kasus pembunuhan	0	5	1
Jumlah kejahatan seksual	16	25	12
Jumlah kasus penganiayaan	85	62	47
Jumlah kasus pencurian	383	64	57
Jumlah kasus penipuan	148	77	47
Jumlah kasus pemalsuan uang	1	1	0
Jumlah tindak kriminal selama 1 Tahun	811	265	174
Jumlah penduduk	337.625	374.099	387.956
Angka kriminalitas	0,24%	0,07%	0,04%

Sumber: Kesbangpol Kota Cirebon, Polresta Cirebon Kota, SIPD Kota Cirebon
2014-2015

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada Tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas suatu daerah maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakatnya. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas keamanan daerah karena akan berimbas pada iklim investasi.

2. Jumlah dan Macam Pajak Daerah

Pemerintah daerah mendapatkan kewenangan dalam memungut dan mengelola pajak daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis oleh kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah kota Cirebon yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1) pajak hotel, 2) pajak restoran, 3) pajak hiburan, 4) pajak reklame, 5) pajak penerangan jalan, 6) pajak parkir, 7) pajak air bawah tanah, 8) pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 9) pajak bumi dan bangunan.

Tabel 2.102
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2016

NO.	U r a i a n	Tahun Anggaran 2016		Persentase Capaian Realisasi	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel	11.760.500.000	13.800.246.951	117,34	9,94
2	Pajak Restoran	23.230.000.000	28.509.442.883	122,73	20,55

3	Pajak Hiburan	5.160.500.000	6.644.346.803	128,75	4,79
4	Pajak Reklame	5.188.000.000	5.633.842.130	108,59	4,06
5	Pajak Penerangan Jalan	20.100.000.000	21.031.878.005	104,64	15,16
6	Pajak Parkir	2.000.000.000	2.557.017.194	127,85	1,84
7	Pajak Air Bawah Tanah	61.000.000	74.325.717	121,85	0,05
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	30.000.000.000	33.848.971.551	112,83	24,40
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan	23.700.000.000	26.605.772.428	112,26	19,18
Jumlah		121.200.000.000	138.705.843.662	114,44	100

Tanggal 31 Desember 2016

Sumber: Laporan Keuangan Kota Cirebon, data diolah

Berdasarkan Tabel 2.97 terlihat bahwa capaian penerimaan pajak Tahun 2016 yang melebihi target anggaran sebesar 14,44% dengan pencapaian target anggaran yang paling besar dari pajak hiburan sebesar 28,75% sedangkan yang paling rendah pajak penerangan jalan 4,64%. Sedangkan penyumbang kontribusi untuk pajak daerah terbesar antara lain dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 24,40%, selanjutnya pajak restoran yang memberikan kontribusi sebesar 20,55% dari Pajak Bumi dan Bangunan yakni sebesar 19,18%.

Sementara itu, perkembangan realisasi pajak daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 2.98 berikut. Dari data-data pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu lima Tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari Rp. 92.498.096.461,00 pada Tahun 2013 naik menjadi Rp. 158.103.135.634,00.



Tabel 2.103
Realisasi Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pajak Hotel	6.937.552.217,00	8.428.715.471,00	105.587.615,00	13.800.246.951,00	15.268.302.371,00
2	Pajak Restoran	15.697.535.543,00	20.053.648.206,00	22.464.746.936,00	28.509.442.883,00	35.577.559.773,00
3	Pajak Hiburan	2.942.610.781,00	3.289.104.648,00	4.515.141.517,00	6.644.346.803,00	7.141.275.082,00
4	Pajak Reklame	3.485.417.701,00	4.450.352.028,00	5.203.909.337,00	5.633.842.130,00	5.713.501.644,00
5	Pajak Penerangan Jalan	14.925.031.084,00	18.168.155.753,00	20.247.225.045,00	21.031.878.005,00	23.043.384.500,00
6	Pajak Parkir	1.301.651.685,00	1.659.318.750,00	2.008.833.455,00	2.557.017.194,00	3.181.421.770,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	63.884.300,00	64.700.200,00	61.677.900,00	74.325.717,00	68.557.845,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.947.500,00	250.000,00	-	-	-
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	26.526.076.511,0	24.788.850.899,00	28.790.308.571,00	33.848.971.551,00	40.562.836.268,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaaan	20.616.389.139,00	22.958.354.478,00	23.778.913.927,00	26.605.772.428,00	27.546.296.381,00
JUMLAH		92.498.096.461,00	103.861.450.433,00	107.176.344.303,00	138.705.843.662,00	158.103.135.634,00

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon, data diolah.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah yang menjadi bagian dari PAD Kota Cirebon meliputi:

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan;
- 3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 4) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Sewa Pemakaian Tanah);
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 3) Retribusi Terminal;
- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Trayek;
- 3) Retribusi Ijin UU Gangguan (HO).

Tabel 2.104
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		Persentase Capaian Realisasi	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
I	Retribusi Jasa Umum	8.197.000.000,00	8.771.539.499,00	107,01	70,47
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.550.000.000,00	2.686.880.000,00	105,37	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.650.000.000,00	2.949.312.876,00	178,75	
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	60.000.000,00	71.295.000,00	118,83	
4	Retribusi Pelayanan Parkir	2.000.000.000,00	1.419.609.500,00	70,98	



No	Uraian		Tahun Anggaran 2016		Persentase Capaian Realisasi	Kontribusi
			Anggaran	Realisasi		
		di tepi Jalan Umum				
	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.755.000.000,00	1.580.742.123,00	90,07	
	6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	63.700.000,00	127,40	
	7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	132.000.000,00	0,00	0,00	
II	Retribusi Jasa Usaha		2.823.000.000,00	1.825.306.399,00	64,66	14,66
	1	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Sewa Pemakaian Tanah)	1.008.750.000,00	424.811.999,00	42,11	
	2	Retribusi Tempat Pelelangan	170.000.000,00	191.000.000,00	112,35	
	3	Retribusi Terminal	1.550.000.000,00	1.095.026.000,00	70,65	
	4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	5.003.000,00	0,00	
	5	Retribusi Rumah Potong Hewan	36.250.000,00	36.259.000,00	100,02	
	6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	58.000.000,00	73.206.400,00	126,22	
III	Retribusi Perijinan Tertentu		2.600.000.000,00	1.850.361.598,00	71,17	14,87
	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.043.599.818,00	52,18	
	2	Retribusi Izin Trayek	100.000.000,00	38.000.000,00	38,00	
	3	Retribusi Ijin UU Gangguan (HO)	500.000.000,00	768.761.780,00	153,75	
JUMLAH			13.620.000.000,00	12.447.207.496,00	91,39	100

Sumber: Laporan Keuangan Kota Cirebon Tanggal 31 Desember 2016, data diolah

Dari ketiga sumber retribusi tersebut, retribusi jasa umum memberikan kontribusi paling besar yakni mencapai 70,47%, berikutnya dari retribusi perijinan tertentu sebesar 14,87% dan sisanya sebesar 14,66% dari retribusi jasa usaha.

4. Kota Cirebon Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kota Cirebon dalam penataan ruang nasional yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu **Ciayumajakuning** (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan.

Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN berdasarkan karakteristik wilayah yang merupakan:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN dipertegas juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029. Fokus pengembangan Kota Cirebon sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi

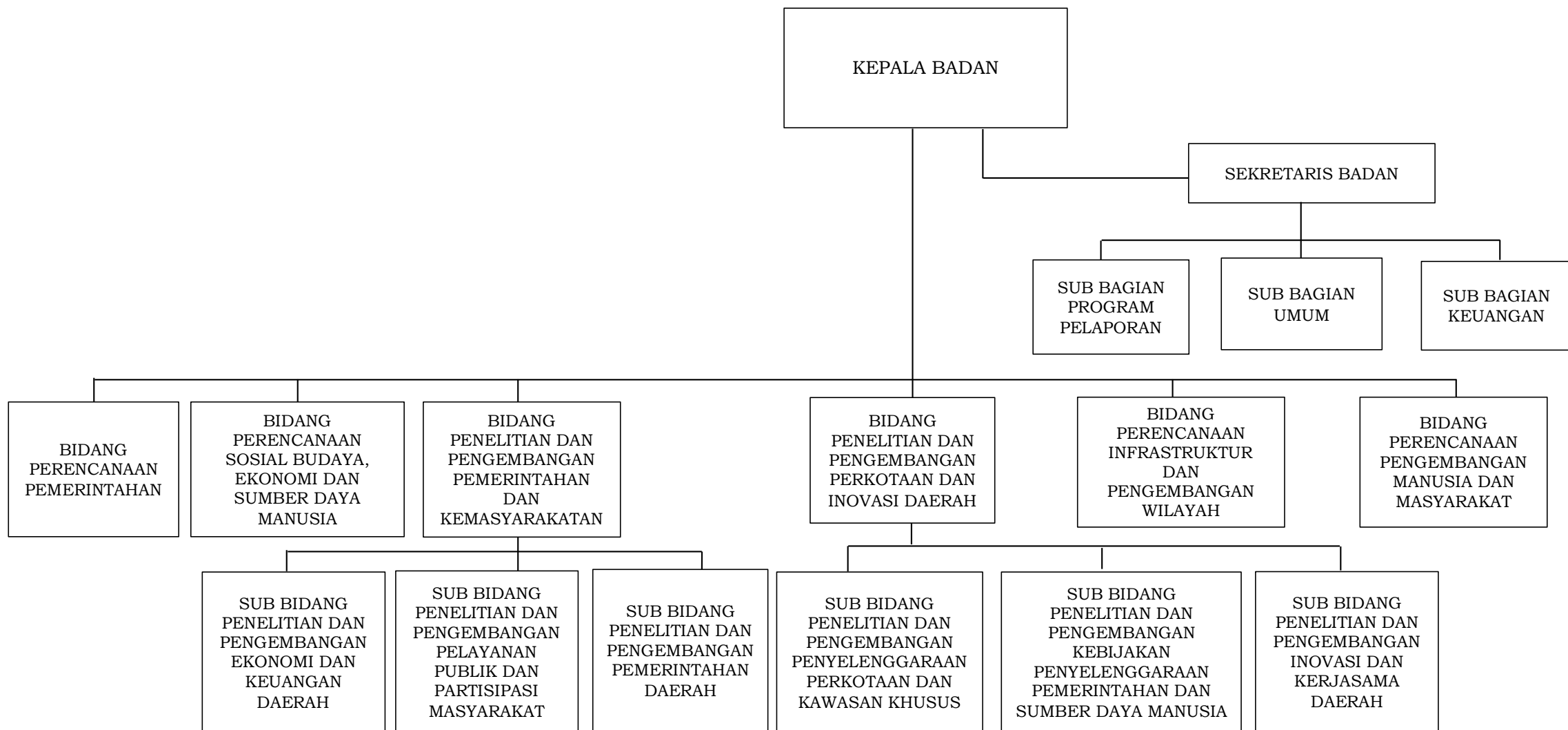
2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon untuk selanjutnya disebut BPPPPD Kota Cirebon adalah penyelenggara fungsi perencanaan pembangunan dan fungsi Kelitbangan; dimana fungsi Kelitbangan memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerekayasaan, penerapan, pengoprasian, evaluasi kebijakan, dan disemilasi, serta administrasi manajemen Kelitbangan dibidang penyelenggaraan pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang perencanaan



dan penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenangan Daerah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dapat dilihat pada Gambar2.1.



Gambar 2.2. Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sumber : Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016

Di lingkup BPPPPD Kota Cirebon, fungsi Kelitbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Kelembagaan Fungsi Pendukung, Kelitbangan Kota Cirebon dalam kategori type C yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, dua Bidang Litbang tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Litbang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang litbang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasi daerah; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
- f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;

- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perkotaan dan kawasan khusus. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
- 3) pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
- 5) pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan inovasi dan kerjasama daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
- 3) pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
- 5) pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan sumber daya manusia. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- 3) pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- 5) pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - 2) penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - 3) pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - 5) pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- 3) pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- 5) pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
- 3) pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
- 5) pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, BPPPPD Kota Cirebon belum didukung oleh keberadaan pejabat fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pejabat fungsional peneliti. Jenjang jabatan Peneliti dari terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

- 1) Peneliti Pertama;
- 2) Peneliti Muda;
- 3) Peneliti Madya; dan
- 4) Peneliti Utama.

Ruang lingkup tugas pokok Peneliti sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:

1) Peneliti Pertama

- a) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan pengembangan iptek sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;
- b) Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya; dan
- d) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

2) Peneliti Muda

- a) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan Litbang;
- b) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- c) Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- d) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- e) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri

seminar, pelatihan, dan lokal karya; dan

- f) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya

3) Peneliti Madya

- a) Membuat program rencana kegiatan Litbang;
- b) Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pengembangan, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c) Merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
- d) Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- e) Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- f) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya; Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya; dan
- g) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

4) Peneliti Utama

- a) Membuat program rencana kegiatan Litbang;
- b) Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari

- penelitian dan/atau pemikiran ilmiah;
- c) Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
 - d) Merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan; dan
 - e) Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, diperlukan ketersediaan dan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sumber daya Kelitbangan di Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat fungsional keahlian dan tenagalainnya.

Pada Pasal 50 dijelaskan bahwa pejabat fungsional keahlian meliputi pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional perekayasa, pejabat fungsional analisi kebijakan dan pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi Kelitbangan. Sedangkan tenaga lainnya yang dimaksud dalam pasal 49 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi Kelitbangan.

Sumber Daya Manusia Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon sampai dengan Tahun 2018 berjumlah 12 orang terdiri dari laki-laki 9 orang dan perempuan 3 orang. Sumber daya Kelitbangan berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 3 orang pejabat administrator, 5 orang pejabat pengawas dan 3 orang pejabat pelaksana. Pejabat administrator terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 2 orang Kepala Bidang. Pejabat pengawas terdiri 5 orang Kepala Sub Bidang.

Distribusi sumber daya manusia Kelitbangan berdasarkan

tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Magister (S2) : 4 orang;
- b. Sarjana (S1) : 7 orang;
- c. Sarjana Muda (D3) : - orang; dan
- d. SLTA : 1 orang.

Berdasarkan golongan ruang, sumber daya Kelitbangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Pembina TkI (IV/b) : 2 orang;
- b. Pembina (IV/a) : 3 orang;
- c. Penata TkI (III/d) : 3 orang;
- d. Penata (III/c) : 1 orang;
- e. Penata Muda TkI (III/b) : 1 orang;
- f. PenataMuda (III/a) : 1 orang; dan
- g. Pengatur TkI (II/d) : 1 orang.

Distribusi sumber daya manusia Kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sedangkan distribusi sumber daya manusia Kelitbangan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Tabel 2.7. Distribusi sumber daya manusia Kelitbangan berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon

NO	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah
Struktural :				
1	Kepala Badan BPPPPD	Pembina Tk.I,IV/b	S1	1
2	Sekretaris Badan BPPPPD	Pembina Tk.I,IV/b	S2	1
Kabid :				
3	Kepala Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah	Pembina, IV/a	S2	1
4	Kepala Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Penata Tk I,III/d	S1	1
Kasubid :				
5	Kasubid Litbang Pemerintahan Daerah	Pembina IV/a	S2	1
6	Kasubid Litbang Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM	Penata Tk I,III/d	S1	1
7	Kasubid Litbang Ekonomi dan Keuangan Daerah	Pemata Tk.I,III/d	S1	1
8	Kasubid Litbang Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus	Penata III/c	S1	1
9	Kasubid Litbang Inovasi dan Kerjasama Daerah	Penata Muda TkI,III/b	S2	1
10	Kasubid Litbang Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat			0
Pelaksana di Bidang Litbang PK				
11	Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan	Penata III/c	S2	1
Pelaksana di Bidang Litbang PID				
12	Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan	Penata Muda III/a dan Pengatur II/c		2
Fungsional (Peneliti)				
13	Peneliti Pertama			0
14	Peneliti Muda			0
15	Peneliti Madya			0
16	Peneliti Utama			0
NON PNS				
17	Tenaga Pendukung		SLTA	1



Tabel 2.8 Distribusi sumber daya manusia Kelitbangan Berdasarkan Struktur Organisasi Kelitbangan

NO	Jabatan>Nama	Instansi	Pendidikan	Jumlah
Majelis Pertimbangan				
1	Wali Kota Cirebon			1
2	Sekretaris Daerah Kota Cirebon			1
3	Kepala BPPPPD Kota Cirebon	BPPPPD	S1	1
4	SKPD sekota Cirebon			26
5	Iwan Purnama, ST, M.T	Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon	S2	1
6	Hj. Yani Kamasturyani, SKM, MHKes	Sekolah Tinggi Kesehatan Mahardika	S2	1
7	Dr. H. Suwirno, SH, M.Si	Universitas Tujuh Belas Agustus		1
8	Dyah Widiyastuti, SST, M.Keb	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	S2	1
9	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si	Institut Agama Islam Negeri		1
10	Dr. H. Amran Jaenudin, Ir, MS	Universitas Swadaya Gunung Jati		1
Pengendali Mutu				
11	Kepala BPPPPD Kota Cirebon	BPPPPD	S1	1
12	Sekretaris BPPPPD Kota Cirebon	BPPPPD	S2	1
13	Kabid Litbang PK	BPPPPD	S1	1
14	Kabid Litbang PID	BPPPPD	S2	1
15	Farhatul Muti'ah, S.T, M.T	Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon	S2	1
16	Dwiyanti Purbasari, S.Kep, Ners, M.Kep	Sekolah Tinggi Kesehatan Mahardika	S2	1
17	Ria Adriyani, S.IP, M.Si	Universitas Tujuh Belas Agustus	S2	1
18	Komarudin, S.Kp, M.Kep	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	S2	1
19	M. Sigit Gunawan, SH, M.Kn	Universitas Swadaya Gunung Jati	S2	1
20	Budi Manfaat, S.Pd, M.Si	Institut Agama Islam Negeri	S2	1



Tabel 2.8 Distribusi sumber daya manusia Kelitbangan Berdasarkan Struktur Organisasi Kelitbangan Lanjutan

NO	Jabatan>Nama	Instansi	Pendidikan	Jumlah
Tim Kelitbangan				
21	Kabid Litbang PK	Ltbang PK BPPPPD	S1	1
22	Kabid Litbang PID	Litbang PID BPPPPD	S2	1
23	Kasubid Litbang Pemerintahan Daerah	Ltbang PK BPPPPD	S2	1
24	Kasubid Litbang Ekonomi dan Keuangan Daerah	Litbang PK BPPPPD	S1	1
26	Kasubid Litbang Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat	Litbang PK BPPPPD		0
27	Kasubid Litbang Kebijakan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus	Litbang PID BPPPPD	S1	1
28	Kasubid Litbang Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan SDM	Litbang PID BPPPPD	S1	1
29	Kasubid Litbang Inovasi dan Kerjasama Daerah	Litbang PID BPPPPD	S2	1
30	Dr. H. Sugiyanto, SH, MH	Institut Agama Islam Negeri	S3	1
31	Nono Carsono, ST, MT	Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon	S2	1
32	Jaenudin, SKM, MPH	Sekolah Tinggi Kesehatan Mahardika	S2	1
33	Waluyo Djoko Yudisworo, ST, MT	Universitas Tujuh Belas Agustus	S2	1
34	Bambang Karmanto, SKM, M.Kes	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	S2	1
35	Dr. H. Endang Sutrisno, SH, M.Hum	Universitas Swadaya Gunung Jati	S3	1
36	Dr. Kartono, SE, M.Si	Universitas Swadaya Gunung Jati	S3	1

2.2.2. Pendanaan Kelitbangan

Biaya penyelenggaraan Kelitbangan di Pemerintahan Kota Cirebon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN).

2.2.3. Kerjasama Kelitbangan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dalam menyelenggarakan fungsi Kelitbangan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi lainnya, antara lain : Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementrian/Lembaga, Dewan Riset Nasional/Daerah, badan usaha, dan masyarakat.

2.3. Potensi dan Permasalahan

2.3.1. Potensi

Terdapat beberapa potensi yang dimiliki oleh BPPPPD Kota Cirebon yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam perumusan kebijakan. Potensi-potensi tersebut antara lain:

1. Kota Cirebon sebagai kota Metropolitan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan BPPPPD Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi; dan
3. Adanya motivasi yang kuat dari aparatur sipil negara di BPPPPD Kota Cirebon untuk melakukan inovasi dan perubahan sistem untuk mendukung kegiatan Kelitbangan.
4. Sesuai dengan Pasal 37 Permendagri No. 17 Tahun 2016 telah terbentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan; dan
5. Adanya perguruan tinggi lokal yang mendukung tupoksi Kelitbangan.

2.3.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, BPPPPD Kota Cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Belum adanya Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa di BPPPPD Kota Cirebon sehingga pelaksanaan kegiatan Kelitbangan

khususnya perekayasa belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Belum tersedianya media publikasi online (*open journal system*) sehingga penyebaran hasil-hasil Kelitbangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Serta belum tersedianya Jurnal litbang yang menjadi media publikasi Kelitbangan yang dimiliki oleh BPPPD masih berbentuk tercetak (*printed*) sehingga jangkauan penyebarannya masih sangat terbatas. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi terbitan Berkala Ilmiah terdapat arahan untuk mengubah terbitan berkala ilmiah (jurnal) tercetak menjadi terbitan berkala ilmiah online.
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Masih adanya kajian dilakukan oleh perangkat daerah lain selain BPPPD.
5. Pengenalan tentang Kelitbangan terutama tentang sistem inovasi daerah masih sangat minim.
6. Kurangnya jumlah tenaga Kelitbangan dan tenaga pendukung fungsi Kelitbangan di BPPPD.
7. Belum ada pendidikan dan pelatihan khusus fungsi Kelitbangan.

2.4. Peluang dan Tantangan

2.4.1. Peluang

1. Pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan dengan fungsi perencanaan dalam satu atap BPPPD Kota Cirebon memudahkan terjadinya sinergi antara dua fungsi penunjang tersebut. Diharapkan hasil-hasil Kelitbangan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah dan sebaliknya fungsi Kelitbangan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan fungsi perencanaan yang baik;
2. Peran strategis BPPPD Kota Cirebon tidak hanya terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiahan namun juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan pemerintah daerah. Di awal proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, BPPPD sebagai perangkat litbang daerah berperan dalam memberikan input penyusunan kebijakan, kemudian berperan sebagai katalisator pencapaian sasaran dan pada akhirnya berperan

dalam memberikan evaluasi kebijakan/program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga baik vertikal (nasional dan propinsi) maupun horizontal (lembaga di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon maupun lembaga yang berada di Kota Cirebon). Berbagai kerjasama tersebut meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia maupun aspek program Kelitbangan;
4. Makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi yang mampu menghapus sekat-sekat administratif dan geografis; dan
5. Adanya dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait anggaran penyelenggaraan kegiatan Kelitbangan.

2.4.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi BPPPPD Kota Cirebon dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan antara lain:

1. Adanya perubahan berbagai regulasi berdampak pada penyesuaian berbagai prioritas program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah yang mengharuskan BPPPPD Kota Cirebon mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi Wali Kota;
2. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif untuk menjawab berbagai permasalahan di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
3. Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan menuntut BPPPPD Kota Cirebon untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
4. Globalisasi serta pengaruh dari dunia luar seringkali menyebabkan terjadinya pergeseran ekonomi, sosial dan budaya hingga ketingkat struktur masyarakat terendah (rumah tangga). Hal ini dapat

menimbulkan dampak negatif di masyarakat misalnya dimanfaatkannya Indonesia secara ekonomi sebagai pasar tenaga kerja maupun pasar komoditas asing, hilangnya karakter dan jati diri bangsa dan munculnya kebijakan-kebijakan yang lebih pro asing. Menjadi tantangan bagi lembaga Kelitbangan untuk meminimalisir dampak negatif sekaligus memaksimalkan dampak positif globalisasi dan pengaruh dunia luar.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan setiap program- program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Guna mencapai Visi Kota Cirebon :“**DENGAN NUANSA RELIGIUS KOTA CIREBON MENJADI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN SEJAHTERA**”, arah pembangunan dan strategi jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun (2005-2025) adalah sebagai berikut:

3.2 ARAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah yang meliputi :

- (1) **Arahan umum pembangunan jangka panjang** terutama memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- (2) **Peran subwilayah (WP) atau BWK** pembangunan di daerahnya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- (3) **Tahapan Prioritas Pembangunan** yang menggambarkan indikator yang amat penting dan utama dari setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) Tahun.

3.3.1. Arahan Umum Pembangunan

Dari beberapa literatur pembangunan Kota Cirebon sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan daerahnya didasarkan pada visi dan misi RPJP Kota Cirebon 2005-2025, yaitu :

- (1) Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan atas pengamalan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.
- (2) Terwujudnya kualitas keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat, mantapnya persaudaraan antar umat beragama, berakhlak mulia, toleransi dan damai.
- (3) Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman dalam masyarakat.
- (4) Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
- (5) Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif sosial budaya dalam era globalisasi.
- (6) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dengan seluruh kekuatan kegiatan perekonomian di daerah, terutama pengusaha kecil menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem demokrasi ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (7) Terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.
- (9) Terwujudnya aparatur negara yang bersih dan berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (10) Terwujudnya iklim yang demokratis dan berkualitas guna memperteguh akhlak mulia kreatif inovatif berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia.
- (11) Proaktif bagi kepentingan daerah dalam rangka menghadapi perkembangan global.

Untuk lebih lanjut arah pembangunan untuk setiap bidang pembangunan dapat diperhatikan sebagai berikut:

- (1) Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Cirebon pada saat ini adalah keterbatasan daya dukung lahan atau ruang, kelangkaan sumber air baku, kurangnya pemanfaatan ruang, kualitas dan kapasitas pelabuhan, tingkat pengangguran, dan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia.

- (2) Arah kebijakan strategis pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meliputi penataan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan mutu pendidikan dasar dan menengah, pengembangan mutu layanan kesehatan, pembangunan sarana ekonomi, pembangunan kelembagaan dan pemerintahan, dan pengembangan sikap mental masyarakat dan nilai budaya.
- (3) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang **tata ruang** adalah:
- (a) Berkurangnya kesenjangan antar daerah (antar Kecamatan dan Kelurahan) sehingga dapat bersaing mengikuti perkembangan kawasan-kawasan yang lebih maju.
 - (b) Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesempatan kerja di setiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan).
 - (c) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan secara lebih terkoordinasi dan efektif melalui berbagai program pengembangan wilayah terpadu yang berorientasi pada pengembangan sektor ekonomi lokal.
 - (d) Terencana dan terciptanya sistem melalui tata ruang yang mendukung keamanan dan ketertiban lingkungan dalam mendukung iklim berinvestasi.
 - (e) Berkembangnya lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kota yang dapat meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
 - (f) Meningkatnya pelayanan dasar dan sosial dengan pengoptimalan dalam bidang sarana komunikasi dan informatika.
 - (g) Meningkatnya ruang, sarana dan prasarana kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.
 - (h) Berkembangnya ruang bagi sistem agribisnis dan ketahanan pangan yang terkait dengan pengembangan regional.
 - (i) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan stabilitas ekosistem dan lingkungan hidup.
 - (j) Perencanaan pembangunan reklamasi pantai dapat dijadikan alternatif bagi pengembangan kawasan pantai baik untuk kegiatan ekonomi maupun pariwisata.
 - (k) Tersedia dan tertatanya ruang terbuka hijau atau *bufferzone* sebagai upaya mempertahankan stabilitas lingkungan dan peningkatan sumber daya air bersih.
- (4) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang **Infrastruktur** adalah untuk menyiapkan sarana dan prasarana utilitas masyarakat berupa penyediaan Air Bersih yang mandiri, Sarana dan Prasarana Jalan serta Drainase.
- (5) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang **Pengembangan Mutu Pendidikan/SDM dan Kebudayaan** adalah :
- (a) Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan idiologi

- dan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- (b) Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama;
 - (c) Menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh Kota Cirebon;
 - (d) Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara dengan perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
 - (e) Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam membina, menumbuhkembangkan potensi anak usia dini;
 - (f) Meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga untuk memberikan pelayanan pendidikan diluar pendidikan formal dan mengembangkan potensi pemuda dan olahraga;
 - (g) Menerapkan proses pembelajaran berbasis kompetensi pada semua jenjang pendidikan;
 - (h) Mengoptimalkan kinerja sekolah pada aspek akademis dan non akademis; dan mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
 - (i) Memantapkan keterkaitan dan kesepadanan antara pemerataan dan mutu pendidikan agar dicapai secara simultan dan saling mengisi;
 - (j) Memantapkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunjang kemandirian sekolah;
 - (k) Pelestarian budaya Kota Cirebon dengan pengembangan budaya Cirebon yang lebih kreatif inovatif dan produktif; dan
 - (l) Pengembangan bidang pendidikan bagi generasi muda dan terutama mempertahankan serta mengoptimalkan prestasi dalam bidang olah raga
 - (m) Perlu pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kualitas SDM Kota Cirebon diantaranya dengan pendekatan SEPIA (Spirit, Emotional, Power, Intelegent dan Actions).
- (6) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu **pelayanan kesehatan menyangkut masalah kesehatan** adalah :
- (a) Lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, di dalam program ini penekanan lebih pada sadar lingkungan penataan perumahan dan sanitasi lingkungan, pembinaan masyarakat akan sadar Lingkungan. Di dalam program ini lebih khusus pada pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pembinaan lingkungannya sendiri.
 - (b) Upaya pelayanan kesehatan, diharapkan dalam melaksanakan program ini lebih bersifat preventif, dimana unsur pencegahan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat dikedepankan sehingga peran aktif Pemerintah selaku

- pembuat kebijakan menjadi dominan dalam pembinaan pencegahan penyakit.
- (c) Upaya perbaikan gizi masyarakat, program ini berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita, dimana dalam program ini pembinaannya dilakukan mulai dari bayi sampai manula.
 - (d) Optimalisasi sumber daya kesehatan, perlunya suatu Rencana Induk Kesehatan dimana dalam rencana induk tersebut menyangkut berbagai hal baik itu sarana maupun prasarananya dan akhirnya rencana induk tersebut bisa dikatakan *Blueprint-nya* Dinas Kesehatan Kota Cirebon dalam upaya pengembangan kesehatan di wilayahnya.
 - (e) Upaya pemahaman terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya, program ini diterapkan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Pemerintah dan masyarakat terhadap hal-hal makanan obat yang tidak resmi dan penyalahgunaan narkoba.
 - (f) Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, pengembangan kebijaksanaan ini menyangkut pada pengelolaan kelembagaan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam rangka peningkatan peran dan derajat kesehatan masyarakat.
 - (g) Pengembangan potensi kesejahteraan sosial, merupakan satu upaya peningkatan derajat sosial sehingga derajat kesehatan yang dicita-citakan dapat terjangkau pula namun upaya tersebut perlu dukungan yang luas dari segenap masyarakat. Dalam program ini juga terdapat program ketahanan pangan, penguatan lembaga sosial serta program jaminan sosial.
 - (h) Peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial, di dalam pelaksanaan program pembangunan ini dilakukan berupa peningkatan kemampuan dan profesionalisme para pekerja sosial maupun aparat Pemerintah berupa tugas belajar, sosialisasi, standarisasi pelayanan sosial dan melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (7) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu **Pembangunan Ekonomi** adalah program peningkatan ekonomi wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal, serta penciptaan iklim yang mendukung investor di daerah dan menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Dimana arahan pembangunannya adalah :
- (a) Menyiapkan sarana dan prasarana serta mengembangkan keterpaduan jaringan dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi wilayah;

- (b) Mengembangkan sistem informasi pengembangan ekonomi wilayah, dalam bentuk basis data maupun jaringan promosi dan publikasi;
 - (c) Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan akses bagi daerah untuk mendapatkan modal, alih teknologi, manajemen produksi, dan pemasaran;
 - (d) Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam dan luar negeri untuk pengembangan kawasan, termasuk menyediakan informasi terpadu kemitraan di bidang perdagangan, agrobisnis dan agroindustri;
 - (e) Mengembangkan kelembagaan dan pola kemitraan antar pelaku ekonomi;
 - (f) Mengembangkan area produksi baru dan optimalisasi area atau ruang yang kurang produktif;
 - (g) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - (h) Menumbuhkembangkan potensi ekonomi kota;
 - (i) Meningkatkan aksesibilitas antar daerah (per Kecamatan);
 - (j) Mengembangkan SDM untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan serta pemerataan pelayanan kesehatan;
 - (k) Mengembangkan ekonomi dan pengelolaan SDA sesuai dengan spesialisasi sektor-sektor ekonomi produktif / unggulan dan wilayah yang bersangkutan terutama pada kawasan-kawasan yang berpotensi untuk cepat tumbuh seperti kawasan pelabuhan; dan
 - (l) Mengembangkan kelembagaan melalui pungutan kelembagaan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga seperti kerjasama ekonomi sub-regional, dewan maritim, dewan ketahanan pangan, komite penanggulangan kemiskinan, dan forum kerjasama antar daerah.
- (8) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu **Pembangunan Kelembagaan dan Pemerintahan** adalah menyiapkan kelembagaan Pemerintah dan masyarakat hal andal dalam rangka penyediaan jasa layanan pada masyarakat :
- (a) Meningkatkan profesionalitas; pengetahuan, pemahaman, keterampilan aparatur sebagai upaya supremasi hukum;
 - (b) Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja;
 - (c) Menyusun dan mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi;
 - (d) Penyempurnaan kelembagaan yang efektif dan ramping guna meningkatkan kinerja;
 - (e) Membangun jaringan dan program administrasi komputer (komputerisasi) guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
 - (f) Melakukan penyusunan rencana, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan dan material sarana pemerintahan;

- (g) Melakukan pemeliharaan, perawatan dan penghapusan sarana pemerintahan;
 - (h) Penyampaian informasi dan pengumpulan data dokumentasi sandi dan telekomunikasi yang berbasis IT (*Informations Technology*);
 - (i) Mengoptimalkan jaringan Internet (LAN : Lokal Area Network); dan
 - (j) Menerapkan program manajemen elektronik.
- (9) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu **Pengembangan Kesejahteraan Sosial** adalah :
- (a) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - (b) Pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang refresentatif serta mendukung kondusifitas kerukunan kehidupan beragama di Kota Cirebon
 - (c) Pembangunan serta pemeliharaan sistem pemberian kesempatan dalam peningkatan kualitas dan produktivitas perempuan dalam pembangunan.
 - (d) Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, panyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya;
 - (e) Mempersiapkan kualitas tenaga kerja yang potensial dan produktif terutama dalam bidang perdagangan, perikanan dan industri
 - (f) Mempersiapkan dan membangun pola hubungan atau kerjasama amalgamasi (kerjasama antar daerah) dalam bidang pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan ekonomi lainnya.
 - (g) Pengembangan usaha kecil dan menengah dengan pengembangan kelembagaan melalui koperasi;
 - (h) Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - (i) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
 - (j) Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
 - (k) Program pengembangan sistem informasi masalah sosial, sebagai upaya mengantisipasi pada era globalisasi dengan memberikan kemudahan dalam mengakses ataupun di akses data-data yang diperlukan;
 - (l) Pemantapan upaya pembangunan Keluarga Berencana dengan penguatan pada penerapan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera);
 - (m) Program pemberdayaan keluarga, melakukan sosialisasi mengenai keharmonisan dalam rumah tangga dengan pembinaan terhadap keluarga; dan

- (n) Pengembangan kebudayaan baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional menjadi program tersendiri sebab hal tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan jatidiri dan selalu bangga menjadi Bangsa Indonesia, program pelestarian kebudayaan bangsa ini perlu dilestarikan apalagi di Kota Cirebon yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Upaya pelestarian bangunan bersejarah yang didukung dalam pengembangan lintas dan disinkronkan dengan upaya penataan ruang. Melakukan upaya pembinaan dan penyebarluasan budaya-budaya daerah serta melakukan promosi keluar akan keragaman budaya yang dimiliki oleh Kota Cirebon.

3.3.2. Peran Sub-Wilayah Pembangunan (BWK)

Arah pembangunan 20 Tahun kedepan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dengan menetapkan satuan wilayah pembangunan (WP) atau di Kota Cirebon dikenal dengan istilah BWK.

Rencana pengembangan Sistem BWK pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi setiap BWK / Sub BWK dalam mendukung pengembangan kota secara keseluruhan. Peningkatan peran dan fungsi BWK tersebut dilakukan dengan menetapkan elemen utama dan elemen penunjang di setiap BWK.

Elemen utama adalah jenis kegiatan yang secara dominan mewarnai kinerja pengembangan BWK. Dominasi ini dapat diukur dari luas area, skala pelayanan, maupun dampak tata ruang yang ditimbulkan.

Sedangkan Elemen penunjang adalah elemen yang diharapkan dapat mendukung berkerjanya elemen utama dan atau keberadaannya sudah ada sejak dulu sehingga harus dipertahankan, meskipun tidak secara langsung mendukung elemen utama.

3.3.3. TAHAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Adapun tahapan pembangunan dalam 20 Tahun ke depan sebagai berikut :

- (1) RPJMD Ke-1 (2005 - 2008);
- (2) RPJMD Ke-2 (2008 - 2013);
- (3) RPJMD Ke-3 (2013 - 2018);
- (4) RPJMD Ke-4 (2018 - 2023); dan
- (5) RPJMD Ke-5 (2023 - 2025).

Secara terperinci tahapan demi tahapan pembangunan dalam 20 Tahun ke depan secara periodik dapat dilihat sebagai berikut :

1. RPJMD Ke-1 (2005 – 2008)

Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, pembangunan Kota Cirebon pada tahap ini diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap RPJM ke-1 ditandai dengan peningkatan pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota

Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Dalam aspek kesehatan ditandai dengan perencanaan peningkatan angka harapan hidup yaitu menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon.

Dalam aspek pendidikan ditandai dengan perencanaan peningkatan rata-rata lama sekolah dengan berjalannya program Wajib Belajar 12 Tahun, dan menurunnya angka *drop out* serta menurunnya angka buta huruf. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil Kajian AMDAL.

Aspek peningkatan daya beli masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan/*skills* atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai, pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan gratis, biaya pengobatan atau jaminan kesehatan gratis, pemberian modal serta bimbingan usaha.

Sementara itu aspek supra struktur dan infrastruktur pada tahap ini akan ditandai dengan:

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon
- (2) Mewujudkan Rumah Sakit Murah bagi Masyarakat Kota Cirebon
- (3) Pembangunan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di Setiap Kecamatan
- (4) Pengembangan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di Setiap RW dan Kelurahan
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA) berskala nasional/ internasional
- (6) Melengkapi Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 Tahun.
- (7) Peningkatan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
- (8) Pembentukan dan Pemberdayaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
- (9) Penyediaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik)
- (10) Suporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota Cirebon.
- (11) Keterlibatan aktif Pemerintah terhadap produksi, distribusi dan pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.

- (12) Pembentukan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial.
- (13) Pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (*bufferzone*)
- (14) Pengembangan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan, anak jalanan dan anak terlantar.
- (15) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan.
- (16) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terutama :
a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata Sejarah; d) Wisata Kuliner.
- (17) Pengembangan pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan pedagang kaki lima secara proporsional.
- (18) Penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu di kota dan lintas Kecamatan.
- (19) Peningkatkan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.
- (20) Pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.
- (21) Membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.
- (22) Meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur.
- (23) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (24) Merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.
- (25) Pembangunan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

2. RPJMD Ke-2 (2008 – 2013)

Pada tahap RPJM ke-2 akan ditandai dengan pendalaman pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Dalam aspek kesehatan ditandai dengan pengembangan tingkat angka harapan hidup yaitu menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon.

Dalam aspek pendidikan ditandai dengan pengembangan tingkat rata-rata lama sekolah, yaitu berjalannya program Wajib Belajar 12 Tahun, dan menurunnya angka *drop out* serta menurunnya angka buta huruf. peningkatan pendapatan

perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil Kajian AMDAL.

Pengembangan tingkat daya beli masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan/*skills* atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan gratis, biaya pengobatan atau jaminan kesehatan gratis, pemberian modal serta bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon.
- (2) Mewujudkan Pelayanan Rumah Sakit Murah bagi Masyarakat Kota Cirebon.
- (3) Pembangunan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di setiap Kecamatan.
- (4) Pengembangan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di setiap RW dan Kelurahan.
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA) berskala nasional/ internasional.
- (6) Melengkapi Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 Tahun.
- (7) Peningkatan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
- (8) Pembentukan dan Pemberdayaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).
- (9) Penyediaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik).
- (10) Suporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota Cirebon.
- (11) Keterlibatan aktif Pemerintah terhadap produksi, distribusi dan pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.
- (12) Pembentukan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial.
- (13) Pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (*bufferzone*).
- (14) Pengembangan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan, anak jalanan dan anak terlantar .
- (15) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan.

- (16) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terutama :
 - a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata Sejarah; d) Wisata Kuliner.
- (17) Pengembangan & pemberdayaan pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan pedagang kaki lima secara proporsional.
- (18) Penetapan dan peningkatan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu di kota dan lintas Kecamatan.
- (19) Peningkatkan kualitas dan kuantitas jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.
- (20) Pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.
- (21) Membangun dan perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.
- (22) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan infrastruktur.
- (23) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (24) Merevitalisasi dan merehabilitasi pasar-pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.
- (25) Pembangunan dan pengembangan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

3. RPJMD Ke-3 (2013 – 2018)

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung terhadap pembangunan maka pada tahap RPJM ke-3 akan ditandai dengan terlihatnya peningkatan kualitas pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Dalam aspek kesehatan ditandai dengan pemberdayaan angka harapan hidup yaitu menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon.

Dalam aspek pendidikan ditandai dengan pemberdayaan rata-rata lama sekolah dengan berjalannya program Wajib Belajar 12 Tahun, dan menurunnya angka *drop out* serta menurunnya angka buta huruf. peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil Kajian AMDAL.

Pemberdayaan Daya beli masyarakat akan dengan sendirinya tumbuh dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan/*skills* atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan

gratis, biaya pengobatan atau jaminan kesehatan gratis, pemberian modal serta bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon.
- (2) Perwujudan pelayanan dan pemberdayaan Rumah Sakit Murah bagi Masyarakat Kota Cirebon.
- (3) Pembangunan dan pemberdayaan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di Setiap Kecamatan.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di setiap RW dan Kelurahan.
- (5) Penyediaan dan pemberdayaan prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA) berskala nasional/ internasional.
- (6) Melengkapi dan pemberdayaan Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 Tahun.
- (7) Peningkatan dan pemberdayaan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
- (8) Pembentukan dan Pemberdayaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).
- (9) Penyediaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik).
- (10) Suporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota Cirebon.
- (11) Keterlibatan aktif Pemerintah terhadap produksi, distribusi dan pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.
- (12) Pembentukan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial.
- (13) Pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (bufferzone).
- (14) Pengembangan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan.
- (15) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan.
- (16) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terutama :
a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata Sejarah; d) Wisata Kuliner.
- (17) Akselerasi pengembangan pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan pedagang kaki lima secara proporsional.
- (18) Pemberdayaan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu di kota dan lintas Kecamatan.
- (19) Pemberdayaan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.

- (20) Pemberdayaan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.
- (21) Pemberdayaan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.
- (22) Pemberdayaan dan optimalisasi kapasitas pelayanan infrastruktur.
- (23) Pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja Pemerintah Daerah .
- (24) Modernisasi dan pemeliharaan pasar-pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.
- (25) Pemberdayaan dan optimalisasi sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

4. RPJMD Ke-4 (2018 – 2023)

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung terhadap pembangunan maka pada tahap RPJM ke-4 akan ditandai dengan terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Akselerasi dalam bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon.

Akselerasi dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan berjalannya program Wajib Belajar 12 Tahun, dan menurunnya angka *drop out* serta menurunnya angka buta huruf. Peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil Kajian AMDAL. Akselerasi dalam bidang daya beli masyarakat akan dengan sendirinya tumbuh dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan/*skills* atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan gratis, biaya pengobatan atau jaminan kesehatan gratis, pemberian modal serta bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon.
- (2) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di Setiap Kecamatan.

- (3) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di Setiap RW dan Kelurahan.
- (4) Akselerasi Penyediaan dan pemberdayaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA) berskala nasional/ internasional.
- (5) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 Tahun.
- (6) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
- (7) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
- (8) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik).
- (9) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sistem *suporting* permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota Cirebon.
- (10) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan mekanisme keterlibatan aktif Pemerintah terhadap produksi, distribusi dan pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.
- (11) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial.
- (12) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (*bufferzone*)
- (13) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan
- (14) Akselerasi Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan.
- (15) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terutama : a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata Sejarah; d) Wisata Kuliner.
- (16) Telah mantapnya kondisi pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan pedagang secara proporsional.
- (17) Akselerasi penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu di kota dan lintas kota.
- (18) Akselerasi peningkatkan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.
- (19) Akselerasi Pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/ mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.

- (20) Akselerasi pembangunan dan optimalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.
- (21) Akselerasi dan peningkatan kualitas serta kapasitas pelayanan infrastruktur
- (22) Akselerasi Pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja Pemerintah Daerah .
- (23) Akselerasi dan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.
- (24) Akselerasi pembangunan, pemberdayaan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

5. RPJMD Ke-5 (2023 – 2025)

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung terhadap pembangunan maka pada tahap RPJM ke-5 akan ditandai dengan terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Pemantapan dalam bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon.

Pemantapan dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan berhasil dan tuntasnya program Wajib Belajar 12 Tahun, dan tidak adanya angka *drop out* serta tidak adanya lagi angka buta huruf. peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Pemantapan dalam bidang daya beli masyarakat akan dengan sendirinya tumbuh dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan/*skills* atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan produksi serta pemasaran serta pemberian pinjaman modal serta bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon.
- (2) Pemantapan dan pemeliharaan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di Setiap Kecamatan.

- (3) Pemantapan, pemeliharaan dan pemberdayaan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di Setiap RW dan Kelurahan.
- (4) Pemantapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA) berskala internasional.
- (5) Pemantapan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 Tahun.
- (6) Pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
- (7) Pemantapan dan pemeliharaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) .
- (8) Pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik).
- (9) Pemantapan dan pemeliharaan sistem *suporting* permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota Cirebon.
- (10) Pemantapan dan pemeliharaan mekanisme keterlibatan aktif Pemerintah terhadap produksi, distribusi dan pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.
- (11) Pemantapan dan pemeliharaan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial.
- (12) Pemantapan dan pemeliharaan sistem pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (*bufferzone*).
- (13) Pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan.
- (14) Pemantapan dan pemeliharaan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan.
- (15) Pemantapan, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terutama : a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata Sejarah; serta d) Wisata Kuliner.
- (16) Pemantapan dan pemeliharaan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu di kota dan lintas kota.
- (17) Pemantapan dan pemeliharaan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.
- (18) Pemantapan pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.
- (19) Pemantapan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.
- (20) Pemantapan dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur .
- (21) Pemantapan Pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja Pemerintah Daerah.

- (22) Pemantapan dan pemeliharaan serta terus merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.
- (23) Pemantapan, pemeliharaan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

Semua program di atas sangat bijaksana apabila benar-benar menjadi konsentrasi guna menunjang Kota Cirebon sebagai kota yang menyokong industri, perdagangan dan jasa yang maju dan religius sebagai sektor unggulan.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

3.4.1 Arah Kebijakan

Keberadaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (Kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Fungsi Kelitbangan di Kota Cirebon dilaksanakan melalui penyelenggaraan 7 kegiatan yang disebut sebagai Kelitbangan utama yang terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan Kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, *outcome*, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selain itu, perangkat litbang daerah di Kota Cirebon juga melaksanakan Kelitbangan pendukung yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Kelitbangan utama. Kegiatan Kelitbangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Tabel 3.3. Jenis Kelitbangan utama dan keluarannya

No	Jenis	Keluaran
1.	Penelitian	Rekomendasi
2.	PengKajian	Rekomendasi
3.	Pengembangan	Naskah Akademis, Ranc. Regulasi, Pemodelan Kebijakan/Program
4.	Perekayasa	Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan
5.	Penerapan	Uji coba Model Kebijakan/Program pada daerah percontohan
6.	Pengoperasian	Penerapan Model Kebijakan/Program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7.	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi (lanjut dengan perbaikan atau dicabut)

Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016

Kebijakan Kelitbangan adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh Perangkat litbang daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan visi “*Sehati kita wujudkan Cirebon sebagai Kota Kreatif berbasis budaya dan sejarah*” serta strategi kebijakan daerah dan rencana program prioritas. Terdapat 3 aspek penting yang menjadi arah penyelenggaraan Kelitbangan di Kota Cirebon yaitu :1). penguatan kebijakan berbasis Kelitbangan; 2) penguatan inovasi; dan 3) penguatan kelembagaan Kelitbangan. Oleh karena itu, kebijakan Kelitbangan di lingkup Pemerintah Kota Cirebon diarahkan untuk :1). mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2) mendorong penguatan dan penciptaan inovasi; dan 3) mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kebijakan kesatu yang berfokus pada aspek penguatan kebijakan berbasis Kelitbangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi kedua Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif sehingga indikator Kelitbangan terkait yaitu persentase hasil Kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat tercapai. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/3522/SJ tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah disebutkan bahwa kegiatan Kelitbangan di daerah dilaksanakan secara satu pintu di perangkat litbang daerah.

Pelaksanaan Kelitbangan secara satu pintu bukan berarti bahwa perangkat litbang daerah menjadi satu-satunya pelaksana Kelitbangan di daerah. Kelitbangan dapat dilakukan di masing-masing perangkat daerah namun harus direncanakan dan dikoordinir oleh perangkat litbang daerah dan topik-topik Kelitbangan harus sesuai dan mengacu

pada rencana induk Kelitbangan. Kelitbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah harus sesuai dan menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut misalnya pengukuran, pengambilan data, survey yang bersifat rutin/reguler, naskah akademik, studi kelayakan dan sebagainya.

Perangkat daerah tersebut telah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang mencukupi. Selanjutnya Kelitbangan yang dilaksanakan perangkat daerah dilaporkan dan dinventarisir oleh perangkat litbang daerah untuk kelengkapan database Kelitbangan dan pada akhirnya dapat diketahui persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah. Pelaksanaan Kelitbangan secara satu pintu bertujuan untuk menghindari duplikasi, meningkatkan sinkronisasi, dan agar efektif dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Kebijakan kedua yang berfokus pada aspek penguatan inovasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi pertama yaitu Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala Bidang , misi kedua yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif, misi ketiga yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan dan misi keempat yaitu Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif sehingga indikator Kelitbangan yang terkait yaitu persentase inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah (SIDa) dapat tercapai.

Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam segala bidang. Sasaran inovasi daerah antara lain : 1). pengembangan kreativitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berorientasi inovasi; 2). terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah; 3). terselenggaranya upaya menumbuhkan kembangkan inovasi di daerah; 4). terbudayakannya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 5). terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, manajemen Pemerintah Daerah, aktivitas perekonomian daerah, dan aktivitas masyarakat; dan 6). peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : 1). peningkatan pelayanan publik;

2). pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan 3). peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan 8 prinsip yaitu : 1). peningkatan efisiensi; 2). perbaikan efektivitas; 3). perbaikan kualitas pelayanan; 4). tidak menimbulkan konflik kepentingan; 5). berorientasi kepada kepentingan umum; 6). dilakukan secara terbuka; 7). memenuhi nilai kepatutan; dan 8). dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Bentuk-bentuk inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu : 1). inovasi tata kelola Pemerintah Daerah; 2). inovasi pelayanan publik; dan/atau 3). Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan ketiga yang berfokus pada aspek penguatan kelembagaan Kelitbangan diarahkan agar perangkat litbang daerah mampu berjalan secara mandiri maupun bersama-sama dengan institusi/lembaga Kelitbangan (perguruan tinggi, lembaga penelitian, dewan riset daerah, dll) mampu menjalankan fungsi Kelitbangan dan berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasi inovasi daerah.

Penguatan kelembagaan Kelitbangan bersifat ke dalam yang artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah memiliki sumber daya yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. Penguatan kelembagaan bersifat keluar artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah harus dapat merangkul dan bekerjasama dengan semua pihak maupun lembaga agar fungsi Kelitbangan dapat dilaksanakan secara optimal.

3.4.2 Strategi

Dengan memperhatikan arah kebijakan Kelitbangan maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan Kelitbangan dan inovasi daerah di Kota Cirebon dapat tercapai.

1. Arah kebijakan Kelitbangan untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:
 - a. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya berkenaan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang menjadi kebutuhan perangkat daerah;
 - b. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan

regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta meminimalisir “Perda bermasalah”;

- c. Pelaksanaan kegiatan Kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah;
- d. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang; dan
- e. Asistensi penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD, dan APBD serta evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahun.

2. Arah kebijakan Kelitbangan untuk mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:

- a. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di daerah;
- b. Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi di daerah yang bersumber dari hasil inovasi dan difusi; dan
- c. Evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.

3. Arah kebijakan Kelitbangan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan diwujudkan melalui strategi antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan, khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap melalui rekrutmen reguler, alih fungsi dan/atau *inpassing* sesuai ketentuan perundang-undangan (diutamakan berkualifikasi pendidikan S2 dan S3);
- b. Peningkatan kualitas dan sinergitas program Kelitbangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
- c. Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon maupun institusi/lembaga Kelitbangan lain terutama dalam pemecahan permasalahan melalui pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan;

- d. Memenuhi kelengkapan organisasi Kelitbangan (Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan);
- e. Diseminasi dan publikasi hasil-hasil Kelitbangan; dan
- f. Peningkatan fasilitas pendukung Kelitbangan (*website, open journal system*, perpustakaan, aplikasi Kelitbangan, dan lain-lain).

Tabel 3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELITBANGAN

No.	Arah Kebijakan	Misi RPJMD yg Didukung	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke -					Program Prioritas Kelitbangan
						1	2	3	4	5	
1.	mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Misi ke 2 "Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif".	a. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, khususnya berkenaan dengan program legislasi daerah (Prolegda) yang menjadi kebutuhan perangkat daerah;	Meningkatnya kualitas hasil Kegiatan Kelitbangan untuk kebijakan pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah (jumlah hasil Kelitbangan yang ditindak lanjuti)	40	50	60	70	80	1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			b. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminimalisir "Perda bermasalah";								2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
			c. Pelaksanaan kegiatan Kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah;								3. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah
			d. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang; dan								



No.	Arah Kebijakan	Misi RPJMD yg Didukung	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke -					Program Prioritas Kelitbangan
						1	2	3	4	5	
2.	mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan	Seluruh Misi	a. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di daerah;	Meningkatnya inovasi daerah bagi kemajuan masyarakat	1. Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi system inovasi daerah (SIDa) (Jumlah Inovasi yang menjadi sistem Inovasi daerah)	1	1	1	1	1	1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek
			b. Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi di daerah yang bersumber dari hasil invensi dan difusi; dan		2. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI (jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI target 1)	0	0	0	1	1	
			c. Evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.								
			d. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelitbangan, khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap melalui rekrutmen reguler, alih fungsi dan/atau <i>inpassing</i> sesuai ketentuan perundang-undangan (diutamakan berkualifikasi pendidikan S2 dan S3);	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan jaringan Kelitbangan	1. Jumlah kerja sama Kelitbangan yang dilakukan	1	1	1	1	1	



No.	Arah Kebijakan	Misi RPJMD yg Didukung	Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke -					Program Prioritas Kelitbangan
						1	2	3	4	5	
			e. Peningkatan kualitas dan sinergitas program Kelitbangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan;		2. Jumlah publikasi hasil Kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional	1	1	1	1	1	
			f. Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kota Cirebon maupun institusi/lembaga Kelitbangan lain terutama dalam pemecahan permasalahan melalui pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan.		3. Persentase pejabat fungsional peneliti dan perekayasa yang berkualifikasi	0	1	1	2	2	
			g. Memenuhi kelengkapan organisasi Kelitbangan (Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu & TimKelitbangan);								
			h. Diseminasi dan publikasi hasil-hasil Kelitbangan;dan								
			i. Peningkatan fasilitas pendukung Kelitbangan (<i>website, open journal system, perpustakaan, aplikasi Kelitbangan,dll</i>).								

Keterangan :
7 kegiatan
Kelitbangan

Output :

Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan,
Pengoperasian, evaluasi kebijakan
Rekomendasi, Naskah Akademis, Ranc. Regulasi, Pemodelan Kebijakan, Pedoman Umum/Teknis, Uji Coba Model,
Penerapan Model Kebijakan.

3.5 Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Indikasi program-program prioritas Kelitbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) misi pembangunan daerah; 2) urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 3) program prioritas dan program unggulan daerah; dan 4) isu-isu strategis.

Selanjutnya, program-program prioritas Kelitbangan daerah dikelompokkan dalam 4 bidang yaitu : (i) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; (ii) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; (iii) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; dan (iv) Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek. Pengelompokan 4 bidang prioritas Kelitbangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 serta disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat litbang daerah.

Dalam bagian ini juga ditampilkan kebutuhan ideal Pejabat Fungsional Peneliti guna mendukung optimalisasi fungsi Kelitbangan yang dilaksanakan oleh. Salah satu isu penting terkait fungsi Kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan inovasi daerah adalah luasnya cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta banyaknya program-program unggulan maupun strategis yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Dari sisi ini, dapat dilihat masih belum berimbangnya jumlah sumber daya Kelitbangan terutama Pejabat Fungsional Peneliti dengan fungsi Kelitbangan yang harus didukung. Guna mengatasi hal tersebut maka perlu adanya pengadaan Pejabat Fungsional Peneliti dengan kepakaran diarahkan untuk menunjang pencapaian program-program prioritas Kelitbangan daerah.

3.6 Program-program prioritas RIK Kota Cirebon Tahun 2018-2023

1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
3. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek



PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome di Akhir Periode Tahun ke 5 : Jumlah rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan 80 %.

Kegiatan :

- 3.6.1.1 Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah.
- 3.6.1.2 Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM
- 3.6.1.3 Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik

Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
PENDIDIKAN					
Akses Layanan Pendidikan Terbatas Terutama di Kawasan Selatan	Penataan Layanan satuan pendidikan menyangkut distribusi, pembangunan sarana prasarana dan pemanfaatan fasilitas untuk akses pendidikan	Melakukan kajian kebutuhan sarana, prasarana dan lokasi pendidikan di kawasan selatan	kajian kebutuhan sarana, prasarana dan lokasi pendidikan di kawasan selatan	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan
		Melakukan kajian kebutuhan akses sarana transportasi di kawasan selatan	kajian kebutuhan akses sarana transportasi di kawasan selatan	1 Dokumen kajian	
	Pemenuhan kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan	Melakukan kajian pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan jenjangnya sesuai standar nasional pendidikan di kawasan selatan	kajian pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan jenjangnya sesuai standar nasional pendidikan di kawasan selatan	1 Dokumen kajian	Misi 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala Bidang



Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Kesehatan					
Antrian pasien dalam memperoleh layanan kesehatan di RSGJ	Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Melakukan Kajian Pelayanan antrian Kesehatan di RSGJ	Kajian Pelayanan Kesehatan di RSGJ	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program bantuan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan perumahan melalui pembangunan rumah susun belum bisa dilaksanakan	Perlunya tindak lanjut penertiban tanah timbul	Melakukan Kajian Penertiban Tanah Timbul	Kajian Penertiban Tanah Timbul	1 Dokumen kajian	Misi 2 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif
Sosial					
Kurangnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penyusunan standar baku penanganan bencana	Melakukan Kajian Standar Baku Penanganan Bencana	Kajian Standar Baku Penanganan Bencana	1 Dokumen kajian	Misi 2 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif



Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Perhubungan					
Pelayanan Angkutan Umum belum optimal	Peningkatan kenyamanan dan keamanan angkutan umum	Melakukan Kajian Peningkatan kenyamanan dan keamanan angkutan umum	Kajian Peningkatan kenyamanan dan keamanan angkutan umum	1 Dokumen kajian	Misi 4 Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif.
	Perlunya perluasan car free day dan kampanye tertib lalulintas lainnya	Melakukan Kajian perluasan car free day dan kampanye tertib lalulintas lainnya	Kajian perluasan car free day dan kampanye tertib lalulintas lainnya	1 Dokumen kajian	
	Penataan pedestrian dan pengembalian fungsi trotoar	Melakukan Kajian Penataan pedestrian dan pengembalian fungsi trotoar	Kajian Penataan pedestrian dan pengembalian fungsi trotoar	1 Dokumen kajian	
	Perlunya ada insentif bagi pembangunan gedung / kantong parkir	Melakukan Kajian insentif bagi pembangunan gedung / kantong parkir	Kajian insentif bagi pembangunan gedung / kantong parkir	1 Dokumen kajian	
Keuangan					
Masih tingginya ketergantungan daerah dengan bantuan dari pusat	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Melakukan Kajian Tata Kelola Pendapatan Daerah	Kajian Tata Kelola Pendapatan Daerah	1 Dokumen kajian	Misi 2 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif



PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Outcome di Akhir Periode Tahun ke 5 : Jumlah rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan 80 %.

Kegiatan :

3.6.1.4 Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan

3.6.1.5 Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat.

Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program bantuan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan perumahan melalui pembangunan rumah susun belum bisa dilaksanakan	Penyediaan lahan untuk pengembangan rumah susun	Melakukan kajian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir	kajian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.
		Melakukan kajian pengembangan rumah susun kota	kajian pengembangan rumah susun kota	1 Dokumen kajian	
Sosial					
Kurangnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS	Melakukan Kajian Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kajian Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Dokumen kajian	Misi 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala Bidang



Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Belum optimalnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan	Evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan pola penanganan bantuan sosial dan hibah	Melakukan Kajian Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Melakukan Kajian Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	1 Dokumen kajian	Misi 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala Bidang
Masih rendahnya produktivitas padi di daerah tanah hujan Argasanya (Heru Herwanto)	Pemberdayaan keluarga tani padi dalam rangka peningkatan produktifitas padi melalui pembuatan saluran irigasi	Melakukan kajian	Kajian	1 Dokumen	Misi 3
Pemberdayaan Masyarakat dan Koprasi Usaha Kecil Menengah dengan Kelautan dan Perikanan (Ria Adriyani)	Kolaborasi ketiga urusan demi menunjang pariwisata	Kajian minat wisatawan kembali ke Cirebon sebagai kota wisata	Kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk penyediaan produk oleh-oleh khas Cirebon	Survei Lapangan	Meningkatkan kualitas SDM di bidang produk-produk pariwisata
	Optimalisasi pengolahan hasil perikanan untuk dikelola masyarakat dalam bentuk produk unggulan daerah	Perhatian pada produk hasil pemberdayaan masyarakat di tunjang inovasi	Produk unggulan yang jadi “branding” Kota Cirebon yang asli diproduksi untuk masyarakat Kota Cirebon	Membangun industri Krupuk Cirebon	Mewujudkan sarana penunjang bidang pariwisata



PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Outcome di Akhir Periode Tahun ke 5 : Jumlah rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan 80 %.

Kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah.
2. Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus

Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Pertanahan					
Pemenuhan RTH Publik 20%	Kebutuhan lahan untuk RTH Publik pada wilayah yang diprioritaskan	Melakukan kajian Kebutuhan lahan untuk RTH Publik pada wilayah yang diprioritaskan	kajian Kebutuhan lahan untuk RTH Publik pada wilayah yang diprioritaskan	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.
Lingkungan Hidup					
Volume sampah secara umum lima tahun terakhir mengalami peningkatan	Optimalisasi sarana prasarana penanganan sampah baik di TPS maupun di TPA	Melakukan kajian Optimalisasi sarana prasarana penanganan sampah baik di TPS maupun di TPA	kajian Optimalisasi sarana prasarana penanganan sampah baik di TPS maupun di TPA (melakukan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah) program prioritas 2	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.



Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Belum optimalnya penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota	Meningkatkan Kerjasama dengan pihak CSR secara kontinyu	Melakukan Kajian Kerjasama dengan pihak CSR dalam hal penataan sektor informal	Kajian Kerjasama dengan pihak CSR dalam hal penataan sektor informal	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.
Kurangnya minat berinvestasi di Kota Cirebon	Penerapan insentifikasi dan disinsentifikasi pada investasi dan penanaman modal	Melakukan Kajian Penerapan insentifikasi dan disinsentifikasi pada investasi dan penanaman modal	Kajian Penerapan insentifikasi dan disinsentifikasi pada investasi dan penanaman modal	1 Dokumen kajian	Misi 2 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif.
	Peningkatan perangkat sistem informasi terintegrasi akan pelayanan perizinan.	Melakukan kajian efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Cirebon.	Kajian efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Cirebon	1 Dokumen kajian	
Kelautan dan Perikanan					
Belum Optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Melakukan Kajian Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Kajian Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	1 Dokumen kajian	Misi 2 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif.



PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN IPTEK

Outcome di Akhir Periode Tahun ke 5 : Jumlah rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan 80 %.

Kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah. (catatan yg kerjasama dan HAKI dan Sida belum ada di OUTPUT)

Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan dan penyelesaian titik-titik genangan air	Melakukan kajian pencegahan dan penanggulangan genangan pada beberapa titik.	Kajian pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan
			Kajian penerapan berorientasi dimedia jalan pada beberapa ruas jalan di Kota Cirebon	1 Dokumen kajian	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
Penanganan waktu tanggap darurat (response time) kebakaran belum dicapai secara maksimal	Peningkatan debit air untuk memenuhi kebutuhan peralatan dalam mengatasi bencana kebakaran	Melakukan Kajian debit air untuk memenuhi kebutuhan peralatan dalam mengatasi bencana kebakaran	Kajian debit air untuk memenuhi kebutuhan peralatan dalam mengatasi bencana kebakaran	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan
Lingkungan Hidup					
Masih adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan	Konservasi lahan eks-galian C dan alih fungsi kegiatan wisata dan pertanian	Melakukan Kajian Konservasi dan Penataan Lahan	Kajian Konservasi dan Penataan Lahan	1 Dokumen kajian	Misi 3 Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan
	Konservasi pesisir pantai				



Permasalahan Pokok RPJMD	Isu Strategis RPJMD	STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	MISI RPJMD
URUSAN					
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)	Penyediaan Grand Design Pengendalian Penduduk	Melakukan Kajian Grand Design Pengendalian Penduduk	Kajian Grand Design Pengendalian Penduduk	1 Dokumen kajian	Misi 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala Bidang
Perhubungan					
Pelayanan parkir belum optimal	Perlunya pemasangan mesin elektronik untuk mengkoneksikan data parkir off street dengan dinas terkait sehingga data pungutan menjadi riil	Melakukan Kajian mesin elektronik untuk mengkoneksikan data parkir off street dengan dinas terkait sehingga data pungutan menjadi riil	Kajian mesin elektronik untuk mengkoneksikan data parkir off street dengan dinas terkait sehingga data pungutan menjadi riil	1 Dokumen kajian	Misi 2 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif
	Kurangnya lahan parkir pada kawasan pusat kota.	Melakukan Kajian Pemanfatan Lahan Kota untuk Perparkiran	Kajian Pemanfatan Lahan Kota untuk Perparkiran	1 Dokumen kajian	



Tabel 3.12. Proyeksi Kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti

BIDANG	Kondisi Sekarang		Kondisi Minimal	
	Jumlah Orang	Kepakaran	Jumlah Orang	Kepakaran(Tambahan)
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	▪	5	<ul style="list-style-type: none">▪ Administrasi Publik▪ Demografiformal▪
Sosial dan Kemasyarakatan	0		3	<ul style="list-style-type: none">□ □ Sosiologiumum▪ Kesejahteraan Sosial▪ Demografisocial
Ekonomi dan Pembangunan Daerah	0		5	<ul style="list-style-type: none">▪ Ekonomiregional▪ Ekonomikerakyatan▪ ManajemenPariwisata▪ Perencanaan Wilayah▪ Perencanaan Dan Perancangan kota▪ Geografi▪ Tekhnik transportasi jalan
Inovasi dan Pengembangan Iptek	0		4	<ul style="list-style-type: none">▪ Manajemen penelitian dan pengembangan, tekhnologi, dan inovasi▪ Kebijakan Iptek dan Inovasi

Sumber : Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Rencana induk penelitian ini diharapkan dapat mengatur distribusi sumber daya secara rasional di semua ranah Kelitbangan untuk meminimalisir potensi tumpang tindih yang berlebihan serta menempatkan setiap aktor sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Seluruh upaya dan strategi ini bermuara pada peningkatan kontribusi Kelitbangan terhadap pembangunan daerah Kota Cirebon.

Dalam menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diperlukan kerjasama terintegrasi antara perangkat daerah dengan BPPPPD. Kerjasama ini secara internal merupakan bagian penguatan kelembagaan yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dan aplikasi hasil penelitian di perangkat daerah terkait. Koordinasi antar instansi dapat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan dan sekaligus penggunaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh BPPPPD.

Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian di daerah, setiap perangkat daerah harus dapat menjalankan mekanisme dan proses Kelitbangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas Kelitbangan pada masing-masing perangkat daerah. Pengajuan pelaksanaan Kelitbangan oleh perangkat daerah kepada BPPPPD ditentukan melalui kajian dampak terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Prioritas-prioritas Kelitbangan perangkat daerah mengacu pada pencapaian visi misi Kota Cirebon melalui pelaksanaan program-program unggulan dan prioritas yang berbasis Kelitbangan dan berdampak sistematis, konstruktif, berskala

luas sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelarasan Kelitbangan dari isu-isu pembangunan menuntut penyelarasan dan kerja sama yang bersifat multi-aktor. Artinya, diperlukan sinergi dari aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Untuk dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan daerah. Kesadaran koordinasi lintas sector dan juga lintas lembaga menjadi satu keharusan.

Koordinasi ini seyogyanya menimbulkan sinergi positif dalam mewujudkan ide atau konsep yang ditetapkan dalam ranah kebijakan kemudian diterjemahkan oleh satu tatanan kelembagaan untuk selanjutnya terumuskan dalam rencana dan program, sebagaimana yang diwujudkan dalam rencana strategis Kota Cirebon secara umum atau lembaga-lembaga/perangkat daerah terkait. Program-program tersebut diwujudkan sebagai pengejawantahan kegiatan pembangunan berbasis iptek dan inovasi.

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Keterlibatan institusi Kelitbangan bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Kelitbangan Daerah Kota Cirebon, peningkatan kuantitas dan kualitas Kelitbangan serta kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa yang dilakukan oleh BPPPPD Kota Cirebon tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari unsur-unsur di dalam maupun di luar, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan hasil-hasil Kelitbangan dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih terarah dan menghasilkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan institusi Kelitbangan dalam pelaksanaan Kelitbangan di Kota Cirebon dapat dilakukan melalui dukungan sumberdaya manusia, upaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas Kelitbangan, evaluasi hasil Kelitbangan, dukungan sarana dan prasarana Kelitbangan serta pengembangan manajemen Kelitbangan untuk mendukung implementasi pembangunan di Kota Cirebon. Di lingkup Kota Cirebon terdapat beberapa institusi/lembaga Kelitbangan yang sebagian besar berupa perguruan tinggi keagamaan, kesehatan dan umum.

Perguruan tinggi yang berada di Kota Cirebon berperan strategis terutama dalam mendukung pelaksanaan misi kedua pembangunan daerah 2018-2023. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih membutuhkan penanganan yang serius bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Oleh karena itu dukungan perguruan tinggi kesehatan khususnya dalam bentuk kerjasama Kelitbangan sangat diperlukan. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan perguruan tinggi keagamaan sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan misi. Keberadaan perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mendukung inovasi Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi (*e-government*).

Institusi Kelitbangan yang berlokasi di Kota Cirebon disajikan pada Tabel 4.1. sedangkan persebaran lokasi institusi Kelitbangan disajikan pada Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Institusi Kelitbangan di Kota Cirebon

NO	Nama	Alamat
1	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (IAIN)	Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
2	Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati)	Jl. Pemuda nomor 32 Cirebon
3	Universitas 17 Agustus 1945 (Untag)	Jl. Perjuangan No 17 By Pass Cirebon



4	Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon (STTC)	Jl. Evakuasi Nomor 11 Cirebon
5	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	Jl. Pemuda Nomor 38 Cirebon
6	Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Mahardika	Jl. Terusan Sekar Kemuning No 199 KaryaMulya Evakuasi Cirebon
7	Politeknik Pariwisata Prima Internasional	Jl. Perjuangan No. By Pass Cirebon
8	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	Jl. Monumen No 1 Brigjen Dharsono By Pass Cirebon

Keterlibatan Tim Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, dan Tim Kelitbangan harus terus diperkuat, salah satunya dalam bentuk pemilihan anggota tim yang memiliki kualifikasi pendidikan mencukupi (S2 atau S3) serta memiliki keahlian yang mendukung dengan bidang-bidang prioritas Kelitbangan.

Keterlibatan institusi Kelitbangan vertikal seperti Badan Litbang Provinsi Jawa Barat dan Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri diperlukan agar arah kebijakan dan strategi Kelitbangan antara pusat dan daerah dapat selaras. Kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku instansi pembinaan jabatan peneliti maupun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku instansi pembinaan jabatan perekayasa perlu terus dikuatkan terutama dalam upaya pengembangan kapasitas sumberdaya manusia Kelitbangan serta pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan untuk diterapkan di Kota Cirebon.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPPPD Kota Cirebon dalam menghasilkan hasil Kelitbangan yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan program maupun sebagai evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah dapat ditunjang melalui integrasi seluruh komponen-komponen pelaksana Kelitbangan di daerah, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, BPPPPD sebagai perangkat litbang daerah perlu terus mendorong dan menciptakan atmosfer yang mendukung adanya keterlibatan institusi-institusi Kelitbangan yang ada.

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Kerjasama dan sinergitas pelaksanaan Kelitbangan di BPPPPD Kota Cirebon ditetapkan berdasarkan prioritas Kelitbangan dan instansi/institusi yang berkompeten memberikan kontribusi. Kompetensi sumberdaya manusia Kelitbangan khususnya peneliti dan perekayasa merupakan bagian strategi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah. Selain itu pelaksanaan Kelitbangan sangat tergantung anggaran

yang proporsional dan kuantitasnya. Sumber-sumber pendanaan Kelitbangan dapat berasal dari APBD, APBN, hibah-hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama Kelitbangan berdasarkan prioritas Kelitbangan yang terkait dengan isu-isu strategis dan prioritas Kelitbangan Kota Cirebon. Isu strategis dan prioritas Kelitbangan dapat diajukan secara mandiri maupun usulan kegiatan dari perangkat daerah atau instansi-instansi terkait. Sinergitas pelaksanaannya ditentukan oleh skala Kelitbangan (sederhana kompleks) yang akan melibatkan dua atau lebih lembaga/instansi yang saling bekerjasama dalam kegiatan Kelitbangan.

Keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan Kelitbangan, mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasinya diharapkan dapat memunculkan satu hasil Kelitbangan yang dapat digunakan dalam menunjang program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kelitbangan yang dapat diterapkan dapat diproduksi melalui kerjasama yang apik antara lembaga/instansi. Penguatan Kelitbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema-tema yang sinkron dengan program-program Pemerintah Daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan Kelitbangan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih terasa, menjadi hal yang sangat penting.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Dalam upaya tersedianya hasil Kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup BPPPPD Kota Cirebon. Salah satu hal yang telah direalisasikan adalah melengkapi keorganisasian Kelitbangan di Kota Cirebon. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian Kelitbangan di kabupaten/kota yang terdiri dari : i) Majelis Pertimbangan Kelitbangan; ii) Tim Pengendali

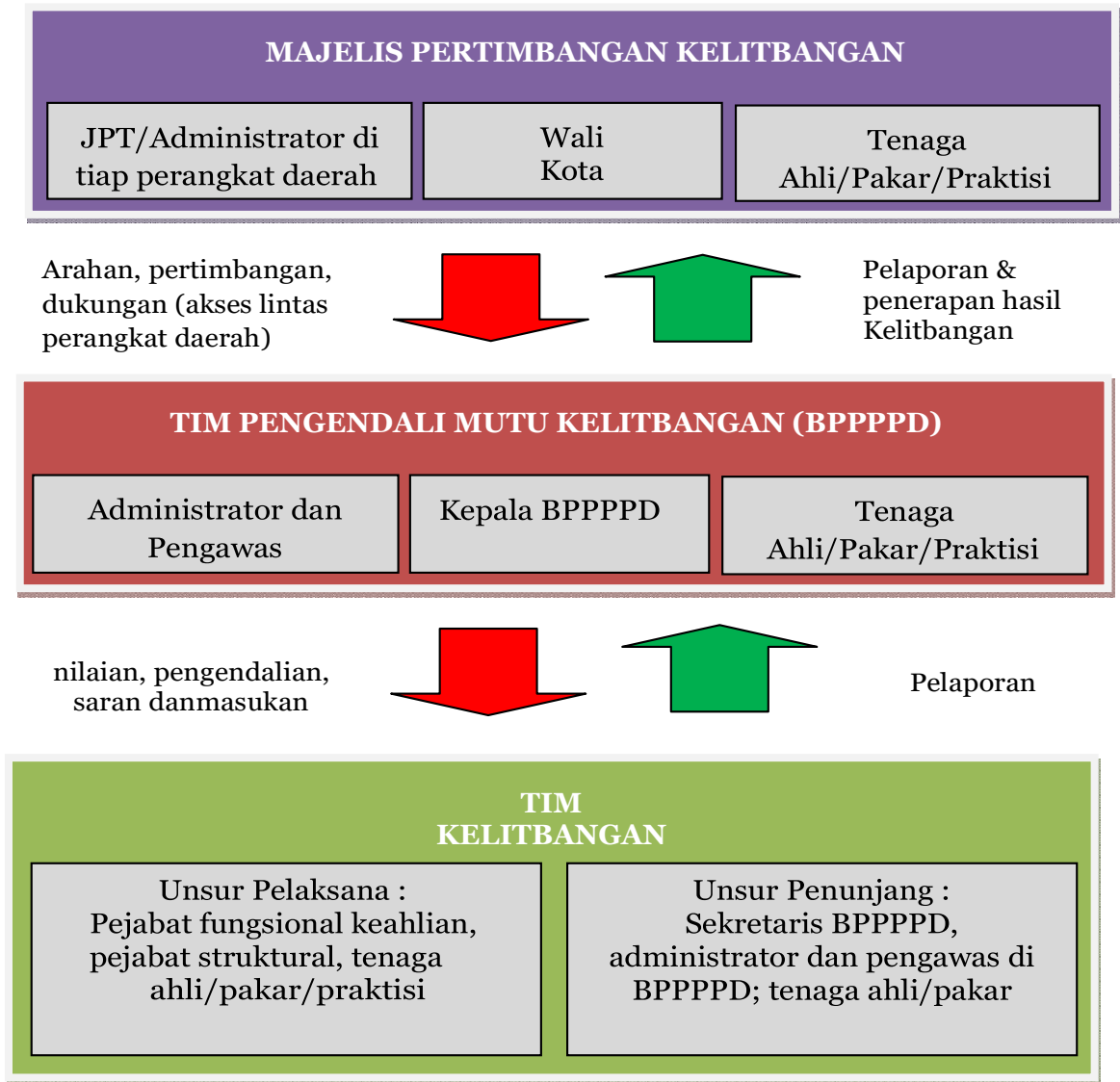
Mutu Kelitbangan; dan iii) Tim Kelitbangan.

Salah satu sebab belum optimalnya penerapan hasil-hasil Kelitbangan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah karena tidak terkaitnya proses pelaksanaan Kelitbangan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kota Cirebon. Hingga saat ini, telah terbentuk Tim Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan yang tugasnya lebih bersifat teknis yaitu melaksanakan Kelitbangan sesuai dengan norma, metodologi, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan Kelitbangan secara berkala kepada Kepala Perangkat Litbang Daerah (BPPPPD). Terbentuknya Majelis Pertimbangan Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Kelitbangan dan pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan.

Majelis Pertimbangan Kelitbangan beranggotakan Wali Kota, pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang dibantu tenaga ahli/pakar/praktisi. Fungsi Majelis Pertimbangan Kelitbangan sangat strategis dalam menentukan efektifitas Kelitbangan daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan *ex-ante* artinya dukungan sebelum kegiatan Kelitbangan berlangsung berupa arahan agar topik-topik Kelitbangan termasuk di dalamnya inovasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kebutuhan perangkat daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan Kelitbangan dalam bentuk akses pada setiap aspek penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan Kelitbangan dapat berjalan dengan optimal. Majelis Pertimbangan juga memberi dukungan *ex- post* yang artinya dukungan setelah kegiatan Kelitbangan berakhir berupa dukungan pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil Kelitbangan sebagai basis setiap kebijakan daerah.

Tim Pengendali Mutu Kelitbangan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama (Kepala BPPPPD), Pejabat Administrator dan Pengawas di Perangkat Litbang Daerah (BPPPPD) yang dibantu dengan tenaga ahli/pakar/praktisi. Tugas Tim Pengendali Mutu Kelitbangan berfokus pada upaya agar kegiatan Kelitbangan dapat berjalan sesuai arahan Majelis Pertimbangan Kelitbangan serta efektif dalam alokasi penganggaran dan durasi waktu pelaksanaan. Tim Pengendali Mutu mengevaluasi dan menilai kegiatan Kelitbangan sekaligus memberikan dukungan teknis antara lain anggaran, sarana dan prasarana sehingga kegiatan Kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil optimal. Alur koordinasi dan pengendalian Kelitbangan di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon diperlihatkan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Alur koordinasi dan pengendalian Kelitbangan Kota



Alur koordinasi dan pengendalian Kelitbangan dimulai dari pengusulan kegiatan Kelitbangan dari masing-masing perangkat daerah ke perangkat litbang daerah (BPPPPD). Tim Kelitbangan melakukan tugas dan fungsinya dengan output tema dan usulan kegiatan Kelitbangan yang disesuaikan dengan program/tema/kegiatan prioritas Kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Keseluruhan usulan diajukan kepada Tim Pengendali Mutu untuk mendapatkan saran dan masukan serta penilaian kelayakan kegiatan Kelitbangan yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, usulan yang telah mendapatkan penilaiandari Tim Pengendali Mutu diajukan dalam Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan yang wajib dilaksanakan satu tahun sekali. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberikan arahan agar seluruh usulan Kelitbangan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan mendukung visi dan misi Wali Kota.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan keunggulan Kelitbangan dan inovasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kelitbangan khususnya pejabat fungsional peneliti dan perekayasa, dan mengefisiensikan tata kelola Kelitbangan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon, maka disusunlah Rencana Induk Kelitbangan yang merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah khususnya BPPPPD Kota Cirebon sebagai perangkat litbang daerah. Rencana Induk Kelitbangan ini memuat arah kebijakan Kelitbangan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, dipaparkan keterkaitan antara misi yang diemban oleh perangkat litbang daerah serta indikator-indikatornya. Selanjutnya Rencana Induk Kelitbangan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 menjabarkan keterkaitan antara misi pembangunan daerah, isu-isu strategis, program/tema/kegiatan prioritas Kelitbangan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang prioritas Kelitbangan serta dilengkapi perangkat daerah yang terkait dengan program/tema/kegiatan prioritas Kelitbangan tersebut.

Dengan demikian semua pihak yang kompeten dapat berpartisipasi sesuai dengan Rencana Induk Kelitbangan Kota Cirebon 2018-2023. Keterlibatan seluruh sumber daya manusia Kelitbangan di BPPPPD Kota Cirebon, sangat diharapkan dalam kerangka menuju institusi litbang daerah yang terdepan melalui pengembangan IPTEK inovatif berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal dapat terwujud. Keberhasilan pelaksanaan program/tema/kegiatan prioritas Kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan sangat tergantung pada kerjasama dan komitmen seluruh pihak terkait khususnya di lingkup



Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Selain itu, komitmen dari perangkat litbang daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan sehingga diperoleh dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran dan sebagainya.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003